



**PERANAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH  
DALAM PEMBAHARUAN PENDIDIKAN  
DI INDONESIA TAHUN 1912-1923**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Fitria Eka Imsawati  
NIM 120210302033**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**PERANAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH  
DALAM PEMBAHARUAN PENDIDIKAN  
DI INDONESIA TAHUN 1912-1923**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S 1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

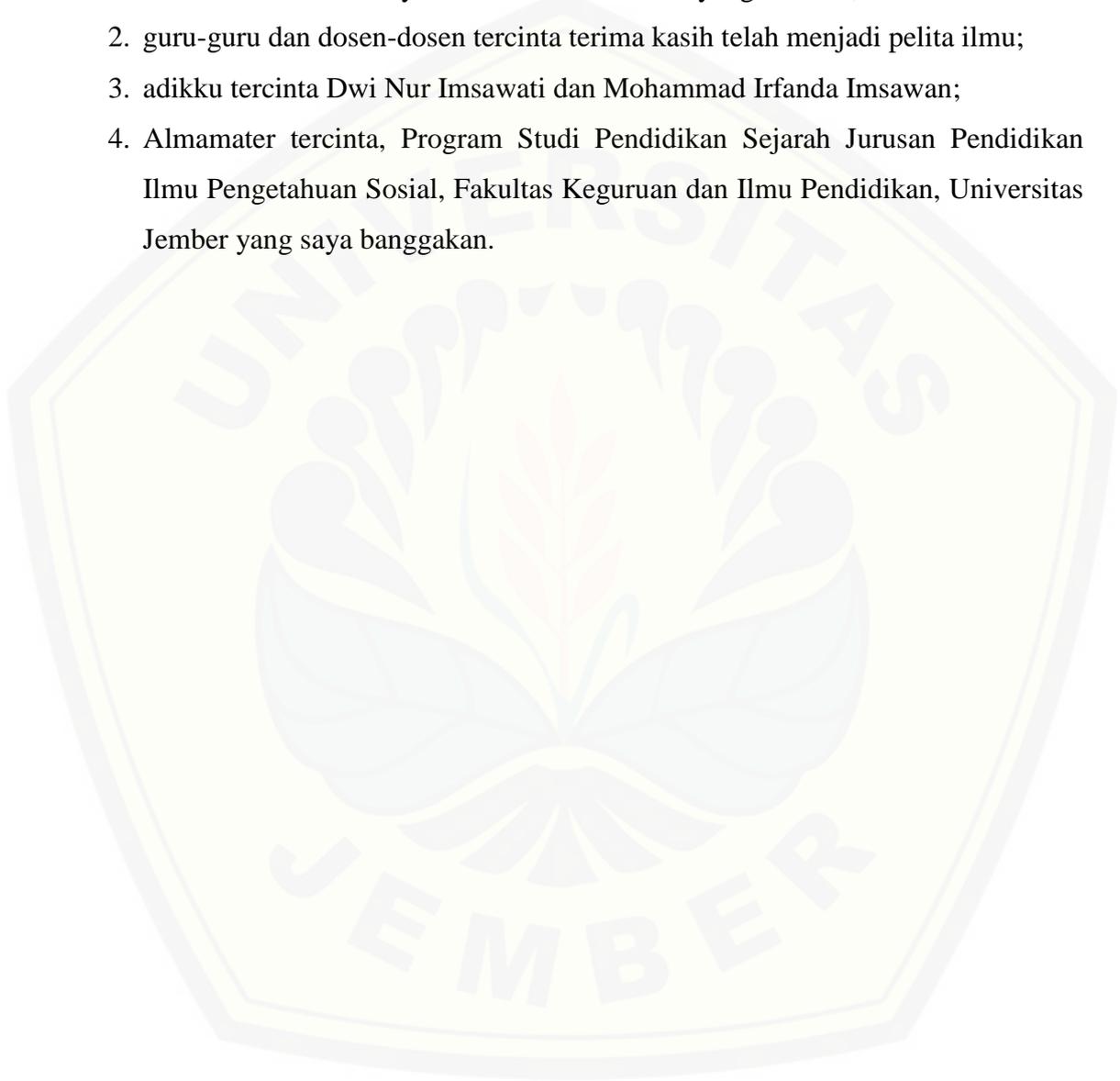
**Fitria Eka Imsawati  
NIM 120210302033**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. ibunda Sunarmi dan ayahanda Abdul Rokhim yang tercinta;
2. guru-guru dan dosen-dosen tercinta terima kasih telah menjadi pelita ilmu;
3. adikku tercinta Dwi Nur Imsawati dan Mohammad Irfanda Imsawan;
4. Almamater tercinta, Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember yang saya banggakan.



**MOTTO**

“... Alloh akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ....”.

(Qs. Al Mujadallah :11))<sup>1</sup>

Ilmu adalah pangkalan kemajuan agama dan bangsa.<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: DEPAG RI. hlm 910.

<sup>2</sup> Sucipto, H. 2010. *K.H.Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik dan Pendiri Muhammadiyah*. Jakarta: Media Utama.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Fitria Eka Imsawati

NIM : 120210302033

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab pada keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Desember 2017

Yang menyatakan,

Fitria Eka Imsawati

NIM 120210302033

**SKRIPSI**

**PERANAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH  
DALAM PEMBAHARUAN PENDIDIKAN  
DI INDONESIA TAHUN 1912-1923**

Oleh

**Fitria Eka Imsawati**  
**NIM 120210302033**

Pembimbing :

Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.

Dosen Pembimbing 2 : Drs. Kayan Swastika, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “*Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923*” telah diuji dan sahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 14 Desember 2017

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd.  
NIP : 196006121987021001

Drs. Kayan Swastika, M. Si.  
NIP : 196702102002121002

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Mohammad Na'im, M.Pd.  
NIP : 196603282000121001

Drs. Sumarjono, M. Si.  
NIP : 195808231987021001

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph. D.  
NIP. 19680802 199303 1 004

## RINGKASAN

**Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923;** Fitria Eka Imsawati; 2018; xv+100 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923 merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan menyelenggarakan pendidikan agama menggunakan sistem modern yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pembaharuan pendidikan yang dilakukan Organisasi Muhammadiyah, karena adanya dualisme sistem pendidikan pada masa pemerintahan kolonial. yaitu: sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia menjelang berdirinya organisasi Muhammadiyah? 2) Bagaimana usaha atau tindakan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923? 3) Bagaimana dampak pembaharuan pendidikan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah bagi pendidikan masyarakat Indonesia? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Menganalisis sistem pendidikan di Indonesia menjelang berdirinya organisasi Muhammadiyah 2) Menganalisis usaha atau tindakan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923 3) Menganalisis dampak pembaharuan pendidikan yang dilakukan Organisasi Muhammadiyah bagi pendidikan masyarakat Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi civitas akademi Universitas Jember, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang peranan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923 dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, bagi calon guru sejarah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar dan sumber materi sejarah bangsa Indonesia dalam proses belajar mengajar, bagi almamater FKIP Universitas Jember, dapat memberi informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang dilakukan melalui empat tahap yaitu; tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Kesimpulan yang dapat diambil dari garis besar penelitian ini adalah Kondisi pendidikan menjelang berdirinya Muhammadiyah terdapat dua sistem pendidikan yaitu; sistem pendidikan tradisional (pesantren) dan sistem pendidikan Barat (Belanda). Usaha atau tindakan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923 antara lain: Usaha atau tindakan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923 antara lain: a) prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah yaitu *humanis – religius*. b) memadukan sistem pendidikan Barat dengan sistem pendidikan pesantren dalam pendidikan Muhammadiyah. Penyelenggaraan pengajaran Muhammadiyah mengambil unsur-unsur sistem pendidikan Barat dan sistem pendidikan tradisional. Sistem pengajaran menirukan sekolah model Barat, tetapi dalam pengajaran dimasukkan pelajaran agama. c) memperbaiki kurikulum pendidikan dalam pendidikan Muhammadiyah dengan enam pokok penting yang menyangkut *Didaktik-metodik* dan *Policy Pengajaran* yang terdiri dari enam pokok; 1) cara mengajar dan cara belajar, 2) bahan-bahan pelajaran, 3) rencana pelajaran, 4) pendidikan diluar waktu belajar, 5) pengasuh / guru, 6) hubungan guru dengan murid. Dampak pembaharuan pendidikan Muhammadiyah model integralistik, pendidikan yang menintegrasikan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum pada jenis dan tingkatan sekolah dan mengembangkan pendidikan konstektual melalui proses penyadaran. Pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah melahirkan golongan modernis Islam antara lain K.H. Abdul Razzaq Fachruddin, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) dan M. Rasjidi.

Berdasarkan penelitian, saran yang dikemukakan penulis yaitu: bagi pembaca, sebagai bangsa yang besar harus menghargai jasa pahlawan, sebaiknya nilai-nilai perjuangan dapat kita ambil sebagai suri tauladan; bagi mahasiswa calon guru, dapat dijadikan sumber belajar yang mengkaji lebih dalam mengenai peranan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923”. Skripsi yang berjudul “*Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923*”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S 1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M. Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M. Sc., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Dr. Sumardi, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS;
4. Dr. Nurul Umamah, M. Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah,
5. Drs. Marjono, M. Hum., selaku Ketua Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah;
6. Drs. Sugiyanto, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd., dan Drs. Kayan Swastika, M. Si., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta pengarahan yang sangat berguna hingga terselesainya skripsi ini;
8. Dr. Mohammad Na'im, M. Pd., dan Drs. Sumarjono, M. Si. selaku Anggota Penguji I dan II yang telah memberi masukan yang sangat berguna bagi penyempurnaan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama menyelesaikan studi di Pendidikan Sejarah;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang telah membantu penulis selama studi;

11. Ayah dan Ibu yang telah memberi doa, semangat, kesabaran demi selesainya skripsi ini;
12. Adikku Dwi Nur Imsawati dan Mohammad Irfanda Imsawan yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis;
13. Sahabatku Ana, Nararyya, Febri; sahabatku di Pondok putri Sakinah Dian, Dwi, Rani, Izza, Bernadeta; serta teman-teman seperjuangan pendidikan sejarah angkatan 2012 yang telah memberi motivasi kepada penulis;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 14 Desember 2017

Penulis

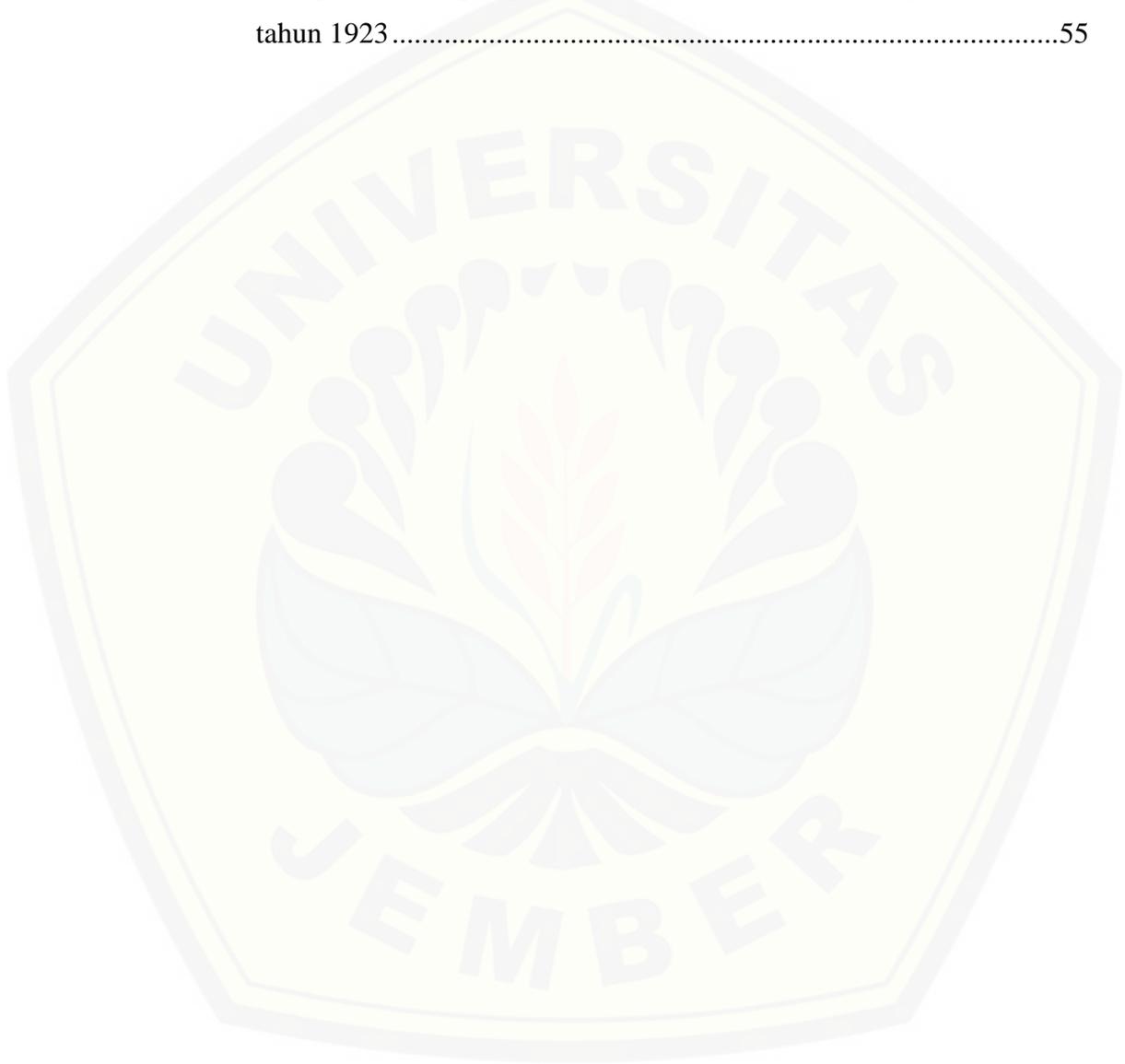
DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Penegasan Judul</b> .....	6
<b>1.3 Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	7
<b>1.4 Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.5 Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>1.6 Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
<b>2.1 Penelitian Terdahulu</b> .....	10
<b>2.2 Pendekatan dan Teori</b> .....	13
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	17
<b>BAB 4. SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA MENJELANG BERDIRINYA ORGANISASI MUHAMMADIYAH</b> .....	22
<b>4.1 Sekularisme Pendidikan</b> .....	22
<b>4.2 Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam</b> .....	36

<b>BAB 5. USAHA ATAU TINDAKAN YANG DILAKUKAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH DALAM PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 1912-1923.....</b>	<b>45</b>
<b>5.1 Prinsip Pelaksanaan Pendidikan Muhammadiyah .....</b>	<b>45</b>
<b>5.2 Perpaduan Pendidikan Barat dengan Pendidikan Pesantren dalam Pendidikan Muhammadiyah.....</b>	<b>47</b>
<b>5.3 Kurikulum Pendidikan Muhammadiyah .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB 6. DAMPAK PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH BAGI PENDIDIKAN MASYARAKAT DI INDONESIA .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB 7. PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
<b>7.1 Kesimpulan.....</b>	<b>70</b>
<b>7.2 Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konsep dan Teori.....	16
Gambar 5.1 Komponen mata pelajaran dalam sekolah Muhammadiyah tahun 1923.....	55



**DAFTAR LAMPIRAN**

A. Matrik Penelitian .....	78
B. Sistem Persekolahan Zaman Belanda.....	80
C. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid ELS.....	81
D. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid HIS .....	82
E. Sekolah , Jumlah Murid dan Guru Muhammadiyah 1920 dan 1923.....	83
F. Para siswa HIS Met de Qur'an Muhammadiyah tahun 1922 .....	84
G. Artikel K.H.Ahmad Dahlan “Tali pengikat hidup” .....	85
H. Prasaran K.H.Ahmad Dahlan dalam Kongres Islam di Cirebon Tahun 1923.....	89

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak dalam pembaharuan sosio-religius. Organisasi Muhammadiyah berperan penting dalam perubahan sosial keagamaan di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912 di Yogyakarta yang diprakarsai oleh K.H. Ahmad Dahlan (Sutarno, 2005:33). Latar belakang sosial dalam kehidupan Ahmad Dahlan telah memberikan inspirasi tentang berdirinya Organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah memiliki dukungan sistem organisasi dan amal usaha. Organisasi Muhammadiyah berproses secara intensif dalam bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga mendapatkan tempat dan pengakuan di dalam masyarakat. Organisasi Muhammadiyah berhasil menempatkan diri sebagai salah satu poros kepemimpinan sosial diluar sektor pemerintahan.

Organisasi Muhammadiyah dalam perkembangannya terus mengadakan pembaharuan di segala bidang diantaranya tajdid, sosial, budaya, terutama dalam pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama. K.H. Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-murid dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen (Zuhairini, 1992:171). Perananan organisasi Muhammadiyah dalam pendidikan dan agama dapat dirasakan dan lihat sampai sekarang. Hadirnya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tersebar luas di daerah-daerah serta antusias masyarakat terhadap sekolah-sekolah Muhammadiyah, menandakan bahwa Muhammadiyah dalam pendidikan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah Umum.

Pendidikan dalam Islam ditempatkan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat membentuk manusia dan kepribadiannya, melalui pendidikan manusia dapat memahami dan mampu menerjemahkan lingkungan yang dihadapinya (Mujahid, 2013:11). Pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam diawali daerah Minangkabau, disusul pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia.

Kebangkitan Islam semakin berkembang dan membentuk organisasi–organisasi sosial keagamaan seperti Sarekat Dagang Islam (SDI) di Bogor pada tahun 1909 dan Solo pada tahun 1911. Tahun 1911 didirikan Persyarikatan Ulama di Majalengka, Jawa Barat, kemudian berdirilah Organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912. Pemerintah Kolonial pada waktu yang bersamaan menjalankan politik etis atau politik balas budi.

Gagasan Politik Etis yang diterapkan Belanda dalam bidang pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari tujuan mengembangkan agama Kristen di Indonesia dan melemahkan Islam. Kaum *Zending* mendirikan sekolah-sekolah Kristen disamping memaksakan sistem pendidikan kolonial yang netral agama (Hamka, 1986:111-112). Kebijakan Politik Etis tampak memberikan harapan-harapan baru bagi penduduk pribumi untuk memperbaiki taraf hidup melalui kesempatan memperoleh pendidikan. Politik Etis dalam penerapannya tidak sesuai dengan harapan rakyat pribumi.

Awal abad 20 lahir organisasi Muhammadiyah sebagai alternatif berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi yang memberikan pemikiran-pemikiran baru dan menekankan pada *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Muhammadiyah bersinggungan dengan bidang–bidang sosial, politik, budaya, dan bidang kehidupan lain, oleh karena itu dalam setiap pergerakan Muhammadiyah tidak lepas dari watak keislamannya (Mujahid,2013:11). Organisasi Muhammadiyah berusaha untuk melakukan pembaharuan dengan pola pemikiran yang berorientasi kedepan, tetapi tidak meninggalkan keimanan. Pendidikan yang diselenggarakan Organisasi Muhammadiyah diharapkan mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Abad ke-19 terdapat dua sistem pendidikan yang berlaku dalam masyarakat Jawa, yaitu sejak diberlakukan kebijakan politik Etis. Kebijakan Politik Etis memberi kesempatan pada masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan. Masyarakat pribumi diperbolehkan mengikuti pendidikan Barat melalui pembentukan beberapa lembaga pendidikan yang didirikan khusus untuk masyarakat pribumi , meskipun masih diprioritaskan untuk golongan elit pribumi

(Muhammadiyah,1995: 11). Pendidikan tradisional seperti pesantren yang telah lama dikenal rakyat, sehingga terdapat dualisme sistem pendidikan yang berjalan di masyarakat pada masa itu yakni sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial dan sistem pendidikan masyarakat pribumi yang bercorak pesantren.

Dualisme sistem pendidikan itu berdiri sendiri-sendiri secara terpisah dan pendidikan yang ada menekankan pada perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pribumi. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah Belanda yang sekuler tidak mengenal ajaran agama dan berinduk pada *legitimasi* pemerintah, sedangkan pendidikan yang diberikan oleh pesantren hanya mengenal ajaran agama saja dan berinduk pada *legitimasi* masyarakat (Haq, 1985:88). Kondisi ini terbentuk disebabkan kebijakan pemerintah kolonial yang dilatar belakangi sikap anti pati terhadap kelompok Islam, mendukung masyarakat pribumi dalam bidang pendidikan. Masyarakat pribumi lebih memilih mengirimkan anak-anaknya ke pesantren, atau sekedar ke lembaga pendidikan informal yang mengajarkan pengetahuan dasar agama Islam.

Lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah Belanda telah melemahkan keberadaan lembaga pendidikan tradisional seperti Pesantren. Lembaga pendidikan tradisional diharapkan mampu mengimbangi pendidikan pemerintah yang sekuler. Kelemahan yang paling menonjol dalam pendidikan tradisional adalah sistem pendidikannya masih bersifat tradisional dan tidak teratur. Perlawanan kaum pesantren terhadap pemerintah Belanda berakibat munculnya perilaku menutup diri dari pengaruh luar.

Pendidikan Barat yang diperkenalkan kepada kelompok pribumi secara terbatas ternyata telah menciptakan kelompok intelektual dan profesional yang mampu melakukan perubahan-perubahan dan memunculkan ide-ide baru dalam masyarakat ataupun sikap terhadap kekuasaan pemerintah Belanda. Perubahan dan pencetus ide-ide baru pada masa awal hanya terbatas pada bidang sosial, kultural dan ekonomi, pada perkembangan selanjutnya mencakup bidang pendidikan dan politik (Muhammadiyah, 1995:11). Munculnya ide-ide baru inilah yang melatar belakangi berdirinya lembaga-lembaga dan organisasi di tanah air,

seperti organisasi Budi Utomo yang menandai pergerakan nasional di Indonesia. Pergerakan nasional telah memunculkan kesadaran dikalangan ulama pendidik Islam, setelah sekian lama terpuruk dibawah kekuasaan pemerintah kolonial, tidak terkecuali K. H. Ahmad Dahlan. K. H. Ahmad Dahlan menyadari bahwa sistem pendidikan langgar dan pesantren tradisional sudah tidak sesuai dengan kondisi pendidikan Indonesia dan jumlah murid yang ingin belajar. Awal abad ke-20 terdapat pembaharuan dalam bidang pendidikan dikalangan umat Islam yaitu setelah berdirinya Organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Organisasi Muhammadiyah memandang bahwa ketertinggalan umat Islam adalah tertinggalnya ilmu pengetahuan umum dalam masyarakat. Ketinggalan itu dapat dikejar jika pandangan berfikir umat Islam dapat berkembang lebih luas.

K. H. Ahmad Dahlan mengupayakan pendidikan yang diselenggarakan organisasi Muhammadiyah adalah pendidikan agama dengan menggunakan sistem pendidikan modern yang sesuai dengan tuntutan zaman. K. H. Ahmad Dahlan mengadopsi pendidikan barat yang bersifat intelektualitas, rasional, dan elit selama tidak menentang ajaran agama Islam (Kutoyo, 1998:199). Pendidikan yang diselenggarakan organisasi Muhammadiyah adalah suatu model pendidikan pembaharuan yang bersifat sintetis antara unsur-unsur lain dan unsur-unsur baru dari barat. Pendidikan model lama tetap dipertahankan, seperti pendidikan agama sebagai dasar, sedangkan Pendidikan yang baru adalah cara melaksanakan pendidikan yang banyak diambil dari sekolah barat. Pendidikan untuk membentuk manusia yang berkepribadian sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan Nasional, Seperti halnya Taman Siswa.

Pandangan organisasi Muhammadiyah tentang pendidikan berkaitan dengan pola, metode pendidikan, dan pesantren, berbeda dengan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Keduanya adalah gabungan yang menghasilkan teknik pengajaran baru dengan enam pokok penting yang meliputi masalah *Didaktik-Metodik* dan *Policy Pengajaran*:

- 1) cara mengajar dan cara belajar, dengan sistem klasikal cara-cara barat yang lebih efisien;

- 2) bahan pelajaran, pengetahuan agama dasar umum juga mempelajari kitab-kitab lama dan modern;
- 3) rencana pembelajaran, adanya pengaturan rencana secara efisien belajar terjamin;
- 4) pendidikan diluar waktu belajar diselenggarakan dalam asrama yang dipimpin dan teratur;
- 5) pengasuh, terdiri dari para ulama dan intelek ulama yang mengikuti paham peraturan;
- 6) hubungan guru dan murid, tercipta suasana akrab bebas dan demokratis (Wirjoyosukarto, 1996: 120)

Tujuan Organisasi Muhammadiyah dalam pendidikan adalah membentuk manusia yang berkepribadian dan berahlak mulia .Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan Organisasi Muhammadiyah, mata pelajaran agama diberikan dengan cara baru, selain itu diajarkan huruf latin dan ilmu-ilmu umum, seperti: berhitung, ilmu bumi, dan ilmu tentang tubuh manusia (Hadikusumo, 2002:64). Pendidikan Muhammadiyah adalah suatu model pembaharuan yang bersifat sintesis antara unsur-unsur baru yang datang dari barat. Unsur-unsur lama tetap dipertahankan dan pelajaran agama sebagai dasar, sedangkan hal yang baru adalah tehnik penyelenggaraan pengajaran yang banyak diambil dari sekolah-sekolah barat. Sistem pendidikan pelajaran yang dapat diambil dari pendidikan pesantren adalah ajaran agamanya sedangkan yang diambil dari sistem pendidikan barat adalah mata pelajaran umunya serta sistem kelasnya. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah tidak dilaksanakan di Surau tetapi didalam gedung dengan menggunakan meja, kursi, papan tulis.

Sasaran pokok organisasi Muhammadiyah sejak awal berdirinya antara lain:

- 1) Mengembalikan dan memurnikan ajaran agama Islam sesuai dengan sumber aslinya Al-Qur'an dan Hadist,
- 2) Mengajak masyarakat untuk memeluk dan mempraktekkan cita-cita ajaran Islam,
- 3) Menegakkan amar Ma'ruf nahi munkar,

- 4) Mempergiat usaha di bidang pendidikan dan pengajaran yang bernafaskan Islam( Deppen RI,1962:158).

Untuk mencapai sasaran diatas organisasi Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh dimana membicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan wakaf dan masjid-masjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah untuk mencapai tujuan itu ( Noer, 1982:86).

Pemilihan bidang pendidikan dalam penelitian ini berdasarkan pada beberapa alasan:

- 1) Bidang pendidikan adalah Usaha terbesar organisasi Muhammadiyah dan merupakan ciri pokok organisasi Muhammadiyah sejak awal berdirinya 1912
- 2) Deskriminasi pendidikan yang dijalankan pemerintah Belanda terhadap masyarakat Bumiputera dan sistem pengajaran yang dijalankan pemerintah Belanda tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang beragama Islam.
- 3) Pendidikan sangat penting bagi kemajuan peradaban Manusia.

Berdasarkan alasan dan fakta diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923”.

## 1.2 Penegasan Judul

Penegasan pengertian judul dalam penelitian sangatlah penting, bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi. Penguraian ini sangatlah perlu untuk memberikan batasan-batasan yang relevan dengan maksud istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini guna memperoleh gambaran yang jelas dan penafsiran yang sama dengan pembaca. Berkaitan dengan penegasan pengertian judul tentang “Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923”. Peranan didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen, 1998:76). Status tersebut kemudian dijalankan sesuai

dengan fungsi dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Kedudukan status ini merujuk pada organisasi Muhammadiyah.

Nugroho (2010:107) dalam bukunya yang berjudul "*K. H. Ahmad Dahlan Biografi Singkat 1869- 1923*" menjelaskan bahwa yang dimaksud pembaharuan pendidikan adalah usaha memperbaiki pemahaman seseorang atau kelompok tentang pendidikan, mencerahkan hati dan fikiran dengan mengenalkan kembali ajaran agama Islam sesuai dengan dasar Alqur'an dan Sunnah. Pembaharuan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam pendidikan difokuskan pada memadukan model pendidikan barat dan pesantren, pelaksanaan pendidikan dan kurikulum pendidikannya.

Berdasarkan pengertian diatas, maksud yang terkandung dalam judul "Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923" adalah tindakan atau usaha yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan khususnya dalam kurikulum dan tehnik pengajaran di Indonesia pada masa awal berdirinya 1912 sampai tahun 1923. Peran Muhammadiyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah melalui pembaharuan pendidikan yaitu dengan cara mengadopsi model pendidikan barat yang bersifat sintesis antara unsur-unsur baru yang datang dari barat. Unsur-unsur lama tetap dipertahankan dan pelajaran agama sebagai dasar, sedangkan hal yang baru adalah tehnik penyelenggaraan pengajaran yang banyak diambil dari sekolah-sekolah barat dan kurikulum pendidikannya.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan, maka peneliti perlu membatasi pembahasan khususnya batasan tempat dan waktu serta fokus kajian. Tempat dari penelitian ini, penulis fokuskan pada negara Indonesia sebagai tempat berkembangnya Organisasi Muhammadiyah. Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah 1912-1923. 1912 dijadikan sebagai batas awal dari penelitian ini karena pada tahun 1912 adalah

awal berdirinya organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh keyakinan beragama yaitu berusaha mengembalikan ajaran agama Islam kepada Sumber aslinya , Alquran dan Hadits serta memperluas dan mempertimbangkan pendidikan Islam secara modern dengan cara mengabungkan model pendidikan barat dan pendidikan agama. Sedangkan tahun 1923 dijadikan sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun 1923, didirikannya pondok Muhammadiyah (Kweekschool Muhammadiyah) yang mencetak guru-guru untuk sekolah Muhammadiyah oleh K.H.Ahmad dahlan sebagai pemakarsa berdirinya Organisasi Muhammadiyah. Ruang lingkup materi yaitu peranan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan di Indonesia serta dampak dari adanya pendidikan Muhammadiyah di Indonesia.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan lingkup permasalahan diatas maka dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia menjelang berdirinya organisasi Muhammadiyah ?
- 2) Bagaimana usaha atau tindakan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923?
- 3) Bagaimana dampak pembaharuan pendidikan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah bagi pendidikan masyarakat Indonesia?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian ilmiah selalu diupayakan kearah terwujudnya tujuan yang diinginkan. Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis sistem pendidikan di Indonesia menjelang berdirinya organisasi Muhammadiyah

- 2) Menganalisis usaha atau tindakan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923
- 3) Menganalisis dampak pembaharuan pendidikan yang dilakukan Organisasi Muhammadiyah bagi pendidikan masyarakat Indonesia

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan diatas, maka diharapkan dari Peneliti ini diperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, latihan berfikir, memecahkan masalah secara kritis dan logis, menambah wawasan tentang gerakan modernisasi Islam pada umumnya dan menambah wawasan tentang Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923.
- 2) Bagi Pembaca  
Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923.
- 3) Bagi Calon Guru Sejarah  
Dapat menambah penguasaan materi Sejarah Nasional Indonesia dan memperkaya materi sejarah bangsa Indonesia.
- 4) Bagi Almamter FKIP Universitas Jember  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian serta dapat menambah khasanah kepustakaan Universitas Jember.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related Literature*). Sesuai dengan arti tersebut, tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka (laporan penelitian dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan (*collateral*). Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian, semakin banyakseorang peneliti mengetahui, mengenal, dan memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (yang berkaitan erat dengan topik penelitian), semakin dapat dipertanggung jawabkan cara meneliti dan menemukan pemecahan masalah yang diteliti. Diharapkan dengan tinjauan pustaka ini akan memberikan rujukan perbandingan dan bantuan analisis untuk menelaah permasalahan yang diteliti. Tinjauan pustaka ini merupakan kajian penelitian terdahulu yang berhubungan dengan “Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923”.

Ali dalam tesisnya “Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah (1912-1942) Melacak Akar- akar Pendidikan Modern”. Dalam penelitian ini membahas : *Pertama*, situasi pendidikan di Indonesia pada abad ke- 19sebelum munculnya pendidikan modern terdapat dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan pribumi yang dilaksanakan masyarakat serta pendidikan gubernemen oleh pihak Belanda. Terdapat dua jenjang dalam pendidikan Pribumi, yaitu pengajian al-qur’an dan pesantren. Pada pihak lain pendidikan Belanda pada abad ke-19 masih dilakukan dengan sederhana dan terbatas didaerah-daerah perkotaan serta diperuntukkan untuk anak-anak Belanda dan lapisan atas priyayi. *Kedua*, terdapat tiga ragam Pendidikan Nasional yang disebut sebagai akar pendidikan modern, yaitu Muhammadiyah (1912), Taman Siswa (1922), dan INS Kayutanam (1926). Tujuan akhir pendidikan Muhammadiyah adalah ingin membangun kembali tatanan masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bagi Taman Siswa pendidikan diarahkan untuk membangun kembali kebudayaan yang ada dimasyarakat dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Basis pendidikan

Taman Siswa bercorak kultural-nasional. Pendidikan INS Kayutanam dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi manusia secara maksimal sehingga mampu hidup mandiri ditengah –tengah masyarakat. *ketiga*, Muhammadiyah merupakan salah satu akar pendidikan modern di Indonesia.

Ningsih dalam skripsinya “Peranan K.H.Ahmad Dahlan dalam Pendidikan Islam Tahun 1911-1923”. Skripsi ini membahas faktor penyebab K.H.Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1911 -1923 mengenai latar belakang sosio- kultural K.H Ahmad Dahlan dalam melakukan pembaharuan pendidikan dan kemunduran umat Islam yang disebabkan kondisi pendidikan Indonesia pada masa penjajahan serta dualisme pendidikan yang terjadi dalam masyarakat. Pemikiran dan amal usaha K.H.Ahmad Dahlan sebagai pelopor pembaharu pendidikan yang dilanjutkan dengan munculnya pendidikan Muhammadiyah pada tahun 1912, melahirkan perbandingan pendidikan Muhammadiyah dengan pendidikan barat. Pembaharuan pendidikan yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan digunakan sebagai acuan pendidikan Muhammadiyah pada dewasa ini, walaupun pada awalnya pembaharuan yang dilakukan K.H.Ahmad Dahlan memperoleh pertentangan dari masyarakat.

Aziz dalam skripsinya “Perjuangan Muhammadiyah dalam Pendidikan (1922-1942)”. Skripsi ini membahas tentang keadaan masyarakat di Jawa yang mengalami dikotomi antara pendidikan di pesantren atau pendidikan barat, yang menerapkan sistem yang berbeda. *Pendidikan Pesantren*, menggunakan sisten guru kula, pelajaran dan kurikulum dalam pendidikan pesantren tidak mengenal bentuk kelas. Pendidikan pesantren tidak menyelenggarakan ujian untuk pengontrolan kemajuan santri, sehingga tidak ada nilai hasil studi yang dikeluarkan dan santri belajar di pondok tidak ada batas waktu belajar. *Pendidikan barat*, menerapkan sistem jenjang klasikal dan bersifat sekuler (tidak mengenal pelajaran agama). pelajaran dan kurikulum dalam pendidikan barat sudah menggunakan sistem belajar berjenjang. Adanya dikotomi pendidikan ini melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah. Untuk menghilangkan dikotomi pendidikan itu organisasi Muhammadiyah mendirikan sekolah. Metode yang digunakan berbeda dengan lembaga-lembaga pada umumnya. Pendidikan yang

diselenggarakan organisasi Muhammadiyah harus mampu menjawab tantangan golongan elit sekuler berpendidikan barat yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah berpendidikan barat.

Ariyanti dalam skripsinya “Pendidikan sebagai Strategi Pembaharuan Sosial di Surakarta 1917- 1942”. Skripsi ini membahas gambaran umum berdirinya Muhammadiyah, latar belakang alasan Organisasi Muhammadiyah mengadakan pembaharuan pendidikan dan proses terbentuknya organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Latar belakang pendidikan sebagai prioritas pembaharuan dalam Organisasi Muhammadiyah, yaitu ingin mengembangkan akal dan ilmu. Setinggi-tingginya pendidikan akal ialah dengan pendidikan ilmu. Selain itu, kondisi umat islam pada saat itu, keadaan umat dalam kondisi perpecahan, kebodohan dan kemiskinan. Dibidang pendidikan organisasi Muhammadiyah ingin menciptakan elit muslim yang terdidik yang memiliki identitas Islam yang kuat, mampu memberikan bimbingan dan teladan kepada masyarakat, sebab pendidikan yang diselenggarakan Belanda hanya memberikan pelajaran umum saja tanpa pendidikan agama. Para pelajar hanya pandai ilmu keduniawian tanpa mempunyai pedoman yang kokoh berupa ilmu-ilmu keagamaan. Motif Belanda menyelenggarakan pendidikan untuk kaum bumiputera adalah: 1). supaya bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah, adanya jalur ini diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur lapisan atas serta tenaga terdidik yang bermutu tinggi bagi keperluan penjajahan Belanda. 2). pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Skripsi ini juga menjelaskan mengenai gambaran pendidikan yang ada di Surakarta, terdapat delapan belas sekolah yang didirikan di Surakarta oleh kaum Zending. Sekolah ini awal berdirinya karena kedatangan bangsa Belanda dengan motif penyebaran injil. Skripsi ini juga membahas Perkembangan pendidikan Muhammadiyah, dan bentuk-bentuk pembaharuan pendidikan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah di Surakarta serta pengaruh adanya pembaharuan pendidikan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah terhadap masyarakat Surakarta.

Penjelasan atau review mengenai peranan organisasi Muhammadiyah yang telah dijabarkan diatas sama-sama membahas peranan Muhammadiyah dalam pendidikan. walaupun sama-sama membahas peranan Muhammadiyah dalam pendidikan, hanya saja pokok bahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini berbeda. Garis besar yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, sistem pendidikan masyarakat Indonesia menjelang berdirinya organisasi Muhammadiyah. *Kedua*, tindakan atau usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di indonesia tahun 1912-1923. *Ketiga*, dampak pembaharuan pendidikan Muhammadiyah bagi masyarakat di Indonesia tahun 1912- 1923. Penelitian ini, peneliti ingin memperdalam bahasan dengan fokus periode tahun 1912 yaitu awal berdirinya organisasi Muhammadiyah sampai tahun 1923.

## **2.2 Pendekatan dan Teori**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki daerah yang saling dilingkupi antara sosiologi dengan ilmu pendidikan (Vembrianto, 1993:3). Sosiologi pendidikan mencakup hubungan antar manusia dalam proses pendidikan. Pendekatan ini untuk menganalisis gejala pendidikan dari sudut struktur sosial masyarakat. Pendekatan sosiologi pendidikan menekankan kepada aspek bagaimana memandang pendidikan dari sudut orientasi sosial, hal ini untuk menguraikan dan menganalisis usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah di bidang pendidikan dalam hubungannya dalam lingkungan historis yang mengitarinya. Alasan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi pendidikan yaitu didasarkan pada masalah pendidikan yang dilakukan oleh organisasi sosial. Pendekatan sosiologi pendidikan dapat digunakan untuk melihat gejala-gejala perkembangan yang ada dalam perkembangan pendidikan Organisasi Muhammadiyah. Perkembangan ini dapat dilihat dari perkembangan institusi kependidikan Muhammadiyah dari awal berdirinya organisasi sampai tahun 1923.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori organisasi sistem terbuka (*open system organization theory*) yang dikemukakan oleh Stephen R. Robbin sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang akan diteliti. Teori organisasi sistem terbuka merupakan sistem transformasi yang saling berhubungan antara input (masukan), proses dan output (keluaran) (Robins, 1991:11). Organisasi sistem terbuka merupakan bagian dari lingkungan, sehingga organisasi bisa dipengaruhi maupun mempengaruhi lingkungan. Ketergantungan dan keterbukaan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan bentuk organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan dimana organisasi itu berada. Penelitian tentang peranan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912- 1923 dirasa cocok apabila menggunakan teori organisasi sistem terbuka tersebut. Teori organisasi sistem terbuka mencakup 3 hal yang perlu diperhatikan :

- a. Input adalah informasi atau cara yang merangsang bertindak untuk membangkitkan tindakan.
- b. Proses adalah tindakan atau usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan (output).
- c. Output merupakan hasil atau tujuan yang hendak dicapai dari suatu proses atau tindakan (Winardi, 2003: 45)

Menurut penulis teori organisasi sistem terbuka tepat digunakan untuk menganalisis peranan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia, karena pada masa penjajahan Belanda pelaksanaan pendidikan di Indonesia dianggap tidak sesuai, sebab pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Belanda bersifat sekuler dan tidak mengenal pelajaran agama serta berinduk pada legitimasi pemerintah. Pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan pribumi bersifat pesantren, mengedapankan pelajaran agama dan berinduk pada legitimasi masyarakat.

Langkah-langkah teori organisasi sistem terbuka yang telah disebutkan diatas dapat dijelaskan: *pertama*, organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang mempunyai tempat yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia, karena lahirnya organisasi Muhammadiyah untuk memberdayakan

masyarakat serta membantu memecahkan masalah sosial yang dihadapi khususnya masalah pendidikan. Awal abad dua puluh terjadi dualisme sistem pendidikan yang berdiri secara terpisah dan terdapat perbedaan yang sangat tajam terhadap penyelenggaraan dua sistem pendidikan yaitu sistem pendidikan kolonial dan sistem pendidikan pribumi (pesantren)(Haq, 1985:88). Sistem pendidikan inilah yang melatarbelakangi tindakan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan.

*Kedua*, dalam teori organisasi sistem terbuka mencakup suatu konsep tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini lebih melihat usaha atau tindakan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia. Usaha atau tindakan yang dilakukan antara lain memadukan sistem pendidikan Barat dengan sistem pendidikan pribumi, prinsip pelaksanaan pendidikan, dan kurikulum pendidikannya. Usaha atau tindakan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah ini yang nantinya akan menghasilkan teknik pendidikan baru.

*Ketiga*, hasil atau tujuan yang hendak dicapai dari suatu proses atau tindakan. Pada tahap ini lebih melihat hasil /dampak terhadap tindakan yang dilakukan sehingga mempunyai manfaat bagi masyarakat. Tahap terakhir dari teori organisasi sistem terbuka ini melihat dampak dari pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah. Dampak dari pembaharuan pendidikan Muhammadiyah yang menghasilkan model pendidikan integralistik yang mengembangkan pendidikan kontekstual (Kutoyo, 1998: 202).

Gambar 2.1 Kerangka konsep dan teori



### BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam karya ilmiah, karena metode sangat terkait dengan tata cara mengkaji dan menganalisis persoalan yang diteliti (Beker, 1984:10). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data-data yang telah diperoleh (Gottschalk, 2008:39). Metode sejarah terdiri atas empat langkah, yaitu: pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), analisis dan sintesis (interpretasi) dan penulisan (historiografi).

Pengumpulan data (heuristik) merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian sejarah. Peneliti berusaha mengumpulkan data dari beberapa sumber primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian putaka (*Library Research*). Untuk mendapatkan kajian yang relevan, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri literatur yang berkaitan dengan kajian yang diteliti (Kuntowijoyo, 2005:89). Pada langkah ini, penulis berusaha mencari berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan penulisan penelitian yang dikaji.

Dalam penelitian ini peneliti mencari sumber-sumber sejarah tentang “Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923”. Sumber-sumber tersebut diantaranya adalah buku-buku dan dokumen-dokumen tentang peran Organisasi Muhammadiyah sekitar tahun 1912-1923 yang terbagi dalam sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya Sasrasoeganda yang berjudul “*Statuen Muhammadiyah*”, berdasarkan pengamatan peneliti buku ini layak di jadikan sumber primer karena dapat dipastikan keaslian dan keotentikannya karena dari sumber yang sejamin. Sasrasoeganda merupakan salah satu teman seperjuangan K.H Ahmad Dahlan dalam organisasi Muhammadiyah. Buku ini menjelaskan usaha K.H.Ahmad Dahlan dalam melaksanakan pembaharuan dalam bidang pendidikan, selain mendirikan sekolah-sekolah K.H.Ahmad Dahlan juga aktif mengajar disekolah Gubernemen seperti *Kweekschool Gubernemen Jetis, Osvia* atau *mosvia* di magelang.

Buku Amir Hamzah Wirjosukarto yang berjudul "*Pendidikan dan Pengadjaran Islam*", berdasarkan pengamatan peneliti buku ini layak di jadikan sumber primer karena dapat dipastikan keaslian dan keotentikannya. Amir Hamzah Wirjosukarto menyaksikan langsung kiprah K. H. Ahmad Dahlan dalam Pendidikan. Beliau adalah salah satu murid K.H.Ahmad Dahlan ketika itu belajar bersama ayahnya yang menjadi teman K.H.Ahmad Dahlan. Buku "*Pendidikan dan Pengadjaran Islam*", menjelaskan pembaharuan, cita-cita dan tehnik pengajaran yang dilakukan oleh K.H.Ahmad Dahlan. Cita- cita K.H.Ahmad Dahlan dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai berikut:

- 1) ingin membentuk manusia muslim yang baik budi, alim dalam agama
- 2) manusia muslim yang memiliki pandangan luas dalam ilmu dunia (ilmu umum)
- 3) bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat.

Buku "*sejarah Muhammadiyah*" karangan PP.Muhammadiyah , berdasarkan pengamatan peneliti buku ini layak dijadikan sumber primer karena dapat dipastikan keaslian dan keotentikannya. Buku ini dikarang langsung oleh pengurus Organisasi Muhammadiyah, sehingga mampu memaparkan eksistensi organisasi Muhammadiyah secara utuh, sejak gerakan ini didirikan pada tahun 1912. Organisasi Muhammadiyah bergerak hampir disemua bidang antara lain: bidang pendidikan, kesehatan, sosial,kemanusiaan hingga politik dalam buku ini memperoleh penjelasan yang memadai.

Buku sekunder yang digunakan antara lain, buku "*Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*", M.T. Arifin (1987). Buku ini layak dijadikan sumber, karena keotentikan sumber-sumber yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan. Buku ini menjelaskan perkembangan pemikiran pembaharuan Muhammadiyah serta pengaruhnya terhadap pendidikan. Buku "*Jejak Pembaharuan Sosial dan Kemanusiaan K.H.Ahmad Dahlan*" karya Abdul Munir Mulkan (2010). Buku ini layak dijadikan sumber, karena keotentikan sumber-sumber yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan. Abdul Munir Mulkan adalah salah satu anggota Muhammadiyah yang aktif sejak tahun 1966. Buku ini menjelaskan bagaimana pengembaraan pemikiran dan kehidupan K.H. Ahmad Dahlan dalam melakukan

pembaharuan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan. Gerakan dan pemikirannya selalu berlandaskan pada nilai moral dan sosial. Buku “*Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*” Deliar Noer (1982), membahas perhatian yang diberikan Belanda terhadap pendidikan dan pengajaran orang Islam Indonesia sangat besar, karena orang Islam dapat menerima kebudayaan barat. Dalam buku ini dijelaskan pula asal usul dan pertumbuhan gerakan moderen Islam baik dibidang pendidikan maupun sosial. Buku “*Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*” yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (1990), menjelaskan usaha pembaharuan Muhammadiyah dapat dibagi kedalam tiga bidang yaitu: bidang keagamaan, bidang pendidikan dan bidang kemasyarakatan.

Hamdan (2009) dalam bukunya yang berjudul “*Paradigma Bar Pendidikan Muhammadiyah*” menjelaskan bahwa maraknya lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah Belanda dengan sendirinya melemahkan eksistensi lembaga pendidikan Islam tradisional, seperti pesantren. Kelemahan yang paling menonjol dari sistem pendidikan Islam adalah sistem pendidikan Islam yang masih tradisional dan tidak teratur dan sikap pesantren yang menutup diri terhadap dunia luar. Keadaan inilah yang memicu lahirnya pendidikan Muhammadiyah yang mengabungkan dua sistem pendidikan yaitu pendidikan pesantren dan sistem pendidikan barat. Kutoyo (1998) dalam bukunya “*Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah*” menjelaskan usaha K. H. Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah dalam melakukan pembaharuan sistem pendidikan dengan memperbaiki sistem pendidikan pondok pesantren dengan sistem pendidikan modern yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kombinasi pendidikan yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan ditunjukkan dengan mendirikan sekolah yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang mengkombinasikan Ajaran Islam dengan pengetahuan sekolah umum.

Langkah selanjutnya dari penelitian sejarah setelah mengumpulkan sumber pada tahap heuristik yaitu tahapan kritik. Kritik sumber merupakan kegiatan untuk mengkaji otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber meliputi kritik ekstern dan kritik intern (Kartodirjo, 1992: 16). Kritik ekstern dilakukan untuk menilai keaslian dari sumber dan kritik intern sebagai lanjutan dari kritik ekstern

dilakukan untuk menilai isi dari sumber apakah relevan dengan masalah dan apakah sumber tersebut dapat dipercaya kebenarannya, terlebih untuk sumber sekunder. Pada kritik ekstern peneliti akan mengkaji otentisitas atau keaslian sumber-sumber yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti akan menentukan keaslian sumber dengan berpedoman pada aspek keadaan fisik sumber, bahasa, tahun terbit, dan asal-usul sumber itu sendiri. Pada tahap kritik intern peneliti akan melakukan uji kredibilitas, hal ini dimaksudkan untuk menilai apakah isi informasi atau kesaksian tersebut dapat dipercaya atau tidak.

Langkah ketiga setelah melakukan tahapan kritik adalah interpretasi. Interpretasi merupakan cara menentukan makna saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh pada tahapan sebelumnya. Interpretasi dapat diartikan sebagai fakta-fakta sejarah yang ditentukan guna memperluas pola-pola dan teori-teori sejarah serta mengkonstruksi makna dalam sejarah (Thompson, 2012: 267). Peneliti menyusun fakta-fakta dari sumber sejarah yang sudah diperoleh secara kronologis, menghubungkan antara fakta satu dengan fakta lainnya sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif dan rasional dengan berdasarkan pada aspek permasalahan. Peneliti melakukan penafsiran berdasarkan aspek pembahasan dalam penyusunan penulisan, yaitu: proses lahirnya pendidikan Muhammadiyah, usaha-usaha Muhammadiyah dalam pendidikan, implementasi pembaharuan pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah dan dampak penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. Fakta-fakta yang diperoleh kemudian dirangkai dan dihubungkan secara kronologis menjadi satu kesatuan yang logis, sistematis, dan faktual sehingga menjadi kisah yang menarik.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurrahman, 2007: 76). Historiografi ini merupakan tahap penulisan untuk merekonstruksi peristiwa yang benar-benar terjadi menjadi kisah berdasarkan fakta-fakta sejarah. Berdasarkan langkah-langkah diatas maka dapat tersusun karya ilmiah yang berupa skripsi dengan sistematika terdiri dari delapan bab. Bab 1 Pendahuluan menguraikan tentang penjelasan mengenai penting, menarik, dan perlunya penelitian mengenai peran

organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia pada periode 1912-1923 serta dampak adanya pendidikan Muhammadiyah di Indonesia untuk diteliti dan faedah yang diharapkan terutama bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta kepentingan masyarakat. Ada pula pembatasan mengenai segi tempat dan waktu yang dijadikan konsentrasi penelitian. Merumuskan masalah yang telah ditetapkan di dalam latar belakang penelitian yang selanjutnya membahas tujuan dan manfaat sebagai tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi.

Bab 2 tinjauan pustaka, berisi tentang pendekatan dan teori yang digunakan penulis untuk membedah objek-objek studi yang dijadikan fokus penelitian. Ada pula mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis, sehingga fokus kajian penulis dapat dibedakan dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Bab 3 metode penelitian berisi tentang tata cara memperoleh data, menganalisis dan merekonstruksi fakta-fakta sejarah dalam sebuah karya ilmiah yang bertujuan membantu proses penelitian sejarah. Bab 4 sistem pendidikan di Indonesia menjelang berdirinya organisasi Muhammadiyah, menjelaskan kondisi sistem pendidikan sebelum adanya pendidikan Muhammadiyah.

Bab 5 usaha atau tindakan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923, menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan Organisasi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan di Indonesia khususnya dalam kurikulum dan teknik pengajaran. Bab 6 dampak pembaharuan pendidikan Muhammadiyah bagi pendidikan di Indonesia, menjelaskan hasil pembaharuan Muhammadiyah dalam pendidikan. Bab 7 berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang diperoleh dari *me-review* bab 1 sampai bab 6.

## **BAB 4. SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA MENJELANG BERDIRINYA ORGANISASI MUHAMMADIYAH**

Masa penjajahan kolonial terjadi dualisme pendidikan di Indonesia. Dualisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:22) diartikan sebagai paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan. Dalam konteks pendidikan, dualisme diartikan sebagai adanya dua sistem pendidikan yang terpisah yakni antara pendidikan umum dan pendidikan agama (Islam). Sistem pendidikan umum kurikulumnya mengutamakan perluasan pengetahuan umum. Sementara itu, sistem pendidikan agama mengutamakan penguasaan ilmu keagamaan.

Dualisme pendidikan dalam sejarahnya berakar dari pemberlakuan kebijakan politik segregasi (pemisahan) di bidang pendidikan pada masa kolonial Belanda, yakni pendidikan Barat yang sekuler dan pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ajaran-ajaran agama. Permulaan abad ke-20 terdapat perbedaan yang tajam antara golongan yang mendapat pendidikan agama dan golongan yang mendapat pendidikan sekuler (Syaifulloh, 2015: 120). Dua sistem pendidikan tersebut berdiri sendiri –sendiri secara terpisah. Pendidikan pesantren berinduk pada legitimasi masyarakat dan komunitas Islam. pendidikan barat berinduk pada legitimasi pemerintah. Kondisi ini terbentuk karena kebijakan pemerintah kolonial.

### **4.1 Sekularisme Pendidikan**

Perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada dasarnya dibagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu masa kekuasaan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) dan periode kedua yaitu kekuasaan pemerintah Belanda. Masa kekuasaan VOC pendidikan telah mendapat perhatian, meskipun lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuk masih sangat terbatas. Awalnya VOC mendirikan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen Protestan sebagai ganti dari agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis.

Usaha VOC dalam penyebaran agama Kristen Protestan dengan mendirikan sekolah-sekolah terutama didaerah yang dulu telah dinasranikan oleh bangsa Portugis dan Spanyol, seperti Ambon, dan Ternate. Sekolah –sekolah yang didirikan VOC hanya terbatas diluar Jawa karena dipulau Jawa tidak pernah terkena pengaruh Portugis. Pendidikan di Jawa baru didirikan pada tahun 1617 di Jakarta. Pendirian lembaga di Jakarta tidak lagi berkemungkinan sebagai penyebaran agama namun, lembaga pendidikan yang diharapkan nantinya akan menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang dipergunakan untuk kepentingan VOC baik dalam pemerintahan, administrasi maupun gereja (Djumhur dan Danasaputra, 1974:115-118). Periode kedua, yaitu pendidikan pada masa pemerintah Kolonial. Pergantian periode ini ditandai dengan penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari VOC kepada pemerintah Belanda. Pada masa pemerintah Belanda di Indonesia terjadi pergantian sistem politik, khususnya dalam masalah sistem pendidikan. Banyak pandangan dan pemikiran mengenai pendidikan di Indonesia, sehingga pemerintah Belanda tidak harus mulai dari awal.

Awal abad 19 pemerintah Belanda hanya memberikan pengajaran kepada penganut agama Kristen dikalangan penduduk pribumi, supaya mereka dapat membaca kitab Injil. Tahun 1818 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa orang-orang pribumi diperbolehkan masuk sekolah-sekolah Belanda dan pemerintah akan menetapkan peraturan-peraturan tata tertib yang diperlukan mengenai sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi (Brugmans dalam Baudet & I.J.Brugmans, 1987: 178-179). Pemerintah Belanda menyerahkan hal pengajaran kepada Gereja, swasta dan badan-badan kesejahteraan sosial. Pemerintah Belanda dalam pelaksanaan pengajaran bagi pribumi hanya sebuah rencana, tetapi sedikit tindakan. Baru pada tahun 1848 gubernur jenderal telah menerima kuasa untuk menggunakan biaya sebesar f 25.000 setiap tahunnya. Biaya tersebut digunakan untuk pendirian sekolah-sekolah di Jawa, yang diperuntukkan bagi pendidikan pegawai- pegawai pribumi. Pendidikan tidak lagi terbatas pada anak-anak pemeluk Kristen, tetapi sampai kebutuhan personil Gubernur.

Pembatasan pengajaran yang terakhir hilang pada tahun 1863, Menteri Fransen Van De Putte telah menetapkan agar penduduk pribumi mendapat kesempatan untuk memperoleh pengajaran. Tahun 1864 diadakan kegiatan perluasan sekolah untuk pribumi yang awalnya terdapat 186 sekolah, tahun 1882 naik menjadi 512 sekolah bagi pribumi (Brugmans dalam Baudet & I.J.Brugmans, 1987:179). Perluasan pengajaran bagi penduduk pribumi mengalami banyak kesulitan, karena penduduk tidak menyadari kegunaan bersekolah. Penduduk lapisan ataslah yang mengerti tujuan pengajaran, yaitu untuk memperoleh pekerjaan dilingkungan gubernemen.

Pemerintah Belanda dalam menangani masalah pendidikan berpedoman pada beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut :

- 1) pemerintah berusaha untuk tidak memihak salah satu agama tertentu,
- 2) tidak diusahakan untuk hidup secara selaras dengan lingkungannya tetapi lebih ditekankan agar anak didik dikemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi kepentingan kolonial,
- 3) sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia,
- 4) pada umumnya pendidikan diukur dan diarahkan untuk membentuk suatu golongan elit sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia,
- 5) dasar pendidikannya adalah dasar pendidikan barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan Barat (Gunawan, 1986:11).

Berdasarkan beberapa prinsip tersebut maka sistem pengajaran yang ada terlihat nyata bahwa dari seluruh penduduk di Indonesia hanya beberapa anggota masyarakat saja yang dapat menerima pendidikan. Adanya lapisan sosial dan pembentukan elit sosial sekaligus sebagai alat bagi kepentingan Belanda telah membentuk suatu sistem politik pendidikan yang hanya memberi prioritas pada golongan kelas atas. Penerimaan murid ditentukan atas dasar asal-usul atau darah keturunan bangsawan (elite birokrat tradisional), jabatan orang tua diukur dari banyaknya pemilikan kekayaan.

Pendidikan 1900 merupakan kelanjutan dari pendidikan jaman VOC yang tujuan pendidikannya sedikit berbeda karena disesuaikan dengan tuntutan jaman. Pada jaman VOC pendidikan bertujuan untuk mencetak tenaga buruh kasar dan elite sosial sedangkan pendidikan setelah politik etis bertujuan memenuhi kebutuhan yang diperlukan pemerintah kolonial Belanda, bukan untuk memajukan rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda memerlukan banyak tenaga dari masyarakat Indonesia untuk menjalankan perusahaan-perusahaan Belanda (Nasution, 2014:17). Pemerintah Belanda memerlukan pegawai yang mempunyai pendidikan dan tingkat kecerdasan, namun pendidikannya tidak terlalu tinggi sebab dapat menjadi ancaman bagi pihak Belanda.

Awal abad 20 kebijakan politik dinegeri Belanda mengalami perubahan. Berkuasanya kaum liberal memunculkan banyak tokoh yang merubah dan mempengaruhi kebijakan Belanda di Hindia Belanda. Berubahnya Kebijakan Belanda terhadap Hindia Belanda tidak lepas dari peranan tokoh, antara lain: Van Deventer, P. Brooshooft dan Van Linburg Stirum. Para tokoh tersebut menciptakan pemikiran baru terhadap negeri jajahan yang di Hindia Belanda dikenal dengan politik etis. Pada dasarnya politik etis bermula dari tulisan Van Deventer yang berjudul “ *Een Ereschuld*” (hutang budi), yang dimuat dalam majalah *De Gids* pada tahun 1901. Tulisan tersebut menghimbau Belanda untuk membuat perhitungan keuangan bagi tanah jajahan yang kekurangan sebagai ganti rugi akan laba yang sudah dikeruk Belanda dari Jawa melalui sistem tanam paksa (Niel, 1984: 21).

Ide ide politik etis antara lain adalah irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Pendidikan memiliki sekala yang sangat penting melihat populasi masyarakat pribumi, sehingga mereka berpikir untuk memajukan dan meningkatkan pendidikan masyarakat pribumi. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak diangkatnya Alexander W. F. Indeburg sebagai menteri urusan tanah jajahan (Niel, 1984: 55). Pendidikan masyarakat Hindia Belanda diarahkan dari ketidakmatangan yang dipaksakan agar berdiri dikaki sendiri. Politik etis melahirkan zaman pergerakan yang didalamnya terdapat berbagai macam kegiatan sosial,

politik dan ekonomi baik dari negara Belanda maupun pemerintah Hindia Belanda.

Pemikiran tentang pendidikan yang menghendaki peningkatan ekonomi dan kultural dikalangan penduduk telah tumbuh, namun usaha tersebut namun usaha tersebut memperoleh kendala dalam pelaksanaannya (Nieuwenhuys dalam Baudet & I.J. Brugmans, 1987: 17). Tahun 1900-an mulai didirikan sekolah-sekolah untuk golongan priyayi maupun rakyat biasa (lihat lampiran B halaman 80). Sebenarnya pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum penerapan politik etis, namun pendidikannya masih sebatas pendidikan pondok pesantren yang hanya mengajarkan pendidikan agama Islam. Perkembangan pengajaran dan sistem sekolah yang didirikan pemerintah Belanda masih disesuaikan dengan sifat dualistis pendidikan Indonesia, baik mengenai bahasa pengantarnya maupun sistem pelajarannya.

Pelaksanaan sekolah yang didirikan pemerintah Belanda terdapat empat kategori sekolah yaitu:

- 1) sekolah Eropa yang sepenuhnya memakai model sekolah negeri Belanda,
- 2) sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar,
- 3) sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa daerah atau pribumi sebagai bahasa pengantar,
- 4) sekolah yang memakai sistem pribumi (Kartordirjo, 1999:76).

Kedudukan sekolah sistem 1 dan 2 sangat strategis. Pengajaran yang diberikan menghasilkan tamatan yang siap menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di Indonesia dibawah pengawasan pemerintah Belanda. Tipe sekolah 3 dan 4 merupakan pendidikan yang dipersiapkan untuk menghasilkan buruh kerja rendah dan kasar. Kesempatan belajar dengan jumlah sekolah yang masih terbatas, merupakan suatu kelangkaan apalagi untuk masuk sekolah sistem Belanda. Sistem penerimaan murid pada sekolah didasarkan atas tolok ukur tertentu, antara lain status pegawai negeri orang tua serta golongan gaji tertentu.

Pengadaan pendidikan secara resmi hanya memberikan gambaran adanya tugas dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap pembinaan pendidikan

rakyat diwilayah jajahannya. Penyelenggaraan Pendidikan secara tidak langsung memberikan kesan positif kepada dunia internasional bahwa Belanda berkeinginan untuk meningkatkan peradaban penduduk diwilayah jajahannya. Prakteknya pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda didasarkan pada adanya politik pecah belah atau adu domba serta diskriminasi yang didasarkan atas strata sosial. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang utama diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan pribumi dan tokoh-tokoh terkemuka. Dengan harapan mereka kelak menjadi kader-kader pemimpin yang berjiwa kebarat-baratan, dan diharapkan anak-anak yang telah terdidik nantinya menjadi penyambung tangan penjajah agar Belanda tidak memerintah secara langsung di Indonesia.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan, umumnya mencerminkan kekuatan dan kepentingan pemerintah kolonial. Pendidikan mulai tingkat bawah sampai tingkat tinggi bukan dimaksudkan untuk mencerdaskan masyarakat Hindia Belanda, melainkan sekedar memberi kesempatan keluarga golongan tertentu untuk ikut serta dalam mempertahankan kelangsungan hidup kolonial. Sistem pendidikan yang dikembangkan telah memberi peluang untuk anak-anak pribumi, sebagai hasil interaksi antara penguasa kolonial dengan penduduk setempat. Sekolah-sekolah yang didirikan hanya untuk memenuhi kepentingan kolonial.

Masa politik etis banyak sekolah-sekolah yang dikembangkan dan didirikan, direorganisasikan kurikulumnya maupun statusnya. Tingkatan-tingkatan tersebut dibuat untuk sekolah rendah seperti Europese Lagere School (ELS), Hogere Burger School (HBS), dan macam-macam sekolah kejuruan dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, akan tetapi pendidikan yang diberikan hanya terbatas pada pendidikan dasar karena tujuan utama dari pendidikan yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan kolonial akan tenaga rendah dan kasar. Program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah Belanda sangat lambat karena pendidikan yang diberikan tidak untuk mencerdaskan rakyat Indonesia, akan tetapi terbatas untuk memenuhi kebutuhan politik kolonial. Rakyat Indonesia dididik untuk menjadi tenaga –tenaga ahli dengan upah rendah yang dibutuhkan

oleh para pemilik modal dan memenuhi tenaga birokrat kolonial (Koesnarjono, 1997:26).

Tahun 1902 mulai dibukanya Sekolah Juru Kesehatan Bumiputera atau sekolah Dokter Jawa (*School Voor Indlandsche Genesskendingen*) ditingkatkan menjadi Sekolah Dokter Bumiputera *School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen* (STOVIA), dengan masa belajar enam tahun. Wahidin Soedirohoesodo seorang dokter Jawa melalui surat kabar *Retnodhomilah* (Ratna Kemilau) memperkenalkan pikiran, cita-cita, dan progamnya kepada masyarakat luas (Simbolon, 2006:248). Kemajuan Jawa akan dicapai dengan ilmu pengetahuan Barat melalui pendidikan. Kemajuan pendidikan akan dapat mengatasi permasalahan dalam kehidupan dimasyarakat, namun pendidikan masih terbatas pada golongan atas. Pendidikan rakyat biasa masih terbatas pada pendidikan rendah dan sederhana.

Tahun 1904-1909 pandangan tentang pendidikan memperoleh dukungan dari pihak pemerintah Belanda. Jendral Van heutz mendukung pendirian sekolah-sekolah dengan bahasa lokal untuk menumbuhkan rasa persatuan dan dapat membantu golongan kelas rendah. Tahun 1903 didirikan sekolah *Volk School* (Sekolah desa) dengan lama belajar tiga tahun (Said, 1983:44). Pelaksanaan pendidikan Belanda menimbulkan pelapisan sosial. Pelapisan sosial tersebut menjadi jurang pemisah dalam usaha pemersatuan bangsa.

Tahun 1907 bahasa Belanda dimasukkan sebagai mata pelajaran di sekolah kelas satu, masa belajar di perpanjang menjadi enam tahun. Sejak bahasa Belanda diajarkan di sekolah kelas satu ditiap sekolah diangkat dua orang guru Belanda. Cara penyelenggaraan sekolah pemerintah Belanda pada umumnya diatur sebagai berikut:

- 1) tempat belajar dalam sebuah gedung yang dibagi kelas-kelas,
- 2) waktu belajar lima sampai enam jam perhari,
- 3) rencana pelajaran sudah ada dan lama belajar ditentukan beberapa tahun menurut jenjang sekolah,

- 4) bagi yang menamatkan sekolah diberikan ijazah yang memiliki civil Effect untuk meneruskan pelajaran kesekolah yang lebih tinggi atau untuk mencari kerja pada jabatan pemerintahan,
- 5) mata pelajaran yang diberikan berhitung, membaca dan menulis(Wirjosukarto, 1968:62).

Gambaran umum tentang penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah Belanda telah menunjukkan eksistensinya di Indonesia. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada umumnya bersifat sekuler dalam artian pelajaran agama atau semangat beragama tidak diberikan dalam mata pelajaran, dikarenakan bangsa Belanda tidak mau mencampuri kebudayaan masyarakat pribumi. Sesuai dengan prinsip pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda yang tidak ingin rakyat hidup selaras dengan lingkungan karena tujuan utama pemerintah Belanda menekankan kemampuan untuk menjadi pekerja keras pemerintah kolonial. Pelajaran agama Islam tidak diberikan karena kebijakan politik kolonial Belanda yang tidak mau mencampuri agama Islam. Sesuai dengan prinsip pendidikan pemerintah kolonial Belanda yaitu pemerintah Belanda berusaha untuk tidak memihak salah satu agama tertentu.

Pemerintah kolonial berharap dengan perluasan pendidikan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kolonial, namun tidak semua penduduk Indonesia dapat mengenyam pendidikan, melainkan hanya golongan-golongan tertentu. Pelapisan sosial yang menjadi penghambat perluasan pendidikan, sebab hanya diperuntukkan bagi golongan kelas atas. Seleksi penerimaan murid didasarkan atas asal-usul keturunan, jabatan orang tua, dan kepemilikan kekayaan. Penerapan politik kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia mempunyai beberapa ciri-ciri meliputi: 1) *gradualisme* yaitu pemerintah Belanda memperlambat perkembangan pendidikan di Indonesia; 2) *dualisme* yakni adanya perbedaan pendidikan untuk golongan Belanda dan Bumiputera; 3) kontrol sentral yang kuat yaitu kebijakan pendidikan diatur oleh gubernur jndral yang bertindak atas nama atasannya; 4) keterbatasan tujuan yaitu pendidikan dilaksanakan hanya untuk mencetak pegawai rendahan; 5) prispip

konkordansi yaitu antara sekolah Belanda dan sekolah pribumi mempunyai standarisasi kurikulum yang sama; 6) perencanaan pendidikan tidak sistematis (Salindri, 1996:28).

#### a. Gradualisme

Gradualisme dalam sistem pendidikan berarti pemerintah kolonial Belanda sangat lamban dalam melakukan perubahan pendidikan. Sifat gradualisme ini dibuktikan dengan kurangnya perhatian terhadap sistem pendidikan mulai awal kedatangan Belanda di Indonesia sampai pertengahan abad ke 19. Sejak jaman VOC sistem pendidikan bangsa Indonesia tidak mendapatkan perhatian, sebab kedatangan kolonial Belanda di Indonesia untuk mencari keuntungan dalam perdagangan. Pendidikan di negeri Belanda berada di tangan gereja, namun di Indonesia VOC mencegah gereja untuk meyebar luaskan pendidikan sebab VOC khawatir dengan perkembangan pendidikan akan menghambat kedudukan monopoli VOC.

Setelah kekuasaan VOC digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang terpengaruh pikiran liberalisme, maka pendidikan mulai mendapat perhatian (Nasution, 2014:21). Perhatian pendidikan hanya ditujukan untuk anak-anak Belanda, sedangkan anak-anak pribumi kurang mendapatkan perhatian. Kewajiban gubernur jendral untuk memajukan pendidikan telah ada namun hanya sebatas janji tanpa ada pelaksanaan yang terwujud. Akhir abad ke-19 perhatian pendidikan diberikan kepada anak-anak Belanda, bahkan mereka mendapat kesempatan belajar yang lebih baik dari pada di Nederland sendiri.

Tahun 1902 hanya seorang diantara 523 orang Jawa yang bersekolah. Anak-anak Belanda telah dapat memasuki pendidikan menengah pada tahun 1860, sedangkan anak-anak Indonesia baru dapat memasuki sekolah menengah pada tahun 1914. Sekolah menengah sebagai lanjutan dari sekolah rendah berbahasa Melayu. Terdapat berbagai alasan pendidikan untuk anak Indonesia sangat lambat perkembangannya. Pendidikan bagi jutaan murid akan memakan biaya jutaan gulden (Nasution, 2014:22). Biaya tersebut harus disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. pemerintah kolonial Belanda tidak rela, sebab akan menelan banyak keuntungan.

Urusan penduduk diserahkan kepada raja masing-masing, karena pemerintah Belanda tidak ingin mengganggu adat istiadat setempat. Kenyataannya raja-raja dan penduduk setempat tidak mempunyai minat di bidang pendidikan, walaupun diberi dorongan oleh beberapa gubernur jendral. Awal abad ke-20 pendidikan barat menjadi sesuatu yang berharga sebagai kunci menjadi pegawai pemerintah dan melanjutkan pelajaran (Salindri, 1996:30). Dengan demikian keperluan akan pendidikan sangat tinggi, dan perkembangan sistem pendidikan semakin luas. Walaupun pada awalnya masyarakat Indonesia takut jika budaya Barat akan mempengaruhi anak-anak mereka.

Pejabat Belanda bersifat konservatif untuk mempertahankan *status quo*. Pejabat di Hindia Belanda bahkan bersifat lebih konservatif sebab mereka yang terlibat langsung dalam perubahan-perubahan dikalangan orang Indonesia akibat dari perkembangan pendidikan. Ide Progresif yang dicetuskan dan di instruksikan lambat laun tidak dilaksanakan, bahkan gubernur jendral sendiri sering tak berkuasa untuk melanjutkan perkembangan (Nasution, 2014:23). Gradualisme menjamin kedudukan yang menguntungkan bagi Belanda. Batasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak Indonesia untuk menjaga agar anak-anak Belanda selalu lebih maju.

Pendidikan yang semakin maju akan membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Memberi pendidikan tanpa ada jaminan pekerjaan hanya akan memperbanyak golongan intelektual yang akan menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda khawatir jika orang Indonesia menguasai bahasa Belanda maka akan merasa dirinya sama dengan orang Belanda dan menentang bangsa kulit putih.

#### b. Dualisme

Dualisme sistem pendidikan di Hindia Belanda artinya ada dua pembagian baik secara rasial maupun sosial. sistem pendidikan kolonial terbagi menjadi dua yaitu sekolah Belanda dan sekolah pribumi. Dasar pembagiannya adalah bahasa, sekolah Belanda menggunakan bahasa Belanda dan sekolah pribumi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa daerah. Sekolah Belanda memperoleh

kesempatan untuk menempuh sekolah lanjutan. Sekolah pribumi dapat dikatakan tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan kesekolah Belanda.

Anak-anak Belanda yang berasal dari tingkat atas atau tingkat sosialnya tinggi memperoleh kesempatan untuk memasuki sekolah Belanda ELS kelas satu sedangkan anak-anak Belanda yang status sosialnya rendah memasuki sekolah ELS bukan kelas satu. Perbedaan tersebut juga terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Anak-anak desa memasuki sekolah Desa dan anak-anak yang berada dikota serta pusat perdagangan dan industri memasuki sekolah kelas dua (Nasution, 2014:24). Perbedaan-perbedaan tersebut yang dapat menghambat kemajuan pendidikan bagi masyarakat pribumi, sebab kesempatan memperoleh pendidikan sebatas pada golongan sosial atau status sosial.

Dualisme merupakan akibat adanya dua bangsa yang hidup bersama dalam hubungan koloni dengan hak yang berbeda. Orang Belanda sebagai penjajah, penguasa, dan pemberi pekerjaan, sedangkan orang Indonesia sebagai terjajah, buruh dan pekerja. Orang Belanda selalu mempertahankan status kolonial hingga akhir masa jajahannya. Orang Belanda tidak pernah menjalankan pemisahan yang penuh dalam pendidikan. Anak Indonesia di beri kesempatan untuk memasuki sekolah Belanda walaupun terbatas.

Akibat adanya dualisme pendidikan golongan intelektual Indonesia berupaya agar dapat mencukupi akan kebutuhan pendidikan bagi bangsanya sendiri. Perkembangan pendidikan, selanjutnya didirikan *Europese Lagere School* (ELS) khusus untuk anak-anak Eropa dan *Hollands Inlandse school* (HIS) untuk anak-anak pribumi golongan priyayi. Sekolah dasar bagi golongan pribumi dibedakan menjadi dua yaitu sekolah kelas satu untuk golongan bangsawan dan sekolah kelas dua untuk golongan rakyat biasa. Perkembangan jumlah sekolah dan murid ELS terus bertambah sejak tahun 1900-1940 (lihat lampiran C halaman 81) , pada tahun 1900 jumlah sekolah negeri masih mencapai 169 sekolah, sedangkan pada tahun 1940 telah mencapai 174 sekolah. Perkembangan jumlah sekolah dan murid HIS juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 1915-1940 (lihat lampiran D hlm 82) pada tahun 1915 jumlah sekolah

negeri masih mencapai 102 sedangkan pada tahun 1940 telah mencapai 186 sekolah.

### c. Kontrol Sentral yang Kuat

Pemerintah memegang peranan penting dalam pendidikan. Perubahan pendidikan tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan dari Gubernur Jendral atau Direktur pendidikan yang bertindak atas nama pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda berada dibawah kontrol gubernur jendral yang menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Gubernur jendral bertanggung jawab kepada raja diwakili oleh menteri jajahan.

Gubernur jendral diangkat oleh raja atas usul dewan menteri, khususnya menteri jajahan karena ia yang mempertanggung jawabkan tindakan gubernur jendral dihadapan parlemen (Nasution, 2014:27). Gubernur jendral di bantu oleh sejumlah pegawai negeri yang terbagi dalam sembilan departemen. Gubernur jendral eksekutif tertinggi yang berhak mengeluarkan peraturan atas persetujuan menteri jajahan. Menteri jajahan harus menjawab segala macam pertanyaan tentang pemerintahan jajahan bukan hanya tentang politik utama yang dijalankan, melainkan juga hal-hal lain yang memerlukan informasi terperinci dari gubernur jendral, hal ini dilakukan setiap tahun. Menteri jajahan dapat diminta pertanggung jawaban atas setiap aspek kebijaksanaannya termasuk yang tidak penting.

Menteri jajahan cenderung mengarahkan Gubernur Jendral termasuk dalam hal-hal kecil yang sebenarnya membatasi kebebasan dan kekuasaan Gubernur Jendral (Salindri, 1996:33). Akibat pengawasan ketat dari Menteri jajahan Gubernur Jendral cenderung mengawasi administrasi pusat dengan lebih ketat untuk keselamatan dirinya. Gubernur Jendral dibantu dalam fungsi legislatif dan eksekutifnya oleh suatu badan penasehat yang disebut *Raad Van Indie*. Badan penasehat terdiri atas wakil ketua dan empat anggota yang ditunjuk oleh raja Belanda.

Gubernur Jendral tanpa suara, akan tetapi biasanya jarang menghadiri rapat-rapat dan segala komunikasi dilakukan dengan cara korespondensi. Gubernur Jendral dalam hal-hal tertentu bebas meminta pendapat dalam hal legislatif seperti diuraikan dalam peraturan pemerintah penasihat badan ini

diharuskan harus mencapai persetujuan antara gubernur jendral dan badan penasehat. Keputusan gubernur jendral selalu ditanyakan sesuai dengan nasehat *Raad Van Indie*. Gubernur Jendral biasanya sebelum mengambil keputusan meminta keterangan yang diperlukan dari direktur departemen yang bersangkutan. Direktur pendidikan dan agama misalnya akan meminta keterangan yang terperinci dari para inspektur atau panitia khusus untuk memperoleh gambaran yang teliti dan nyata tentang suatu masalah.

Direktur pendidikan dan agama akan mengirimkan informasi kepada gubernur jendral beserta pandangan dan saran-sarannya. Gubernur jendral akan mengirimkan semua keterangan kepada dewan Hindia Belanda untuk menerima *advis* dan menyerahkan masalah itu kepada menteri jajahan beserta saran-sarannya. Menteri jajahan akan mengambil keputusan akhir tentang apa yang akan dilakukan (Nasution, 2014:28). Prosedur tersebut harus diikuti secara sistematis. Direktur pendidikan dan agama tidak diijinkan untuk berhubungan langsung dengan menteri melewati gubernur jendral. Masalah pendidikan hanya di putuskan oleh pegawai Belanda saja tanpa adanya koordinasi dengan orang Indonesia.

#### d. Keterbatasan Tujuan

Keterbatasan tujuan maksudnya pelaksanaan pendidikan hanya sebagai penyedia pegawai pemerintahan yang terdidik. Sekolah pertama untuk anak Indonesia didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendidik anak-anak aristokrasi di Jawa menjadi pegawai perkebunan pemerintah. Perluasan pendidikan sebagian besar ditentukan oleh kebutuhan pegawai dan juru tulis yang terus meningkat. Kebutuhan akan pegawai administrasi yang murah oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta maka pendidikan Barat makin terbuka untuk Indonesia.

Kemajuan ekonomi disertai dengan perkembangan pendidikan dan depresi ekonomi yang membawa kemunduran pendidikan (Nasution, 2014:29). Kebutuhan pemerintah akan pegawai yang terdidik menjadikan pemerintah kolonial belanda membuka kesempatan untuk anak-anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Kedudukan sebagai pegawai pemerintah sangat dihargai pada jaman kolonial yang birokratis. Pegawai pemerintah adalah pendukung

otoritas kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial Belanda banyak memperkerjakan orang-orang Belanda dalam pemerintahan sebanyak 65%. Diluar pemerintah dan perusahaan barat tidak banyak pekerjaan yang terbuka bagi orang Indonesia yang berpendidikan. Unsur kewirausahaan di hilangkan dengan monopoli pemerintah.

e. Prinsip Konkordansi

Prinsip konkordansi bertujuan untuk menjaga agar sekolah-sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah-sekolah di negeri Belanda. Tujuannya agar mempermudah perpindahan murid-murid dari Hindia Belanda ke sekolah-sekolah di negeri Belanda (Nasution, 2014:31). Hal ini dimaksudkan agar mempermudah anak-anak Belanda di Hindia Belanda yang mengikuti orang tuanya. Jadi jika orang tuanya telah pensiun atau kembali ke Belanda maka mereka dapat pindah sekolah ke negeri Belanda.

Sekolah-sekolah untuk anak-anak Belanda di Hindia Belanda harus mempunyai mutu yang sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Belanda. Sekolah-sekolah Belanda di Indonesia berhasil mencapai standarisasi seperti di negeri Belanda. Anak dari Indonesia tidak menemui banyak kesulitan di negeri Belanda di banding dengan anak yang pindah sekolah di negeri itu sendiri. Persamaan kurikulum ini berlaku bagi sekolah rendah maupun sekolah menengah. Berkat prinsip konkordansi ini lulusan HBS di Indonesia tidak menemui kesulitan untuk memasuki universitas di negeri Belanda.

Prinsip Konkordansi menjadi masalah setelah banyak anak-anak Indonesia dan Cina yang memasuki ELS. Kelayakan prinsip dipersoalkan karena menurut kenyataan sekitar 90% anak-anak ELS tidak akan pergi ke negeri Belanda. Kurikulum ELS tidak mempunyai fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan keadaan yang khas di Indonesia. walaupun berdiri di Indonesia sekolah ELS berorientasi pada Belanda dan sepenuhnya dipusatkan pada kondisi Belanda (Nasution, 2014:32). ELS mengabaikan bahasa dan kebudayaan Indonesia. Bahasa Melayu yang menjadi bahasa populer tidak dimasukkan dalam kurikulum pengajaran ELS.

f. Perencanaan Pendidikan Tidak Sistematis

Sekitar tahun 1910 terdapat berbagai macam sekolah rendah untuk anak-anak Indonesia seperti sekolah Desa untuk anak-anak yang berada di pedesaan. Sekolah kelas dua untuk anak-anak orang biasa yang hidup dikota-kota. Sekolah kelas satu untuk anak-anak kaum ningrat dan golongan kaya. Sekolah-sekolah tersebut masing-masing berdiri sendiri tanpa adanya ikatan organisasi yang sistematis sekolah untuk pendidikan pegawai hanya dapat dimasuki melalui ELS (Nasution, 2014:32). Tidak adanya hubungan antar sekolah mulai disadari pada tahun 1910. Gubernur Jendral Indenburg mengusulkan pandangan dan sarannya kepada menteri jajahan tentang rencananya menyatukan sekolah-sekolah yang berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pendidikan masa pemerintahan Kolonial Belanda tidak didasari adanya struktur organisasi yang teratur. Pendirian lembaga pendidikan hanya sebagai wujud usaha pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan politiknya. Pendidikan bukan syarat utama bagi anak-anak pribumi, namun atas dasar kepentingan pemerintah kolonial Belanda sebagai alat menjalankan politik Belanda. Munculnya lembaga pendidikan mendorong masyarakat untuk berpacu dalam meningkatkan intelektual masyarakat, meskipun kebijakan pendidikan yang ada masih terbatas. Pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda diharapkan tidak hanya mampu mencetak tenaga terdidik, namun juga menjadikan masyarakat Indonesia lebih maju agar dapat terlepas dari tangan penjajah.

#### **4.2 Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam**

Pendidikan pesantren telah ada di Jawa sejak sebelum Islam masuk. Periode Hindu pendidikan pesantren dipusatkan disekitar candi-candi. Tujuan penting dari pendidikan pesantren adalah untuk mentransformasikan kebudayaan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Periode Hindu pendidikan hanya diberikan oleh pendeta dan subjek yang diajarkan hanya agama. Periode Islam pendidikan tradisional dilestarikan dengan perubahan sedikit mendasar yaitu dari Hinduisme ke Islam ( Soetedja, 1956:24). Akhir abad 19 kehidupan masyarakat di Jawa sangat memprihatinkan. Islam menjadi

kepercayaan hidup masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang secara turun temurun.

Perkembangan Islam dipengaruhi sikap keberagaman dalam masyarakat yang dipenuhi mitologi (mitos) menjadi penyebab utama kelemahan akidah dan semangat beragama. Perilaku keberagaman umat Islam disebabkan banyaknya ajaran Islam yang dicampur adukkan dengan kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaan Islam murni. Kepercayaan yang masih ada dalam diri umat Islam yaitu adanya kepercayaan terhadap paham *Hinduisme* dan *Animisme*. Praktek *sinkretisme* dalam masyarakat sangat terlihat, antara adat istiadat dengan agama tidak dapat dipisahkan. Praktek agama rusak karena munculnya sikap dan perilaku *bid'ah* dan *khufarat*. *Bid'ah* muncul, karena keinginan untuk memperbanyak ibadah tetapi kurang pengetahuan, oleh karena itu ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. *Khufarat* adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dan hanya ikut-ikutan tradisi nenek moyang.

Pendidikan pesantren adalah pendidikan pengajian Al Qur'an dilanggar-langgar. Pesantren adalah lembaga sosial dibidang pendidikan keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan, serta menyebarkan agama Islam. pesantren menurut sejarahnya merupakan tempat untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah Belanda seperti Teungku Tjik di Aceh, Teungku Imam Bonjol di Sumantra Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa (Wirjosukarto, 1968:47). Pemerintah Belanda mencurigai keberadaan pesantren sebagai sumber untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah Belanda.

Dampak penjajahan Belanda mengakibatkan banyak berdiri lembaga pendidikan yang dikelola Belanda. Dualisme sistem pendidikan dengan sendirinya melemahkan eksistensi lembaga pendidikan tradisional (pesantren). Lembaga pendidikan tradisional tidak mampu mengimbangi pendidikan pemerintah Belanda yang sekuler. Kelemahan yang paling menonjol dalam pendidikan tradisional adalah sistem pendidikannya yang tidak teratur. Sikap konfrontasi kaum pesantren terhadap pemerintah kolonial mengakibatkan munculnya perilaku menutup diri dari pengaruh barat.

Dualisme pendidikan di Indonesia terjadi antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama, antara sekolah umum dan madrasah, yang pengelolaannya memiliki kebijakan masing-masing. Berdasarkan sejarahnya, dualisme pendidikan berakar dari pemberlakuan kebijakan politik segregasi (pemisahan) di bidang pendidikan pada masa kolonial Belanda. Kebijakan tersebut telah membawa pendidikan Indonesia ke arah pemisahan pengelolaan institusi-institusi pendidikan Islam oleh Departemen Agama dan institusi-institusi pendidikan umum oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pelaksanaan pendidikan yang berbasis pada prinsip *separate but equal* (terpisah tapi setara), mengakibatkan terselenggaranya pendidikan nasional yang diskriminatif, yakni adanya marginalisasi terhadap pendidikan Islam yang terus melekat pada sejarah pendidikan nasional.

Segregasi dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari pemerintahan Kolonial Belanda, ketika dikeluarkannya *Koninklijk Belsuit* (Keputusan Kerajaan) tanggal 21 September 1866 yang tercantum dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1886 no.127. Berdasarkan keputusan tersebut, pemerintah kolonial membentuk empat Departemen, salah satu diantaranya adalah *Departement vaan Onderwijs, Eeredienst, en Njiverheid/OEN* (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan) tahun 1863. Tujuan dibentuknya departemen tersebut untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang murah, karena mahal biaya tenaga kerja dari Belanda. Departemen OEN bertanggungjawab terhadap sekolah-sekolah partikelir terutama yang diselenggarakan oleh *Zending* Kristen maupun Missi Katholik.

Pelaksanaan pendidikan oleh pemerintah Belanda terjadi penggolongan sekolah yakni sekolah pertama untuk orang Eropa dan kalangan atas masyarakat pribumi yang disebut *standaardscholen* (sekolah standar). Sekolah kedua untuk kaum menengah dan sejumlah besar masyarakat lainnya, disebut *desascholen* (sekolah desa) (Anrooij, 2014:107). Belanda menanamkan dualisme dalam pendidikan berupa penggolongan sekolah antara golongan bangsawan dan

masyarakat pribumi. Pendidikan untuk pribumi hanya digunakan untuk mempertahankan status sosial.

Belanda menjalankan politik asosiasi pendidikan, dengan mendirikan sekolah untuk masyarakat pribumi, namun terjadi deskriminasi dalam pelaksanaannya (Suminto, 1986:41). Deskriminasi tersebut berkaitan dengan kurikulum dan pengelompokan sekolah berdasarkan warna kulit dan ras. Awalnya hanya anak-anak keturunan bangsawan yang menikmati pendidikan. Belanda memberi kesempatan menepuh pendidikan kepada anak bangsawan dengan tujuan memisahkan mereka dari kebudayaan asli, adat dan agama mereka hingga mereka dapat berpegang pada kebudayaan barat.

Perkembangan selanjutnya didirikan sekolah desa, sebuah lembaga pendidikan sederhana yang memberikan jalan ke arah terwujudnya pendidikan umum. Sekolah desa salah satunya berasal dari sekolah zending, sementara usul untuk menggabungkan pendidikan Islam selalu ditolak (Saridjo, 1996:24). Sekolah-sekolah Belanda memegang prinsip netralitas, sehingga pendidikan agama tidak diberikan porsi di dalamnya. Alasan lembaga pendidikan tidak ikut campur terhadap urusan keyakinan atau agama seseorang karena dianggap sebagai urusan pribadi (Subhan, 2009:204). Sekolah-sekolah pendidikan Islam akhirnya memisahkan diri dan terkotak dalam kubu tersendiri, dari sini dualisme pendidikan berakar. Pendidikan pribumi terdiri dari dua sistem, yakni pendidikan pribumi tradisional yang memuat pendidikan Islam; dan pendidikan pribumi yang mengajarkan pendidikan umum.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak diakui sebagai bagian dari Departemen OEN (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Perindustrian) diurus oleh Kantor Urusan Bumiputra (*Kantoor voor Indlandsche Zaken*). Kantor ini dibentuk sebagai kantor penasehat untuk perkara pribumi (Steenbrink, 1994:85). Kantor Urusan Bumiputra tidak memiliki tanggung jawab untuk membina, mengembangkan dan memberikan dukungan finansial atau subsidi terhadap pendidikan Islam. Kantor ini bertanggung jawab penuh untuk menghambat perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam (Mashuri, 1985: 4).

Masa kolonial Belanda, Penyesuaian pendidikan dengan pendidikan Islam hanya sebatas penelitian dan wacana semata yang dilakukan oleh Jenderal Van der Capellen tahun 1819. Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah *Westernisasi* dan *Kristenisasi*. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan pemerintah Belanda di Hindia Belanda. Tahun 1865, Inspektur pendidikan J.A van der Chijs yang merupakan tokoh pertama yang bekerja untuk pendidikan pribumi menolak menyesuaikan dengan pendidikan Islam dengan alasan teknis, utamanya mengenai kebiasaan menghafal teks arab (Steenbrink, 1994:2-3).

Secara formal Belanda menyatakan bersikap netral terhadap agama dalam artian tidak mencampuri dan tidak memihak salah satu agama. Pernyataan tersebut tertuang dalam undang-undang dasar Belanda *Reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch Indie* yang berlaku mulai tahun 1855, dalam artikel 119 bahwa: “setiap orang memeluk agama masing-masing dengan kebebasan sepenuhnya, termasuk perlindungan masyarakat dan anggota-anggotanya terhadap pelanggaran peraturan-peraturan umum di bidang hukum pidana” (Pijper dalam Baudet & I.J. Brugmans, 1987: 239). Belanda pada kenyataannya bersikap deskriminatif dengan memberi kelonggaran kepada misionaris kristen lebih banyak termasuk bantuan uang. Aktifitas Kristenisasi terus dilakukan terhadap penduduk pribumi tanpa ada halangan dari pemerintah, baik lembaga pendidikan maupun rumah sakit yang didirikan sebagai pendukung utama proses Kristenisasi. Belanda dalam proses Kristenisasi menggunakan peralatan yang modern dan organisasi yang teratur, dengan terwujudnya pendirian sekolah-sekolah dan rumah sakit memperoleh perhatian besar dihati rakyat, sebaliknya agama Islam mengalami kemunduran.

Pemerintah Belanda menjauhkan diri dari campur tangan terhadap Islam. Tahun 1865 pemerintah Belanda mengeluarkan pernyataan tentang pembangunan masjid yang tertuang dalam *Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch- Indie*, no. 1741 bahwa: “ negara dengan sendirinya, tidak semestinya campur tangan dengan pembangunan atau dengan perbaikan bangunan-bangunan suci agama Islam” (Pijper dalam Baudet & I.J. Brugmans, 1987: 239). Pemerintah Belanda dalam pembangunan masjid tidak atau jarang sekali memberikan bantuan

keuangan. Tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut *Priesterraden*. Pemerintah Belanda melakukan pengawasan terhadap pendidikan rakyat di pondok pesantren. Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pembatasan pergi haji dan mengawasi masyarakat Hindia Belanda yang pergi haji selama beribadah samapai kembali ketanah air, hal ini dilakukan karena maraknya perlawanan yang di pimpin oleh para Kiayi dan ulama’.

Tahun 1905 dikeluarkan ordonasi guru yang berisi ketentuan-ketentuan pengawasan terhadap pendidikan Islam. Peraturan baru ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, kecuali Yogyakarta dan Solo. Peraturan tersebut tertuang dalam staatsblad 1905 no.550 yang terdiri:

- 1) seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajarkan jika sudah memperoleh izin dari bupati
- 2) izin tersebut baru diberikan jika guru agama yang dimaksud jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik dan pelajaran yang diberikan tidak bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum
- 3) guru agama harus mengisi daftar murid, disamping harus menjelaskan mata pelajaran yang akan diajarkannya
- 4) bupati dan instasi yang berwenang boleh memeriksa daftar tersebut sewaktu-waktu
- 5) guru agama Islam bisa dikenakan hukuman kurungan maksimal delapan hari atau denda maksimal f.25, jika ternyata mengajar tanpa izin atau lalai mengisi atau mengirimkan daftar atau enggan mellihatkan daftar kepada pihak yang berwenang atau keberatan diperikasa oleh pihak yang berwenang (Mujahid,2013:113-114).

Ordonasi guru menimbulkan keresahan para guru agama atau madrasah, karena mengharuskan para guru mendapatkan izin dan melapor kepada petugas yang berwajib dalam memberikan pengajaran dirasa menyulitkan. Pemberitahuan secara berkala tentang kurikulum , mengharuskan memberi daftar guru dan murid dirasa sebagai beban berat. Guru madrasah dan lembaga pendidikan Islam tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakanadministrasi sekolah dengan baik.

Kesulitan untuk memenuhi tuntutan peraturan adalah karena semanya formulir ditulis dalam bahasa Belanda, sebab guru agama hanya memahami bahasa sendiri dan bahasa Arab.

Pemerintah Belanda sepertinya terus menerus berupaya untuk mengerogoti Islam. hal ini dilakukan melalui kebijakan politik pendidikannya. Peraturan pemerintah Belanda yang sedemikian ketat itu mengesankan bahwa pendidikan Islam akan menjadi lumpuh dan lenyap dari tanah Indonesia. Pengawasan Belanda terhadap guru, murid dan pesantren yang sangat ketat membuat pesantren bersikap anti Belanda. Secara kultural mereka menolak semua kebudayaan barat, bahkan kaum santri menolak berpakaian cara barat, tidak mau memakai huruf latin, dan menolak ilmu-ilmu yang berasal dari barat. Pesantren menutup diri dari dunia luar, sehingga menjadikan pesantren ketinggalan zaman dan perkembangannya sangat lambat. Isolasi ini menjadikan kualitas pesantren sebagai pusat dan sumber ilmu dalam masyarakat mengalami kemunduran.

Keterbelakangan pendidikan Islam dipengaruhi oleh materi dan metode pengajaran yang diterapkan disurau-surau yang hanya mewajibkan murid-murid untuk membaca sedangkan yang dapat memahami kalimat dan memberi penjelasan hanyalah guru. Guru dalam pesantren disebut Kyai, yang hidup bersama-sama dengan santri dalam kompleks pesantren. Cara hidup mereka tidak menunjukkan perbedaan dengan masyarakat sekitarnya, baik cara berpakaian, bertingkah laku dan berbicara. Pesantren adalah pendidikan rakyat, yang timbul dari rakyat untuk rakyat. Pesantren mengajarkan pelajaran lanjutan seperti bahasa Arab, fiqh (hukum Islam), tafsir Al Quran, ilmu kalam (theologi), dan tasawuf. Ilmu yang diberikan adalah ilmu agama, pelajaran pengetahuan umum tidak diberikan.

Tingkat rendah pelajaran diberikan dengan sistem keseorangan, caranya santri maju menghadap guru satu persatu dengan membawa kitabnya masing-masing. Guru membacakan salah satu kalimat bahasa Arab kemudian diterjemahkan dan diterangkan maksudnya. Santri menyimak dan memberi tanda pada kitab yang baru diterangkan (Junus, 1960: 48). Cara belajar dan mengajar dalam pesantren menggunakan sistem *sorogan* dan *weton*. Asal mula disebut

*sorogan* karena santri –santri selalu mendorong kitabnya dihadapan guru, tingkatan ini biasanya pelajaran diberikan oleh seorang guru bantu yang ditunjuk oleh Kyai. *Weton* bersal dari waktu sebab pelajaran diberikan pada waktu-waktu tertentu, Kyai memberi pelajaran secara terus-menerus dengan pelajaran baru. Pelajarannya bersumber pada kitab-kitab karangan ulam-ulama lama, oleh karena itu pelajaran ditetapkan oleh masing-masing guru yang mengajar. Rencana pembelajaran yang teratur belum ada. Kenaikan tingkat dibarengi dengan perubahan kitab yang dipelajari, ganti kitab berarti naik tingkat. Ijazah tidak diberikan, lama belajar dipesantren belum menjadi ukuran kepandaian santri. Pendidikan diluar jam belajar kurang efisien , karena guru-guru masih memiliki pikiran yang sempit serta wawasan keislaman dan kebangsaan yang kurang sebagai akibat pengisolasian diri. Hubungan guru dengan murid kurang demokratis karena guru dianggap keramat, perkataan guru dianggap kebenaran tanpa kritik.

Islam Indonesia tidak memiliki kekuatan progresif untuk melawan arus kemajuan budaya barat. Ketertinggalan ini disebabkan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap pembaharuan Islam dengan menutup rapat-rapat perhubungan antara kaum muslimin Indonesia dengan gerakan – gerakan kebangunan Islam du luar negeri (hurgonje, 1993:35). Pemerintah Belanda dengan mengadakan sensor terhadap buku-buku dan kitab-kitab yang berisi semangat kebangunan Islam dilarang masuk ke Indonesia. Tindakan tersebut mengakibat pesantren terisolasi dari pikiran kebangunan Islam.

Muncul dan berkembangnya sekolah-sekolah barat menimbulkan permasalahan dalam sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan pesantren mulai mendapat sorotan, karena dinilai kolot dan sudah ketinggalan zaman (Gunawan, 1986:22). Perasaan tidak puas terhadap sistem pendidikan Barat yang dilaksanakan pemerintah Belanda, pada pola pemikiran kaum intelektual dan pemimpin agama. Sekolah –sekolah yang didirikan kolonial bukan hasil dari pertumbuhan lokal, melainkan manipulasi kebudayaan model barat yang berakar pada negeri Belanda baik organisasi maupun kurikulumnya.

Sistem pendidikan yang berkembang bukanlah tuntutan lokal, melainkan tuntutan kolonial. Pendidikan moral dan agama merupakan pendidikan yang dianggap kurang penting bagi Belanda. Perbenturan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Barat (Belanda), penindasan terhadap masyarakat Indonesia melahirkan kesadaran mereka tentang peranan yang harus dilakukan. Golongan ulama dan intelektual mengusahakan adanya perbaikan dalam pendidikan dan pengajaran Islam. Golongan ulama dan intelektual mulai menyadari bahwa mereka tidak akan mampu menyaingi keberadaan sekolah yang didirikan pemerintah Belanda, apabila terus melanjutkan kegiatan pendidikan secara tradisional dalam menegakkan Islam.

Awal abad 20 bangkitlah sejumlah tokoh pembaharu di Indonesia yang dipelopori oleh golongan terpelajar dan ulama di Indonesia. Latar belakang pembaharuan dilatar belakangi kehidupan siswa pesantren (tradisional) yang tersaingi secara ketat oleh murid-murid sekolah priyayi yang didirikan Belanda, mendorong pemuka agama Islam di Indonesia untuk mendirikan lembaga pendidikan baru, yang kemudian diberi nama Madrasah (Suminto, 1986:23). Secara tegas tujuan pembaharuan pendidikan dan pengajaran Islam tidak pernah dinyatakan, akan tetapi tujuan pembaharuan pendidikan dan pengajaran Islam adalah untuk memperbaiki keadaan pendidikan dan pengajaran Islam baik dari segi metode pengajaran, cara penyelenggaraan maupun materi pendidikannya. Tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia merintis berdirinya madrasah, sementara lembaga pesantren dibiarkan tetap berjalan.

## **BAB 5. USAHA ATAU TINDAKAN YANG DILAKUKAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH DALAM PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 1912-1923**

Dualisme dalam dunia pendidikan Indonesia yang terjadi pada saat itu, telah menyebabkan timbulnya dua macam pemikiran yang sangat berbeda. Pemikiran hasil dari pendidikan barat yang hanya mengenal ajaran ilmu-ilmu dunia akan tetapi tidak mengenal ilmu agama dan pemikiran hasil dari pendidikan pesantren yang banyak mengenal ilmu agama tetapi tidak mengenal ilmu umum. Adanya dua perbedaan yang menonjol dari dua lembaga pendidikan yang ada telah menyebabkan lahirnya individu-individu muslim yang tidak seimbang. Hal ini dikarenakan tidak meratanya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat (Wirjosukarto, 1968:98). Perbedaan pendidikan yang dijalankan oleh masyarakat menyebabkan K.H.Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah melakukan perubahan. K.H.Ahmad Dahlan beranggapan bahwa kehidupan masyarakat yang beragama Islam sudah tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam yang sebenarnya. Islam menghendaki individu-individu yang seimbang dengan kehidupannya berdasarkan Al Quran dan Hadist.

### **5.1 Prinsip Pelaksanaan Pendidikan Muhammadiyah**

Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk membantu peserta didik agar berkembang secara normatif lebih baik dalam dimensi intelektual, moral, dan psikologis. Pendidikan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik memasuki masyarakat dan kebudayaan yang terus berubah (Soeratno, 2009: xiv). Pendidikan diharapkan bersifat *humanis-religius* dimana dalam pengembangan kehidupan (ilmu pengetahuan) tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan. Nilai keagamaan dan kebudayaan merupakan nilai inti bagi masyarakat yang dipandang sebagai dasar untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang bersatu, bertoleransi, berkeadilan, dan sejahtera.

*Humanistis – religius* dapat dipenuhi dalam struktur kurikulum yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. Pengembangan

dan pembaharuan pendidikan Muhammadiyah diperlukan penajaman ciri pendidikan Muhammadiyah yang berbasiskan Islam (Haedar, 2010:420-421). Prinsip pelaksanaan Pendidikan Muhammadiyah yang dijalankan oleh K.H.Ahmad Dahlan disesuaikan pada prinsip yang mendasar pada Al Qur'an dan Sunnah. Maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi keagamaan tidak terlepas dari pandangan Muhammadiyah tentang kedudukan dan fungsi Al Qur'an dan Sunnah, akal dan tata kehidupan sosial.

Upaya Muhammadiyah dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang bersumber pada Al Qur'an, Sunnah, akal, dan realitas kehidupan sosial, utamanya dalam bidang pendidikan. K.H.Ahmad Dahlan dalam hal ini ingin mengembalikan ajaran agama Islam sesuai dengan Al Qur'an dan Hadis, karena umat Islam di Indonesia telah mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran yang lain seperti ajaran *Animisme*. Pembaharuan yang dijalankan oleh pendidikan Muhammadiyah mendasar pada prinsip *tajdid*. Organisasi Muhammadiyah bertekad memperkuat diri sebagai gerakan *tajdid* atau pembaharuan, baik dalam hal pemikiran maupun tindakan.

Pendidikan Muhammadiyah menggunakan prinsip *tajdid* disebabkan karena masyarakat selalu dinamis dan berubah seiring dengan perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan. Bidang pendidikan Muhammadiyah memperbarui model pendidikan tradisional Islam dengan mengadopsi model sekolah Belanda dan menambahkan mata pelajaran agama disamping mata pelajaran umum. Hal ini dibuktikan pertama kali ketika K.H.Ahmad Dahlan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah pada tahun 1911. Madrasah Ibtidaiyah Diniyah dalam pembelajarannya mengintegrasikan antara pendidikan modern yang diajarkan disekolah-sekolah pemerintah Belanda dengan pendidikan tradisional yang dijalankan pondok pesantren. Integrasi pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah disesuaikan dengan prinsip pendidikan Muhammadiyah.

Prinsip integrasi ilmu pengetahuan yang dilakukan Muhammadiyah dalam pendidikan menunjukkan respon positif terhadap perkembangan dunia pendidikan diluar lingkungannya, serta untuk dapat bersaing dengan sistem pendidikan yang lebih maju tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang dianut berdasarkan Al

Qur'an dan Sunnah. Bidang pendidikan organisasi Muhammadiyah mengalami transformasi dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitasnya sebagai gerakan dakwah. Organisasi Muhammadiyah dalam pendidikan memiliki sistem pendidikan sendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan Islam pada umumnya. Sistem pendidikan dan pengajarannya Muhammadiyah berpolakan sistem Barat dan mengintegrasikan dengan sistem pendidikan pondok pesantren yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan rakyat pribumi.

## **5.2 Perpaduan Pendidikan Barat Dengan Pendidikan Tradisional dalam Pendidikan Muhammadiyah**

Kegagalan pendidikan Islam merespon kemajuan zaman, sehingga tidak dapat bersaing dengan lembaga pendidikan kolonial menyebabkan pendidikan Islam semakin terisolasi. Kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial sangat sekuler, pelajaran agama tidak diberikan. Penyelenggaraan pendidikan tradisional terbatas dari pesantren-pesantren yang hanya memberikan pelajaran agama. Akibat adanya dualisme sistem pendidikan muncullah konfrontasi yang berkepanjangan dalam tata kehidupan, cara berfikir dan kebudayaan masyarakat yang dihasilkan oleh masing-masing sistem.

Kondisi umat Islam pada masa itu, menimbulkan keprihatinan K. H. Ahmad Dahlan terhadap perkembangan pendidikan Islam. K. H. Ahmad Dahlan merasa tergerak untuk melakukan aktivitas yang menerapkan sistematika kerja organisasi ala barat. Melalui pelembagaan amal usahanya K. H. Ahmad Dahlan melakukan penangkalan budaya atas penetrasi pengaruh kolonial Belanda dalam kebudayaan, peradaban, dan keagamaan, utamanya intensifnya upaya kristenisasi yang dilakukan misi *Zending* dari Barat (Sucipto, 2010:116-117). Berdasarkan keprihatinannya, K.H.Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah mulai melakukan pembaharuan pendidikan dengan menggabungkan kedua sistem pendidikan yang berorientasi pada pendidikan modern, sehingga akan melahirkan

anak didik yang berkepribadian utuh, berahlak mulia, dan berguna bagi masyarakat.

Gagasan K. H. Ahmad Dahlan tentang pendidikan agama Islam adalah Islam *Liberal* (modern). Gagasan K. H. Ahmad Dahlan tentang perintis Islam liberal di Indonesia tentang kemanusiaan berkaitan dengan modernisasi dan liberalisme dakwah dan pendidikan Islam, sebagai bagian dari *tajdid* dan *Ijtihad* dalam pemikiran Islam cukup penting. Islam liberal berusaha mengembangkan Islam di dunia moderen, bukan dengan memperdebatkan apakah ajaran Islam benar mutlak, sempurna, dan abadi. Islam liberal mencari solusi bagaimana ajaran itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam atau yang kafir (Mul Khan, 2010: 92-93). K. H. Ahmad Dahlan menegaskan bahwa ajaran Islam liberal adalah proses pemurnian ajaran yang bersumber langsung pada Al Qur'an dan Hadits, tanpa ada tafsir-tafsir yang lainnya. K.H. Ahmad Dahlan mengkritik penggunaan kitab yang dikarang pada zaman kemunduran islam. kitab-kitab yang berisi pertentangan pendapat itu mempengaruhi timbulnya perpecahan umat Islam.

Pemurnian ajaran Islam dari tahayul, bid'ah dan khufarat yang selama ini telah bercampur dalam akidah dan ibadah umat Islam dilakukan K.H.Ahmad Dahlan dengan jalan ijtihad. K.H. Ahmad Dahlan mengajak umat Islam untuk keluar dari jaring pemikiran tradisional melalui pemahaman kembali terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan penjelasan yang dapat diterima oleh rasio. Ide-ide pembaharuan menurut K.H Ahmad Dahlan hanya dapat dilaksanakan melalui pendidikan. Pendidikan dijadikan proritas utama untuk meningkatkan kemajuan umat Islam dan mengarahkan umat Islam pada pemahaman ajaran Islam yang lebih sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits.

Organisasi Muhammadiyah pada awal berdirinya merupakan organisasi Islam yang bertujuan mensyi'arkan agama Islam. Perkembangan selanjutnya Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan, tetapi juga memajukan pengajaran dengan mendirikan sekolah-sekolah sendiri (Baudet, 1987: 247-248). Usaha organisasi Muhammadiyah di bidang pendidikan memelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan. Pembaharuan di bidang pendidikan

yang dilakukan organisasi Muhammadiyah meliputi dua segi yaitu: segi cita-cita dan segi tehnik pengajaran. Segi cita-cita, berkaitan dengan pemikiran K.H.Ahmad Dahlan akan tujuan pendidikan yaitu ingin membentuk manusia muslim berbudi pekerti , alim dalam agama, luas dalam pandangan dan faham masalah ilmu dunia/ umum, bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Segi tehnik, berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pengajaran.

Penyelenggaraan pengajaran Muhammadiyah mengambil unsur-unsur sistem pendidikan Barat dan sistem pendidikan tradisional. Sistem pengajaran menirukan sekolah model Barat, tetapi dalam pengajaran dimasukkan pelajaran agama (Sutarno, 2005 :254). Disekolah dan madrasah yang dikembangkan Muhammadiyah sudah digunakan sarana fisik , bangku, meja dan papan tulis. Administrasi dan organisasi juga lebih tertib sebagaimana yang diselenggarakan disekolah –sekolah pemerintah. Murid tidak duduk dilantai seperti kebiasaan dipesantren. Penjenjangan waktu belajar sudah diterapkan, bimbingan siswa diluar jam pelajaran dan penilaian dengan ulangan atau ujian dilaksanakan secara periodi. Murid yang telah menamatkan pendidikan diberikan ijazah.

K.H.Ahmad dahlan mengupayakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan organisasi muhammadiyah adalah pendidikan agama dengan menggunakan sistem pendidikan modern yang sesuai dengan tuntutan zaman. K.H.Ahmad Dahlan mengadopsi pendidikan barat yang bersifat intelektualitas, rasional, dan elit selama tidak menentang ajaran agama Islam (Kutoyo,1998:199). Sehingga pendidikan yang diselenggarakan organisasi Muhammadiyah adalah suatu model pendidikan pembaharuan yang bersifat sintetis antara unsur-unsur lain dan unsur-unsur baru dari barat. Sistem pendidikan yang lama tetap dipertahankan, seperti pendidikan agama sebagai dasar sedang yang baru adalah cara melaksanakan pendidikan yang banyak diambil dari sekolah barat. Pendidikan untuk membentuk manusia yang berkepribadian sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan Nasional. Seperti halnya Taman Siswa, Muhammadiyah dalam pendidikan adalah membentuk manusia yang berkepribadian dan berahlak mulia .

Pandangan organisasi Muhammadiyah tentang pendidikan, menyangkut pola metode pendidikan Barat dan pesantren, namun berbeda dengan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda (Hadikusumo, 2002:64). Keduanya adalah gabungan yang menghasilkan tehnik pengajaran baru. K. H. Ahmad Dahlan menitik beratkan menitik beratkan perjuangan pada pendidikan dan kemasyarakatan. Sekolah Muhammadiyah pertama didirikan pada tahun 1911 di kampung Kauman Yogyakarta, satu tahun sebelum Organisasi Muhammadiyah berdiri. K.H.Ahmad dahlan mendirikan sekolah model madrasah, yang bertempat dirumahnya, sebagai penampung masyarakat muslim yang ingin belajar agama dan pelajaran umum. Pelajaran agama diberikan oleh K.H Ahmad Dahlan sendiri, sedangkan untuk pelajaran umum diberikan oleh salah seorang anggota Boedi Oetomo. Sekolah ini kemudian tumbuh menjadi *Volksschool* dengan lama belajar tiga tahun, selain itu terdapat sekolah rakyat tiga tahun *Sultanaatschool* atau sekolah kesultanan yang berada dibawah sultan. Sebagai sambungan dari *Volksschool* berdirilah *Vervolgsschool* dengan lama belajar dua tahun.

Masyarakat pada awalnya kurang merespon apa yang telah diusahakan oleh K.H.Ahmad Dahlan tentang pemberian pelajaran umum di madrasah. Pendirian madrasah Muhammadiyah merupakan terobosan baru yang berusaha memadukan model pesantren dengan pendidikan Barat, perpaduan tersebut menghasilkan:

- 1) cara mengajar; jika sistem belajar mengajar di pesantren menggunakan sistem *sorogan* dan *weton*, madrasah Muhammadiyah menggunakan sistem klasikal sebagaimana sekolah barat
- 2) bahan pelajaran; sumber dipesantren diambil dari kitab-kitab agama yang umumnya ditulis ulama klasik, madrasah Muhammadiyah bahan pelajaran diambil dari buku-buku pengetahuan umum dan juga kitab-kitab agama yang ditulis oleh para ulama pembaharu
- 3) rencana pelajaran; pendidikan pesantren tidak mengembangkan , bahkan tidak mengenal rencana pelajaran. Madrasah Muhammadiyah mengembangkan rencana pelajaran supaya lebih teratur dan efisien

- 4) pendidikan diluar kegiatan formal; pesantren tidak memberikan perhatian serius terhadap hal tersebut, akan tetapi madrasah Muhammadiyah mulai memperhatikan hal tersebut dan mengatur dengan baik kegiatan diluar pelajaran formal
- 5) pengasuh dan guru; pengasuh dan guru dipesantren hanyalah mereka yang menguasai agama saja, sedangkan di madrasah Muhammadiyah mulai merintis pengembangan guru bidang studi yang mengajar berdasarkan keahliannya
- 6) hubungan guru dan murid; dipesantren guru-murid terkesan otoriter karena para kyai dan ustad memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral, madrasah Muhammadiyah mulai mengembangkan hubungan guru murid yang akrab.

Sekolah Muhammadiyah pada awalnya terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah. Sekolah dasar Muhammadiyah menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah / bahasa Melayu tetapi ada yang menggunakan bahasa Belanda. Libur sekolah pada hari Jumat sedang hari Minggu tetap belajar seperti biasa.

Muhammadiyah melakukan perluasan pendidikan dengan mendirikan *standard school* di suronatan. Sekolah yang ada di kauman pada akhirnya di peruntukan untuk anak putri sedangkan di suronatan khusus untuk anak putra. Muhammadiyah kemudian mengembangkan sekolah dasar di daerah Yogyakarta, seperti di karangkajen, buasasran, ngadiwitan dan tempat-tempat lain di Yogyakarta (lihat lampiran E halaman 83). Muhammadiyah juga memajukan sekolah-sekolah model sekolah pemerintah kolonial. Sekolah tersebut berupa *kweekschool* Muhammadiyah, *Hollansch Inlandsch Kweekschool* Muhammadiyah di jetis Yogyakarta, dan di MOSVIA Magelang, diajarkan pendidikan agama secara kokutikuler (Salam, 1965:97). Di sekolah-sekolah ini diterapkan pelajaran sistem barat, akan tetapi di dalam kurikulumnya diajarkan pendidikan agama, dengan perbandingan sekitar 10-15 persen untuk pendidikan agama dibandingkan dengan keseluruhan kurikulum. Didirikan kursus keagamaan secara khusus sebagai keseimbangannya, seperti mubalighin, Wusta, Muallimin Zuama dan Zaimat. Muhammadiyah telah mempelopori penyelenggaraan pendidikan umum sesuai dengan keperluan jawa dan Indonesia. Sekolah

Muhammadiyah yang pertama kali didirikan untuk tingkat menengah yang banyak mendapat bantuan para intelektual nasional secara umum adalah AMS Muhammadiyah (*Algameene Middelbare School*) (Arifin, 1987:218).

Tahun 1921 Muhammadiyah mendirikan pondok Muhammadiyah, yang dilengkapi dengan asrama untuk siswa- siswa pondok yang berasal dari luar Yogyakarta. Cikal bakal sekolah ini adalah sekolah calon guru yang telah dirintis pada tahun 1918 (Mujahid, 2013: 202). Muhammadiyah berharap pondok Muhammadiyah dapat sejajar dengan *Kweekschool* milik pemerintah, karena pelajaran yang diberikan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di *Kweekschool* pada umumnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak orang tua yang tertarik mengirimkan anak- anak mereka kepondok Muhammadiyah. Pondok Muhammadiyah kemudian berganti nama menjadi *Hoogere Muhammadiyah*, sebelum diubah kembali menjadi *Kweekschool* Muhammadiyah.

Tahun 1922 terjadi penambahan jumlah sekolah yang dimiliki Muhammadiyah, karena jumlah anggota Muhammadiyah yang semakin bertambah. Muhammadiyah pada pertengahan tahun 1922 *HIS Met de Qur'an* yang terinspirasi dari penyelenggaraan HIS Met de Bijbel oleh kalangan Gereja Khatolik dan Protestan (Mujahid, 2013: 201). Berdirinya *HIS Met de Qur'an* ini, Muhammadiyah berusaha memfasilitasi para orang tua yang menginginkan anak-anak mereka melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ilmu – ilmu yang diajarkan dalam *HIS Met de Qur'an* Muhammadiyah adalah ilmu keislaman dan bahasa Arab disamping pengetahuan umum. *HIS Met de Qur'an* milik Muhammadiyah memiliki tujuh jenjang kelas yang dapat ditempuh dalam tujuh tahun belajar. Siswa-siswa yang terdaftar awalnya sebanyak 60 orang kemudian bertambah menjadi 75 orang (lihat lampiran F halaman 84).

Perjalanan Muhammadiyah yang inklusif dan progresif tanpa mendasar pada mazhab dan ajaran tertentu memudahkan Muhammadiyah untuk melakukan pembaharuan dalam segala bidang kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Gerakan pembaharuan Muhammadiyah menggunakan pola pendidikan Nasional memberikan potret sebagai organisasi yang inklusif dan progresif dengan tidak melupakan maksud dan tujuan serta identitasnya. Landasan pendidikan yang

digunakan yaitu ajaran Rasulullah yang berbunyi, “hendaknya mempelajari bahasa musuhmu agar tidak diperdaya musuhmu”, hal ini yang melatarbelakangi Muhammadiyah mendirikan sekolah berbahasa Belanda (Sucipto,2010:117). Pendidikan Muhammadiyah semakin berkembang, Akhir tahun 1923 Muhammadiyah membangun empat sekolah dasar dengan sistem sekolah gubenemen di Yogyakarta, mendirikan HIS di Yogyakarta dan Batavia, mendirikan sekolah pendidikan guru, mendirikan sekolah yang bersifat agama yang hampir menyerupai sekolah di Minangkabau yang dimaksudkan untuk mengganti dan memperbaiki pengajian Al Qur’an yang tradisional (Steenbrink, 1994: 54-56). Tahun 1925, Muhammadiyah mempunyai delapan *HIS*, sebuah sekolah guru di Jogjakarta, tiga puluh dua buah sekolah dasar lima tahun, sebuah *Schakel School*, dan empat belas buah madrasah.

### **5.3 Kurikulum pendidikan Muhammadiyah**

Pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia Muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniawian, serta berjuan untuk kemajuan masyarakat. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sistem Belanda. Disatu sisi pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang shalih dan mendalami ilmu agama, sebaliknya pendidikan model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang didalamnya tidak diajarkan agama sama sekali yang mengarah kepada perjangkalan terhadap agama (Ridjaluddin, 2011:172). Melihat ketimpangan tersebut K. H. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh: menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual serta dunia dan akhirat, kedua hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berangkat dari tujuan tersebut K.H.Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan meliputi:

- a) pendidikan moral , ahlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah
- b) pendidikan individu yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek serta antara dunia dan akhirat
- c) pendidikan kemasyarakatan yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat (Sutarno,2005:33).

K. H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah belum memiliki konsep kurikulum yang baku. Sejalan dengan ide pembaharuan K. H.Ahmad Dahlan menekankan pada pendidikan akal. Menurut K.H. Ahmad Dahlan akal merupakan instrumen penting untuk memahami dan mendalami agama, karena akal merupakan sumber pengetahuan. Pendidikan Muhammadiyah diharapkan mampu membebaskan umat Islam dari kebekuan dalam segala bidang kehidupan dan praktek-praktek agama yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam.

Aspek kurikulum dari pendidikan Muhammadiyah lebih menekankan terhadap usaha modernisasi dan pembaharuan dalam pendidikan. Pengembangan kurikulum yang dilakukan Muhammadiyah melalui dua jalan yaitu:

- 1) mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan pendidikan agama didalamnya
- 2) mendirikan madrasah-madrasah yang juga diberi pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan umum (Kamal, 1976:38).

Tujuan pendidikan lebih difokuskan pada pembentukan ahlak manusia. Penyelenggaraan pendidikan menurut K.H.Ahmad Dahlan hendaknya didasarkan pada landasan yang kokoh yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Landasan ini merupakan landasan yang filosofis dalam merumuskan konsep dan tujuan yang ideal dalam pendidikan Islam baik secara vertikal untuk ketaqwaan terhadap Alloh dan horizontal untuk perbuatan terhadap manusia.

Pendidikan Muhammadiyah mengupayakan agar bisa keluar dari kultur pendidikan model pesantren. Pendidikan Muhammadiyah mengadopsi pendidikan barat yang bersifat intelektualitas, rasional, elit selama tidak menentang ajaran Islam. Pendidikan Muhammadiyah memberikan bahan pelajaran berupa ilmu

pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan tentang agama Islam sebagai bahan pelajaran pokok yang diajarkan bersama-sama. Adanya perpaduan tersebut didirikan berbagai macam pendidikan yang bertujuan membentuk “ulama yang intelek dan intelek yang ulama”, artinya seorang yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut maka materi pendidikan menurut K. H. Ahmad Dahlan adalah pengajaran Al Qur’an dan Hadits, membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. Ilmu Al Qur’an dan Hadits meliputi: ibadah, persamaan derajat, fungsi perbuatan manusia dalam menentukan nasibnya, musyawarah, pembuktian kebenaran Al Qur’an, dan Hadits menurut akal, kerjasama antara agama-kebudayaan-kemajuan peradaban, hukum kausalitas perubahan, nafsu dan kehendak, demokratisasi dan liberalisasi, kemerdekaan berpikir, dinamika kehidupan dan peranan manusia didalamnya dan ahlak (budi pekerti). Komponen mata pelajaran pada sekolah Muhammadiyah dapat dilihat pada tabel 5.1.

Gambar 5.1 Komponen mata pelajaran dalam sekolah Muhammadiyah tahun 1923 rencana pengajaran Kweekschool Muhammadiyah Yogyakarta

No	Mata Pelajaran	KI 1	KI 2	KI 3	KI 4	KI 5	Jumlah
A	Agama:						
1	Tauhid	1	2	1	2	2	8
2	Al- Qur’an	(6)	(5)	(3)	(3)	(3)	(20)
	a. Hafalan	2	2	-	-	-	4
	b. Membaca	2	-	-	-	-	2
	c. Tajwid	-	-	-	-	1	1
	d. Terjemah	2	3	3	-	-	8
	e. Tafsir	-	-	-	3	2	5
3	Hadits / Musthalah	2/-	2/-	2/-	2/1	2/1	10/2
4	Fiqh / Usul	2/-	2/-	2/-	2/1	2/1	10/2
5	Tarikh	1	1	1	1	1	5
B	Umum						
6	Bahasa Arab	(9)	(6)	(6)	(4)	(5)	(30)
	a. Muthala’ah	3	2	3	2	3	14
	b. Imlak	2	-	-	-	-	2
	c. Nahu/Sharaf	2	2	2	2	2	10
	d. Chat	2	1	1	-	-	4
7	Bahasa Indonesia	4	4	4	3	3	18
8	Bahasa Inggris	4	3	3	4	4	17

No	Mata Pelajaran	KI 1	KI 2	KI 3	KI 4	KI 5	Jumlah
9	Ilmu Pasti	(3)	(4)	(5)	(2)	(2)	(16)
	a. Aljabar	2	2	2	2	2	10
	b. Ilmu Ukur	1	2	3	-	-	6
10	Berhitung/I. Hitung	2/-	1/-	1/-	1/-	-/1	5/1
11	Hitung Dagang	-	-	1	1	-	2
12	Peng. Dagang	-	-	1	1	-	2
13	Ilmu Alam	-	2	2	2	-	6
14	Ilmu Hajat/Hegien	-	2	2	2	-	6
15	Ilmu Bumi	(2)	(2)	(1)	(2)	(3)	(10)
	a. Peng. Peta	2	2	1	1	-	6
	b. Alam/Pasti	-	-	-	1	1/1	2/1
	c. Ekonomi	1	-	-	-	1	1
16	Sejarah Indonesia/Umum	1	2	2	2	2	9
17	Tata Negara	-	-	-	1	1	2
18	Menulis Latin	1	1	-	-	-	2
19	Menggambar	1	1	1	-	1	4
20	Seni Suara	1	1	1	1	1	5
21	Pendidikan Jasmani	1	2	2	2	2	9
22	Ilmu Guru	(-)	(-)	(-)	(3)	(6)	(9)
	a. Ilmu Mendidik	-	-	-	2	4	6
	b. Ilmu Jiwa	-	-	-	1	2	3
23	Ekonomi/ Etnologi	-	-	-	1/1	1/1	2/2
24	Filsafat	-	-	-	1	1	2
25	Kemuhammadiyah	-	-	1	1	1	3
26	Kepanduan	-	-	-	2	2	4
	Jumlah	42	43	42	44	47	218

Sumber: (Mulkhan, 1990:38-39)

Tujuan pendidikan Muhammadiyah pada awalnya nampak dari ucapan K.H. Ahamad Dahlan “dadiyo kyai sing kemajuan, lan ora kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah”, artinya jadilah kyai atau ulama yang berkemajuan dan jangan kenal lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. K.H.

Ahmad Dahlan ingin membentuk manusia Muslim yang : (1) baik budi alim dalam agama; (2) luas pandangannya alim dalam ilmu umum; (3) bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat (Darban, 1986: 126). Pandangan muhammadiyah tentang pendidikan menyangkut pola metode pendidikan dan pengajaran baru. Dengan mendirikan sekolah baru yang berbeda dengan sistem pondok pesantren dan berbeda pula dengan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Muatan kurikulum dalam sekolah Muhammadiyah lebih memberikan muatan yang besar kepada ilmu-ilmu umum. Sistem pendidikan Muhammadiyah berlandaskan agama atau bersifat umum, tetapi kedua-duanya berdasarkan cita-cita K. H. Ahmad Dahlan yang hendak mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Sekolah-sekolah itu bertujuan untuk membentuk:

- a) manusia Muslim
- b) manusia yang cakap
- c) manusia yang berahlak mulia
- d) manusia yang berguna bagi masyarakat
- e) manusia yang percaya pada diri sendiri.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah adalah gabungan yang menghasilkan teknik pendidikan baru dengan enam pokok penting yang menyangkut *Didaktik-metodik* dan *Policy Pengajaran* yang terdiri dari enam pokok; 1) cara mengajar dan cara belajar, 2) bahan-bahan pelajaran, 3) rencana pelajaran, 4) pendidikan diluar waktu belajar, 5) pengasuh / guru, 6) hubungan guru dengan murid (Wijoyosukarto, 1996: 120).

a. Cara mengajar dan cara belajar

Pendidikan tradisional (pesantren lama) terdapat dua cara mengajar yaitu dengan sistem *sorogan* dan *weton*. Sistem *sorogan*, murid yang ingin belajar seorang demi seorang menghadap guru (Wijoyosukarto, 1996: 42). Sistem *sorogan* guru aktif memperhatikan kemajuan belajar muridnya, apabila pelajaran lampau belum difahami oleh murid maka guru belum menambahkan dengan pelajaran baru. Berbeda dengan sistem *weton* yang tiap kali pelajaran selalu dengan bab baru (Junus, 1960: 48). Guru tidak memperhatikan apakah murid sudah faham atau belum dengan pelajaran yang lampau. Santri yang ingin

menanyakan pelajaran biasanya bertanya kepada pembantu kyai. Tempat belajar biasanya di serambi masjid.

Pendidikan Muhammadiyah memakai sistem klasikal (berjenjang) (Junus, 1960:50). Sistem klasikal adalah cara belajar dalam satu ruang kelas dari murid-murid yang sebaya dan memiliki tingkat pengetahuan yang seajar, diajar dengan guru yang sama dan pelajaran yang sama. Guru dalam sistem klasikal wajib memperhatikan kemajuan tiap-tiap murid secara perorangan. Kemajuan murid dapat diketahui dengan memberikan ulangan pada waktu tertentu. Ruang belajar menggunakan ruang kelas yang dilengkapi meja dan bangku untuk belajar ditambah papan tulis. Pembelajaran sudah menggunakan peraturan yang tegas.

b. Bahan-bahan pelajaran

Bahan belajar dalam pendidikan tradisional hanya mata pelajaran agama dan berhubungan dengan alat untuk mempelajari agama (Wijoyosukarto, 1996: 122). Bahan belajar selain Al Qur'an dan hadis, juga dipelajari kitab-kitab karangan ulama kuno. Format pembaharuan pendidikan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tercermin dari ide dasar yang merupakan cita-cita penyelenggaraan pendidikan seperti yang diinginkan K. H. Ahmad Dahlan yaitu untuk membentuk cendekiawan alim yang intelek dan intelek alim. Pendidikan Muhammadiyah, bahan pelajaran pokok tetap agama dan alat-alat untuk mempelajari ilmu agama, tetapi pengetahuan umum sudah diberikan. Ilmu pengetahuan umum yang diberikan diantaranya: ilmu hitung, ilmu sejarah, menggambar, bahasa Melayu, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris.

c. Rencana pelajaran

Pendidikan tradisional, rencana pelajaran yang secara teratur belum ada. Rencana pelajaran ditetapkan oleh masing-masing kitab yang ditentukan oleh masing-masing guru yang mengajar. Kenaikan tingkat diukur dengan banyaknya kitab yang telah dipelajari. Lama atau singkatnya belajar dipesantren belum menjadi ukuran kepandaian seorang santri.

Pendidikan Muhammadiyah, rencana belajar secara teratur sudah ada. Lama belajar harus diselesaikan oleh masing-masing murid dari ketentuan

selama jenjang pendidikan yang ditempuh. Tiap tingkat dicapai dengan ujian kenaikan kelas, ijazah diberikan kepada yang lulus ujian tingkat terakhir. Wajib hadir bagi pelajar dikontrol dengan absensi.

d. Pendidikan diluar waktu belajar

Ciri dari pendidikan tradisional adalah serba bebas, tidak terdapat sangsi bagi murid yang ingin meninggalkan pesantren. Salah satu batas terhadap kebebasan santri adalah tradisi pesantren itu sendiri. Keluarga pelajar pondok diketuai oleh lurah pondok yang ditunjuk oleh kyai. Lurah pondok bertugas mencatat keluar masuknya santri dan menjaga keamanan. Pendidikan Muhammadiyah pendidikan diluar jam belajar diselenggarakan dalam asrama yang dipimpin secara teratur. Pengabungan antara pondok-pondok Muhammadiyah direalisasikan dengan dibentuk Madrasah Mu'alimin.

e. Pengasuh atau guru

Pendidikan tradisional guru atau pengasuh ialah kyai dan pembantu kyai yang sudah lanjut pelajarannya. Pesantren dipimpin oleh kyai yang mendirikan pondok, sehingga pimpinan pondok diwarisi secara turun temurun seperti halnya kerajaan. Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi pembaharuan Islam yang modern maka didalam Muhammadiyah selalu berusaha melakukan pembaharuan kearah yang lebih baik tetapi tidak melupakan atau menyimpang dari Al Qur'an dan Al Hadits. Sekolah Muhammadiyah diperlukan guru yang memiliki pemikiran pembaharuan, sehingga bisa sejalan dengan asas dan tujuan pendidikan Muhammadiyah. Guru-guru Muhammadiyah terdiri dari kyai-kyai yang alim intelektual dan priyayi yang intelektual alim yang mengikuti paham pembaharuan. Perguruan dinaungi oleh sebuah organisasi yang memberikan pemikiran baru terhadap pendidikan yaitu organisasi Muhammadiyah.

f. Hubungan guru dengan murid

Pendidikan tradisional, guru dipandang sebagai seseorang yang keramat. Hubungan guru dengan murid bersifat otoriter dan kurang demokratis. Pendidikan Muhammadiyah, paham terhadap kekeramatan seseorang dibantah keras, karena pendewaan terhadap manusia tidak ada dalam agama. Penghormatan terhadap guru atau orang yang lebih tua adalah suatu kewajiban agama yang harus

dilakukan secara wajar, artinya menghormati bukan karena kekeramatannya. Hubungan guru dengan murid bersifat demokratis, murid bebas bertanya kepada guru kapan saja diizinkan. Hubungan guru dengan murid menjadi akrab, bebas dan demokratis.

Muhammadiyah memiliki cara pendidikan sendiri yang berbeda sistem pendidikan Islam pada umumnya. Pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah merupakan suatu model pembaharuan yang bersifat sintesis antara unsur-unsur lama dan unsur-unsur baru yang datang dari Barat. Unsur baru tetap dipertahankan, agamanya dan pelajaran agama sebagai dasar pendidikannya. Unsur baru adalah teknik penyelenggaraan pengajaran yang banyak diambil dari cara-cara sekolah barat. Pendidikan Muhammadiyah sebagai terobosan untuk menghilangkan dikotomi keilmuan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum.

## **BAB 6. DAMPAK PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH BAGI PENDIDIKAN MASYARAKAT INDONESIA**

Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi yang memperhatikan masyarakat dan pendidikan. Muhammadiyah sering disebut gerakan pembaharu sosio-religius, karena Muhammadiyah telah banyak berperan penting dalam perubahan kehidupan sosial keagamaan di Indonesia sejak awal berdirinya . organisasi Muhammadiyah sejak awal berdirinya, menjadikan masyarakat bagian terpenting yang harus diutamakan. Organisasi Muhammadiyah terus mencapai maksud dan tujuan yang telah dicita-citakan. Masyarakat banyak yang percaya, organisasi Muhammadiyah merupakan warisan pemikiran dan kerja nyata dari K.H. Ahmad Dahlan. K.H.Ahmad Dahlan tidak banyak menuliskan pemikirannya, hal ini sangat disayangkan oleh banyak orang terutama anggota organisasi Muhammadiyah sendiri. K.H.Ahmad Dahlan pernah memaparkan apa yang dipikirkan dan dicita-citakan, salah satu tulisan K.H.Ahmad Dahlan adalah Tali Pengikat Hidup (lihat lampiran G halaman 85). K.H.Ahmad memaparkan sebab-sebab kemunduran Islam yang ia lihat. K.H.Ahmad Dahlan dalam tulisan lain mengajukan prasaran dalam kongres Islam di Cirebon pada tahun 1923( lihat lampiran H halaman 89 ) ( Mujahid, 2013:204). K.H.Ahmad Dahlan dalam kongres mengemukakan pandangannya tentang model pendidikan bagi umat Islam, terutama materi yang harus disiapkan oleh para pendidik dan pengajar.

Bidang pendidikan Muhammadiyah memadukan antara pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan Barat yang dibawa oleh penjajah. Muhammadiyah merasa pendidikan yang dilakukan oleh pribumi masih kolot dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga Muhammadiyah melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan. Pembaharuan dalam sistem pendidikan terbukti dengan berdirinya madrasah diniyah untuk mengganti dan memperbaiki pengajian Al Qur'an yang tradisional. Pendidikan Madrasah Diniyah memadukan pendidikan agama dengan sains. Hal ini dilakukan guna memperbaiki pola pikir yang ada pada umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pembaharuan pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah awalnya mendapat pertentangan dari masyarakat. K. H. Ahmad Dahlan sebagai tokoh pembaharu pendidikan Muhammadiyah dianggap kafir oleh masyarakat sekitar, karena mengubah sistem pendidikan yang sudah menjadi tradisi. Tradisi yang masih berlaku adalah sisa-sisa kepercayaan animisme yang belum luntur dari adat istiadat. Masyarakat masih memegang adat kebiasaan yang telah diterima terlebih dahulu, baik dari sudut keyakinan maupun amal perbuatan dan apabila ada yang merubah masyarakat akan menentang (Hajid, 2008; 17). Penentangan itu dilakukan masyarakat karena masyarakat tidak mau menerima hal-hal baru dan berbeda dengan apa yang sudah dijalani selama ini. Masyarakat menganggap pembaharuan yang ada akan mendatangkan kesusahan, walaupun jelas dan nyata pembaharuan yang ada demi kebaikan masyarakat.

Organisasi Muhammadiyah telah mengadakan pembaharuan pendidikan agama dengan modernisasi sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan pendidikan yang ada pada Organisasi Muhammadiyah telah mengalami kemajuan yang luar biasa, karena banyak sekolah-sekolah yang telah didirikan. Sekolah-sekolah telah memberi dampak dan pengaruh yang baik bagi perkembangan umat Islam. Cara pandang pendidikan Muhammadiyah yang berhaluan antara perpaduan keislaman dan kemoderenan, berdampak sangat luas kepada peserta didik dan masyarakat pada umumnya.

Muhammadiyah dalam membangun budaya baru ditengah paradigma tradisionalisme dengan strategi tabligh. Budaya tabligh yang diubah Muhammadiyah adalah kecenderungan umum para ulama yang memiliki tradisi *oral* (lisan) dalam menyampaikan dakwah (Soeratno, 2009: vii). Hasil dari pembaharuan pendidikan Muhammadiyah, mengubah tradisi lisan menjadi budaya tulis menulis. Langkah perubahan ini dapat dilihat melalui usaha Muhammadiyah dalam mendirikan majalah berbahasa Jawa, *Suvara Muhammadiyah*. Majalah ini didirikan pada tahun 1915, selang tiga tahun berdirinya Muhammadiyah.

Muhammadiyah, berdasarkan pengetahuan ilmu hisab yang dimiliki K. H. Ahmad Dahlan melakukan perhitungan awal puasa dan hari lebaran. K. H. Ahmad Dahlan dengan pengetahuan ilmu falak dan hisab mengadakan perubahan

dalam bidang penentuan awal bulan Qomariyah. Diperkirakan hal ini yang menyebabkan Muhammadiyah hingga kini terkadang berbeda dengan umat Islam lainnya, dalam penentuan awal puasa dan idul fitri dikarenakan ilmu hisab yang diwarisi dari K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah juga memelopori shalat Idul Fitri di lapangan terbuka.

Corak pemikiran masyarakat yang tradisional mulai terbuka, dengan adanya pembaharuan bagi masyarakat pribumi dari pendidikan Muhammadiyah. Pembatasan sekolah umum Belanda tidak menyurutkan semangat sebagian kalangan masyarakat untuk tetap sekolah di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah memberi kesempatan dikalangan pribumi untuk sekolah semakin besar. Sekolah Muhammadiyah terus berkembang hingga pelosok Indonesia dari zaman ke zaman.

Muhammadiyah beranggapan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam membangun peradaban bangsa. Organisasi Muhammadiyah melakukan modernisasi dalam bidang pendidikan Islam, dari sistem pondok yang selalu diajar dengan sistem perseorangan menjadi sistem kelas dan ditambah dengan pelajaran pengetahuan umum. Salah satu warisan model pembaharuan pendidikan Muhammadiyah adalah integralistik. Model pendidikan integralistik merupakan model pembelajaran yang mampu melahirkan muslim ulama intelek (Kutoyo, 1998: 202).

Model pendidikan integralistik yang dipakai Muhammadiyah yaitu pendidikan yang menintegrasikan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum pada jenis dan tingkatan sekolah. Model pendidikan integralistik tetap berkembang hingga saat ini, dan pendidikan integralistik selalu dieksplorasi sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Pendidikan integralistik yang dikembangkan oleh pendidikan Muhammadiyah, digunakan pula oleh pemerintah yang diterapkan pada semua jenis dan tingkat sekolah. Sistem pendidikan integralistik masih dipakai hingga saat ini dimana pendidikan umum dan agama diajarkan dalam satu sekolah.

Pendidikan Muhammadiyah selain menggunakan model pembelajaran integralistik, juga mengembangkan pendidikan konstektual melalui proses

penyadaran (Nugroho, 2010: 138). Metode konstektual merupakan pengembangan pendidikan yang memiliki konsep pendidikan yang berelevansi dengan lingkungan kehidupan. Konsep ini melahirkan prinsip ilmu amaliah dan amal ilmiah. Implementasi pendidikan konstektual yang dilakukan yaitu mencoba mengkolaborasikan ayat-ayat Alqur'an dengan langsung mempraktikkan dalam alam nyata dari hasil pemahaman dari sebuah ayat.

Praktik amal nyata yang dilakukan K.H.Ahmad Dahlan yaitu ketika menjelaskan surat Al Ma'un kepada santri-santrinya sampai menyadari bahwa isi dari surat Al Ma'un menolong fakir miskin dan menyantuni anak yatim. Dibuktikan dengan terealisasinya rumah-rumah yatim yang menampung fakir miskin, pendirian rumah yang menampung anak yatim yang hingga saat ini masih berkembang. Semua metode pembelajaran yang digunakan Muhammadiyah telah mencetak murid-murid yang kompeten. Terbukti murid-murid tamatan sekolah Muhammadiyah kebanyakan menjadi pelopor dan ranting Muhammadiyah didaerahnya masing-masing. Hal ini dikarenakan ciri perguruan Muhammadiyah bukan sekedar mengajarkan ilmu- ilmu umum saja tetapi juga mengajarkan pendidikan watak dan penghayatan Islam yang murni.

Usaha Muhammadiyah untuk memperbarui masyarakat Indonesia selain melalui sistem pendidikan , juga diperjuangkan lewat seruan mengajak kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad (Bashri & Suffatni, 2004: 348). Jalan ijtihad yang dimaksud adalah memurnikan ajaran Islam dari khufarat, bid'ah, dan tahayul yang telah bercampur dalam akidah dan ibadah umat Islam. K.H.Ahmad Dahlan dalam hal ini mengkritik penggunaan kitab yang dikarang pada zaman kemunduran Islam, karena kitab yang berisi pertentangan pendapat mempengaruhi timbulnya perpecahan umat Islam. Muhammadiyah menganjurkan supaya mempelajari kitab-kitab yang ditulis sebelum timbulnya mazhab-mazhab dikalangan umat Islam, agar mengetahui bahwa pengarangnya menyandarkan pendapat-pendapatnya langsung kepada Al Qur'an dan Sunnah.

Pembaruan yang dilakukan Muhamamdiyah meliputi dua segi yaitu segi cita-cita dan segi teknik pengajaran. Segi cita-cita ingin dibentuk manusia muslim yang baik budi alim dalam agama, luas dalam pandangan dan mengerti ilmu

keduniaan serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Segi pengajaran mengambil unsur-unsur baik dari sistem pendidikan Barat dan sistem pendidikan tradisional, sehingga Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri (Mulkan, 1990: 120). Dibuktikan dengan menerapkan sekolah model Barat, tetapi dimasukkan pelajaran agama didalamnya. Sekolah agama dimasukkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Cara penyelenggaraannya proses belajar mengajar tidak dilaksanakan di masjid atau langgar, tetapi di gedung khusus yang dilengkapi meja kursi dan papan tulis yang sampai saat ini tetap digunakan di berbagai tingkat dan jenis sekolah, baik sekolah yang didirikan pemerintah atau sekolah dibawah naungan agama dan Muhammadiyah.

Pendidikan Muhammadiyah juga memberikan ruang yang luas bagi kaum perempuan, agar kaum perempuan tidak selalu tergantung pada kaum laki-laki. Muhammadiyah mendorong kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang sama, baik di sekolah agama atau madrasah maupun di sekolah umum (Mujahid, 2013:174). Langkah pertama yang dilakukan Muhammadiyah untuk kaum perempuan, mengirim tiga perempuan dari kaum untuk bersekolah di Neutraal Meisjes School, sebuah sekolah umum khusus perempuan di Ngupasan. Tahun 1914 didirikanlah sebuah perkumpulan untuk remaja-remaja putri yang bernama Sopo Tresno, yang nantinya membantu kegiatan Muhammadiyah.

Perjalanan sejarah pendidikan Muhammadiyah memiliki sifat terbuka terhadap perkembangan dunia pendidikan diluar lingkungannya. Pendidikan Muhammadiyah berusaha bersaing dengan sistem pendidikan yang lebih maju tanpa meninggalkan nilai –nilai Islami. Pendidikan Muhammadiyah mengalami transformasi dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadits. Hal ini disebabkan pendidikan Muhammadiyah selalu merespon setiap perkembangan zaman.

Muhammadiyah memiliki sistem pendidikan tersendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan Islam pada umumnya. Sekolah Muhammadiyah memiliki sistem pendidikan dan pengajaran yang berpolakan sistem sekolah

negeri yang bertujuan untuk mengorganisasikan sistem pendidikan swasta yang sejajar dengan sistem pendidikan nasional. Pendidikan Muhammadiyah dalam mendirikan sekolah disesuaikan dengan Survey pangsa pasar. Pendirian sekolah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan yang ada dalam masyarakat. Contoh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai tren maka Muhammadiyah mendirikan SMK Muhammadiyah di berbagai tempat.

Pendidikan Muhammadiyah dalam perkembangannya telah melahirkan golongan modernis yang melakukan pembaharuan secara revolusioner dengan meninggalkan jejak *al-salaf al-salihun*, ketika dihadapkan pada tuntutan-tuntutan modernitas yang sesuai dengan kemajuan zaman (Sarwono, 2013:16). Pendidikan Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk keluar dari jaringan pemikiran tradisional melalui pemahaman kembali terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan penjelasan yang dapat diterima *rasio*. Ide-ide pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah ingin merubah pemikiran masyarakat Islam yang tradisional menuju masyarakat Islam yang dinamis, cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis tajam dalam memetakan dinamika kehidupan dimasa depan. Tokoh modernis yang lahir akibat pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah antara lain K.H. Abdul Razzaq Fachruddin, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) dan M. Rasjidi.

#### **a. K.H.Abdul Razzaq Fachruddin**

K. H. Abdul Razzaq Fachruddin adalah pemegang rekor kepemimpinan Muhammadiyah paling lama yaitu 22 tahun (1968-1990) (PP. Muhammadiyah, 2000: 26). K.H.Abdul Razzaq Fachruddin dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1916. K.H.A.R. Fachruddin dari kecil sudah berkecimpung di Muhammadiyah. Tahun 1923 A.R. Fachruddin memasuki sekolah formal *Standaard School* Muhammadiyah Bausasran, kecamatan Danurejan Yogyakarta. Aktivitas sosial keagamaan A.R. Fachruddin banyak dilakukan di Muhammadiyah.

Tahun 1933 A.R.Fachruddin dikirim oleh Hoof Bestuur Muhammadiyah ke Palembang sebagai guru sekolah dasar Muhammadiyah cabang Talangbalai, Tanjung Raja (Ogan Komering Ilir). A.R. Fachruddin di Palembang mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah dan mendirikan sekolah Wustha Mualimmin Muhammadiyah setingkat SMP. Tahun 1941 A.R.Fachruddin

pindah ke kantor Muhammadiyah Sungai Batang Sungai Gerong (Palembang) sebagai pengajar HIS Muhammadiyah. A.R. Fachruddin selain mengajar juga melanjutkan misinya untuk mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah.

Tanggal 14 Februari 1942, Jepang menyerbu pabrik minyak Sungai Gerong, dengan sendirinya sekolah tempat mengajarnya ditutup dan dipindahkan mengajar di sekolah Muhammadiyah Muara Maranjat, Tanjung Raja, Palembang. Tahun 1944 A.R. Fachruddin memimpin Muhammadiyah daerah Palembang, selanjutnya pindah ke Kulonprogo dan menjadi guru di Madrasah Darul Ulum Muhammadiyah Wanapati. Waktu Indonesia Merdeka pada tanggal 14 Agustus A.R. Fachruddin ikut bergerak pada Barisan Keamanan Rakyat (BKR) (Sucipto, H. & Ramly, 2005: 180). Tahun 1949 A.R. Fachruddin menjadi pejabat Penghulu (Kepala Kantor Urusan Agama) di Adikarto, Wates, dan ikut serta bergerilya melawan Belanda.

A.R. Fachruddin selama sembilan tahun menjadi pegawai agama propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkantor di Kepatihan dari tahun 1950-1959. Tahun 1959 menjabat sebagai kepala kantor Penerangan Agama Propinsi Jawa Tengah, dan merangkap menjadi dosen Islamologi luar biasa di Universitas Sultan Agung, FKIP Universitas Diponegoro dan Sekolah Tinggi Olahraga di Semarang (Sucipto, H. & Ramly, 2005: 302). A.R. Fachrudin dalam organisasi Muhammadiyah menjabat ketua daerah Kota madya Yogyakarta (1950-1951), ketua wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (1952-1953), dan menjadi pembantu PP Muhammadiyah. Pembantu PP Muhammadiyah A.R. Fachrudin pernah ditunjuk mewakili PP Muhammadiyah dalam acara Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Propinsi Aceh tahun 1953.

Tahun 1968 A.R. Fachruddin terpilih menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah setelah di *Fait Accomply* untuk menjadi pejabat PP Muhammadiyah. Sidang tanwir di Ponorogo pada tahun 1969 A.R. Fachruddin dikukuhkan sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah sampai Muktamar ke 38 di Ujung Pandang Sulawesi Selatan pada tahun 1971. Sejak saat itulah A.R. Fachruddin terpilih secara berturut-turut dalam tiga kali Muktamar Muhammadiyah untuk periode 1971-1974, 1974-1978, 1978-1985 (PP

Muhammadiyah, 2000: 26). A.R.Fachruddin berkali-kali ditawari untuk menjadi anggota DPR, karena khawatir tersita waktunya untuk Muhammadiyah yang dipercayakan kepada beliau, A.R. Fachruddin menolak tawaran tersebut.

A.R. Fachruddin sebagai seorang Muslim juga berkecimpung dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. A.R. Fachruddin sebagai ketua PP Muhammadiyah memberikan contoh teladan yang baik bagi anggotanya. A.R.Fachruddin dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin beliau selalu menempuh cara kologial yaitu Musyawarah dalam segala tindakan yang akan ditempuh Organisasi, sekalipun dalam hal yang kecil. Prinsip-prinsip musyawarah benar-benar dilaksanakannya, sehingga setiap anggota ikut bertanggung jawab terhadap suatu keputusan bersama. Tahun 1975 A.R.Fachruddin dipercaya berdakwah (kuliah subuh) di Stasiun TVRI Yogyakarta, meskipun waktunya 20 menit.

**b. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)(1908-1981)**

Haji Karim Malik Amrullah adalah seorang tokoh yang penting pada perkembangan Muhammadiyah. Hamka dilahirkan di kampung Molek Sumantera Barat pada 16 April 1908 (Sucipto, H. & Ramly, 2005: 145). Hamka adalah seorang pembaharu Islam di Indonesia, sejak ayahnya (Haji Rasul) mempelopori “Islam Kaum Muda Minangkabau” Hamka sudah terbiasa dengan pembicaraan keilmuan dari kecil. Tahun 1925 Hamka merantau ke pulau Jawa dan berkenalan dengan tokoh-tokoh besar yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, dan K.H.A.R. Fachruddin yang mengadakan kursus pergerakan di Gedung Abdi Darmo di Pakulaman, Yogyakarta. Hamka kemudian ke Pekalongan untuk menemui kakak iparnya, AR. Sutan Mansur yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Muhammadiyah Cabang Pekalongan.

Tahun 1925 Hamka sudah mampu mendirikan sebuah Tabligh Muhammadiyah. Tahun 1928 Hamka sebagai anggota konggres Muhammadiyah di Solo dan turut membangun Muhammadiyah di Padang Pajang, kemudian Hamka dipercaya memegang jabatan sebagai ketua Taman Pustaka, Ketua Majelis Tabligh dan sampai akhirnya memangku jabatan sebagai Ketua Muhammadiyah di Sumantra Tengah (Sucipto,H. & Ramly, 2005: 140-142). Tahun 1930 Hamka

di utus oleh Muhammadiyah Cabang Padang panjang untuk mendirikan Muhammadiyah di Bengkalis dan menghadiri kongres Muhammadiyah ke-19 di Yogyakarta. Akhir tahun 1930 Hamka diutus oleh pengurus besar Muhammadiyah di Yogyakarta untuk pergi ke Makassar menjadi Mubaligh Muhammadiyah, beliau diutus untuk menggerakkan semangat menyambut Kongres Muhammadiyah ke 21 di Makassar yang akan diadakan pada bulan mei 1932.

Pandangan Hamka dalam pendidikan adalah untuk membentuk watak atau pribadi manusia, supaya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, oleh karena itu pendidikan modern tidak bisa meninggalkan agama (Suwito, 2003: 388). Kecerdasan otak tidak menjamin keselamatan, jika nilai rohani keagamaan tidak dijadikan dasarnya. Menurut Hamka pembangunan budi, ahlak, watak dan kepribadian tidaklah berhasil kalau hanya semata-mata menurut filsafat. Pendidikan harus didasarkan pada kepercayaan, bahwa diatas dari kekuasaan manusia ada lagi kekuasaan Maha Besar, itulah Tuhan. Hakekat agama dalam hal ini ditekankan pada aspek adab dan budi pekerti, pengertian tentang hidup, percaya akan kekuasaan Transenden yang meliputi kekuasaan atas manusia.

Hamka dalam sejarah kehidupannya berperan sebagai patriot pada masa Pra dan awal kemerdekaan Indonesia, berdiri pada barisan paling depan untuk pembendungan pengaruh komunis pada zaman orde lama dan tampil sebagai figur ulama-demokrat pada masa orde baru (Nasution dalam Tamar, 1984: 286-287). Hamka pada zaman pergerakan merupakan salah satu singa podium karena ia fasih berbicara dan lancar menulis dengan mengutamakan rajin menimba ilmu. Hamka karena kepiawaiannya dalam menulis pernah memimpin sebuah redaksi dwi mingguan “ Panji Masyarakat di Medan (Noer, 2001: 72). Hamka pernah menjadi tenaga pengajar di beberapa Universitas diantaranya Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, Universitas Islam Jakarta, Fakultas Hukum dan Falsafah Muhammadiyah di Padang Panjang, Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, dan Universitas Islam Sumantera Utara (UISU) di Medan.

### c. M. Rasjidi (1915-2001)

M. Rasjidi dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1915. M. Rasjidi menempuh pendidikan disekolah Muhammadiyah kota Gede. Rasjidi setelah tamat dari sekolah Muhammadiyah Kotagede, ia melanjutkan di Kweekschool Muhammadiyah di Ngabean. Kepala sekolah di Kweekschool pada saat itu adalah Raden Ngabehi Djojogugito (Suwito, 2003: 391). Rasjidi karena kepandaiannya dalam jangka 6 bulan sudah ditempatkan dikelas empat, sebab sudah mampu membaca kitab-kitab yang cukup berat dan berbobot diantaranya kitab gramatika bahasa Arab, dan menghafal buku logika Aristoteles berjudul *Matan as Salam*.

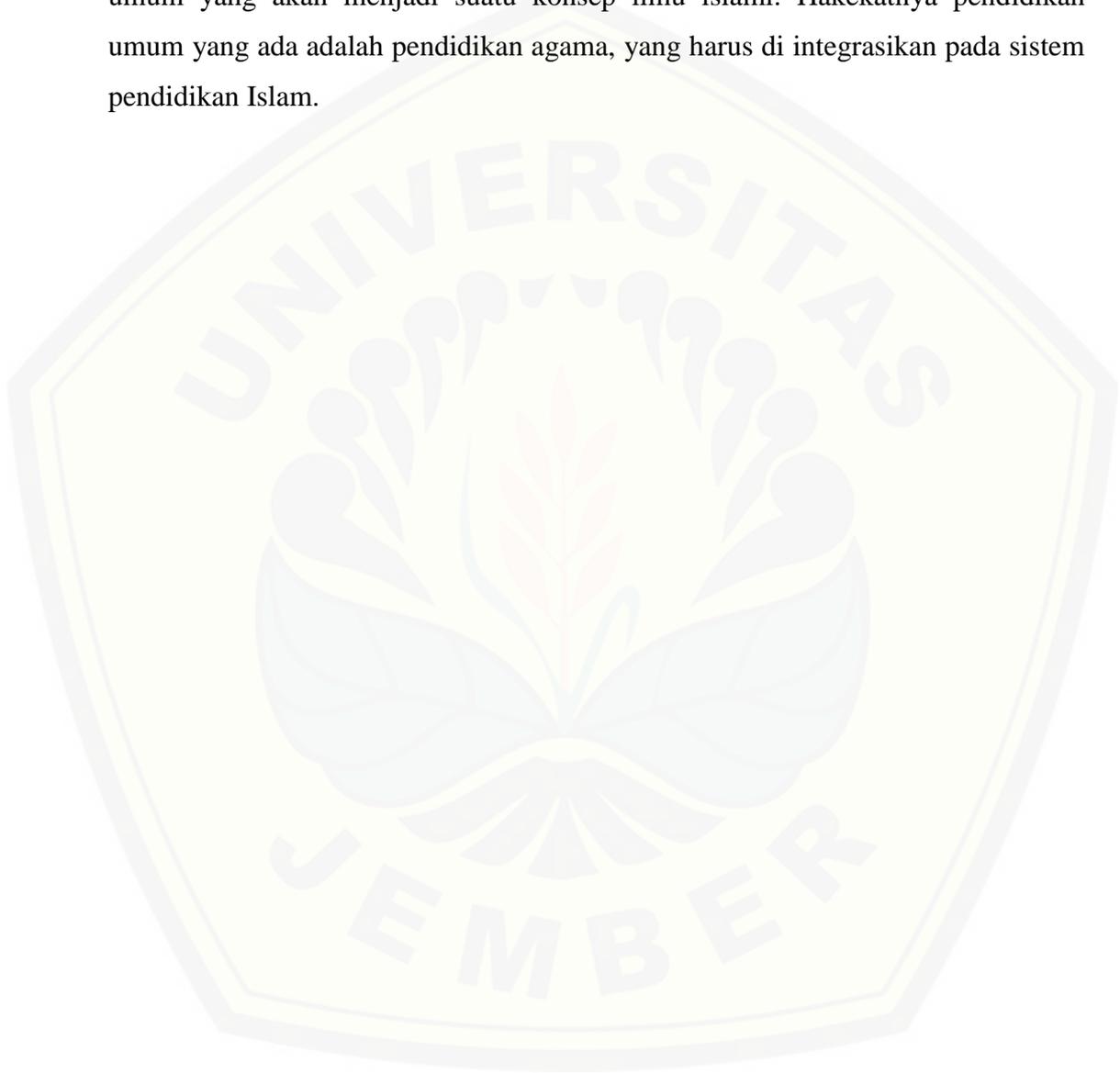
M. Rasjidi sering dijuluki sebagai pahlawan kebangkitan intelektual Islam Indonesia. Pemikiran M. Rasjidi meliputi bidang: filsafat, teologi, etika, fiqh dan tafsir (Suwito, 2003: 390). Rasjidi beranggapan bahwa setiap setiap manusia harus mengembangkan akalunya, khususnya dibidang ilmu pengetahuan, akan tetapi ilmu yang dikaji harus berlandaskan dengan pengetahuan agama agar menjadi kepribadian yang sempurna dan utuh. M. Rasjidi menghendaki kurikulum terpadu di sekolah, yaitu ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Ilmu pengetahuan atau agama memiliki dua wajah yaitu sosial dan intelektual, ilmu pengetahuan telah berinteraksi dengan agama yang telah memasuki sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

M. Rasjidi dalam perkembangan pendidikan menghendaki pengembangan peningkatan pada delapan hal, yakni:

- 1) daya baca terhadap perikehidupan yang sedang dijalani
- 2) daya jawab terhadap problematika yang muncul
- 3) integritas pribadi (menghilangkan *split of personality*)
- 4) integritas wawasan (menghilangkan dikotomi pandangan)
- 5) kemampuan memelihara alam
- 6) kemampuan menjabarkan misi Islam
- 7) orientasi kosmopolit
- 8) input, sains, teknologi dan metodologi (Suwito, 2003: 394).

Persoalannya kini adalah bagaimana penyempurnaan sistem pendidikan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi segi-segi yang masih lemah

dan mengkaitkannya dengan delapan hal diatas sebagai perkiraan atas tuntutan masa depan. Hal ini dapat di pecahkan dengan pola pikir yang integratif, menyatukan arti kehidupan dunia dan akhirat. Pemikiran ini mengandaikan penemuan suatu bentuk perpaduan antara materi-materi pendidikan agama dengan umum yang akan menjadi suatu konsep ilmu islami. Hakekatnya pendidikan umum yang ada adalah pendidikan agama, yang harus di integrasikan pada sistem pendidikan Islam.



## BAB 7. PENUTUP

### 7.1 Kesimpulan

Sistem pendidikan di Indonesia menjelang berdirinya Muhammadiyah terdapat dua sistem pendidikan yaitu; sekularisme pendidikan dan tradisionalisme pendidikan Islam (Pesantren). Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan rakyat pribumi, dalam pembelajarannya hanya mengenal ilmu agama. Pendidikan tradisional berinduk pada legitimasi masyarakat, karena pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Pendidikan Barat adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, dalam pengajarannya bersifat sekuler atau tidak diberi pelajaran agama. Pendidikan Belanda yang sekuler berinduk pada legitimasi pemerintah.

Usaha atau tindakan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923 antara lain:

- a. prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah yaitu *humanis – religius*. Prinsip pelaksanaan Pendidikan Muhammadiyah yang dijalankan oleh K.H.Ahmad Dahlan disesuaikan pada prinsip yang mendasar pada Al Qur'an dan Sunnah.
- b. memadukan sistem pendidikan Barat dengan sistem pendidikan pesantren dalam pendidikan Muhammadiyah. Penyelenggaraan pengajaran Muhammadiyah mengambil unsur-unsur sistem pendidikan Barat dan sistem pendidikan tradisional. Sistem pengajaran menirukan sekolah model Barat, tetapi dalam pengajaran dimasukkan pelajaran agama.
- c. memperbaiki kurikulum pendidikan dalam pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah adalah gabungan yang menghasilkan teknik pendidikan baru dengan enam pokok penting yang menyangkut *Didaktik-metodik* dan *Policy Pengajaran* yang terdiri dari enam pokok; 1) cara mengajar dan cara belajar, 2) bahan-bahan pelajaran, 3) rencana pelajaran, 4) pendidikan diluar waktu belajar, 5) pengasuh / guru, 6) hubungan guru dengan murid.

Dampak pembaharuan pendidikan Muhammadiyah bagi pendidikan dapat kita rasakan sampai saat ini. Salah satu warisan model pembaharuan pendidikan Muhammadiyah adalah integralistik. Model pendidikan integralistik yang dipakai Muhammadiyah yaitu pendidikan yang menintegrasikan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum pada jenis dan tingkatan sekolah. pendidikan Muhammadiyah mengembangkan pendidikan konstektual melalui proses penyadaran. metode pembelajaran yang digunakan Muhammadiyah telah mencetak murid-murid yang kompeten, siswa bukan sekedar mengajarkan ilmu-ilmu umum saja tetapi juga mengajarkan pendidikan watak dan penghayatan Islam yang murni. Cara penyelenggaraannya proses belajar mengajar tidak dilaksanakan dimasjid atau langgar, tetapi dikedung khusus yang dilengkapi meja kursi dan papan tulis yang sampai saat ini tetap digunakan diberbagai tingkat dan jenis sekolah, baik sekolah yang didirikan pemerintah atau sekolah dibawah naungan agama dan Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah dalam perkembangannya telah melahirkan golongan modernis yang melakukan pembaharuan secara revolusioner dengan meninggalkan jejak *al-salaf al-salihun*, ketika dihadapkan pada tuntutan-tuntutan modernitas yang sesuai dengan kemajuan zaman. Pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah melahirkan golongan modernis Islam antara lain K.H. Abdul Razzaq Fachruddin, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) dan M. Rasjidi.

## 7.2 Saran

- 1) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sejarah mengenai usaha Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan Pendidikan di Indonesia;
- 2) bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah pendidikan Indonesia pada tahun 1912-1923.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, D. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Ali, M. 2001. "Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah (1912-1942) Melacak Akar-akar Pendidikan Modern". Tidak Diterbitkan. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anrooij, F. 2014. *Fe Koloniale Staat (Negara Kolonial) 1854-1942: Panduan Archief Van Het Ministerie van Kolonien (Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan) Kepulauan Nusantara*. Terjemahan oleh Nurhayu W. Santoso dan Susi Moeimam. Leiden: Penerbit Nationaal Archief.
- Arifin, M.T. 1987. *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ariyanti, R. 2011. "Pendidikan Muhammadiyah sebagai Strategi Pembaharuan Sosial di Surakarta 1917-1942". Tidak diterbitkan. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Aziz, M.W. 2009. "Perjuangan Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan di Surakarta Tahun 1922-1942". Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Bashri, Y. & Suffatni. 2004. *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Beker, A. 1984. *Metode- Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Baudet, H & I.J. Brugmans. 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Terjemahan: Amir Sutarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cohen, B.T. 1998. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Departemen Penerangan RI. 1962. *Makin Lama Makin Tjinta, Muhammadiyah Setengah Abad 1912-1960*. Jakarta: Deppen RI.
- Darban, A.A. 1986. *Politik Pendidikan dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam Sebuah Tinjauan Sejarah*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Djojonegoro, W. 1996. *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Djumhur & Danasuparta. 1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Cv. Ilmu Bandung.
- Gottscalk, L. 2008. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Gunawan, A.H. 1986. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hadikusumo, D. 2002. *Aliran Pembaharuan Islam*. Yogyakarta: Persatuan.
- Hamdan. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia.
- Hamka, R. 1986. *Etos, Iman, Ilmu dan Amal dalam Gerakan Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Haq, A. 1985. *Gerakan Islam di Korea dan Indonesia Pada Awal Abad Ke-20*. Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Hurgronje, S. 1993. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje jilid VII*. Jakarta: INIS.
- Junus, M. 1960. *Sedjarah Pendidikan Islam Indonesia*. Pustaka Mahmudijah.
- Kamal, M. dkk. 1976. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Persatuan.
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional (dari kolonisasi sampai Nasionalisme)*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- KBBI. 1991. *Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Cetakan Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Kutoyo, S. 1998. *Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mashuri. 1985. *Pola Pemikiran Baru dan Pengaruhnya: Perkembangan Sosial Politik Periode 1908-1928*. Jakarta: Widya Graha.
- Mujahid, A. 2013. *Sejarah Muhammadiyah Gerakan Tajdid di Indonesia*. Bandung : Toobagus Publishing.
- Mulkan, A.M. 2010. *Jejak Pembaharuan Sosial dan Kemanusiaan K.H.Ahmad Dahlan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulkan, A.M. 1990. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah: dalam Prespektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. 2014. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Niel, R. V. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Terjemahan oleh Zahara Deliar Noer. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Ningsih, R. 2012. "Peranan K.H.Ahmad Dahlan dalam Pendidikan Islam di Indonesia Tahun 1911-1923". Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Noer,D.1982. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta LP3ES.
- Noer,D. 2001. *Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Nugroho, A. 2010. *Biografi Singkat 1869-1923 K.H. Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Ar-ruz Media.
- PP Muhammadiyah.1995. *sejarah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Pustaka.
- PP Muhammadiyah. 2000. *Profil Muhammadiyah 2000*. Yogyakarta: Surya Sarana Utama.
- Ridjaluddin, H. 2011. *Muhammadiyah dalam Tinjauan Filsafat Islam*. Jakarta: Pusat Kajian Islam Universitas Muhammadiyah.
- Robbin, S. R. 1991. *Organization Theory, Structur, Design and Aplication*. Englewood Cliffs: Pretice hall.
- Said, M. 1981. *Pendidikan Abad Kedua Puluh dengan Latar Belakang Kebudayaan*. Jakarta: Mutiara.
- Salam,S. 1965. *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia*. Jakarta: N.V. Mega.
- Salindri, D. 1990. Peranan Elite Intelektual dalam Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1945. *Laporan Penelitian*. Jember: Universitas Jember.
- Saridjo, M. 1996. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: CV. Amisco
- Sarwono dan Shofrotum. 2013. *K. H. Ahmad Dahlan Pembaharu, Pemersatu, dan Pemelihara Tradisi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Prima.
- Sasrasoeganda. 1924. *Statuen Muhammadiyah*. Djogjakarta: Pengurus Besar Muhammadiyah
- Simbolon, P.T. 2007. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: P.T Gunung Agung.
- Soetedja, B. 1956. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Steenbrink, K.A. 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Cetakan II. Jakarta: LP3ES
- Subhan, A. 2009. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

- Sucipto, H. & Ramly. 2005. *Tajdid Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan hingga A. Syafii Ma'arif*. Jakarta: Grafindo.
- Sucipto, H. 2010. *K.H. Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik dan Pendiri Muhammadiyah*. Jakarta: Best Media Utama.
- Sudirman, A. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini*. Jogjakarta: Diva Press.
- Suminto, A. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: (P3BT).
- Sutarno. 2005. *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Syaifulloh. 2015. *Pergeseran Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tamara, N. 1984. *Figur Hamka Dimata Umat Manusia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Pembina Al Islam dan kemuhammadiyah. 1990. *Muhammadiyah: Sejarah Pemikiran dan Amal Usaha*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Thompson, P. 2012. *Siaran dari masa silam (Teori dan Metode Sejarah Lisan)*. Yogyakarta: Ombak.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Vembrianto, S.T. 1993. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana.
- Wijoyosukarto, A. H. 1968. *Pembaharuan, Pendidikan dan Pengadjaran Islam*. Malang: U.P Ken Mutia.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhairini. 1992. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN A. MATRIK PENELITIAN

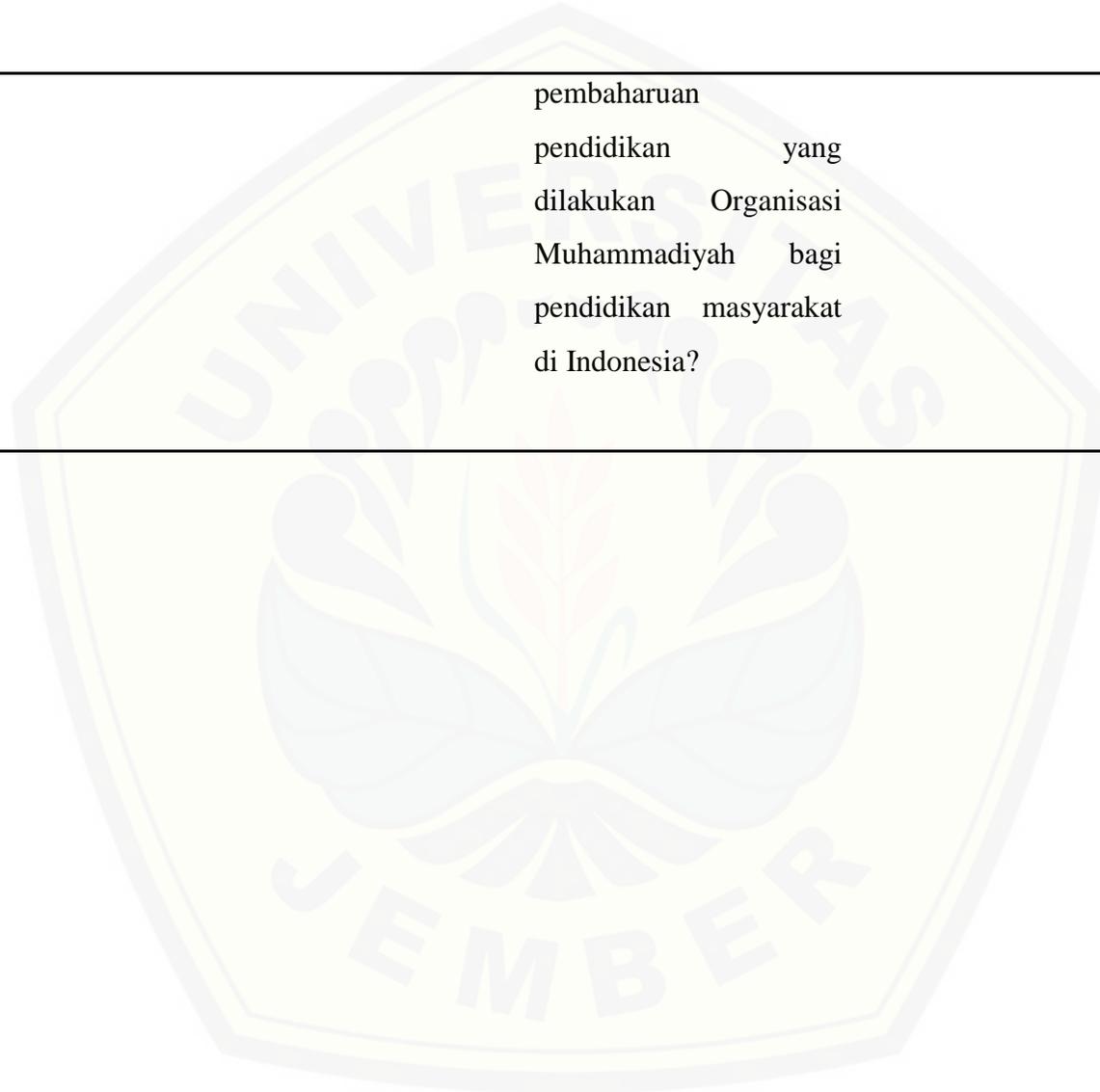
MATRIK PENELITIAN

Topik	Judul Penelitian	Sumber Data	Permasalahan	Jenis dan Sifat Penelitian	Metode Penelitian
Sejarah Nasional	Peranan Organisasi Muhammadiyah dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1923	Buku Primer dan Buku Sekunder	1. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia menjelang berdirinya Organisasi Muhammadiyah? 2. Bagaimana usaha atau tindakan yang dilakukan Organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tahun 1912-1923 ? 3. Bagaimana dampak	1. Jenis Penelitian: Penelitian Sejarah 2. Sifat Penelitian: Penelitian Kepustakaan atau Studi Literatur	Metode Penelitian Sejarah

---

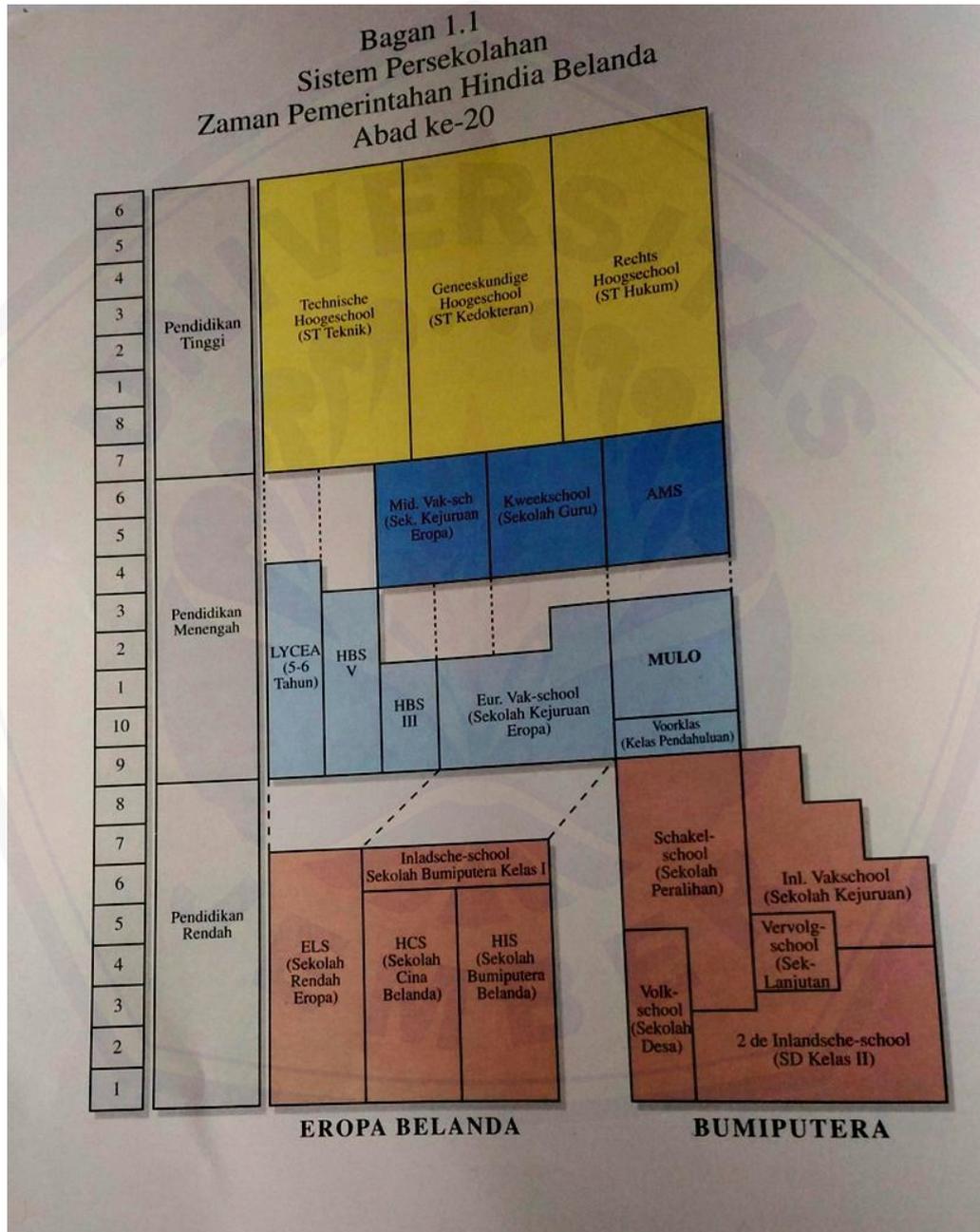
pembaharuan  
pendidikan yang  
dilakukan Organisasi  
Muhammadiyah bagi  
pendidikan masyarakat  
di Indonesia?

---



Lampiran B

Sistem Persekolahan Zaman Pemerintahan Belanda<sup>3</sup>



<sup>3</sup> Djojonegoro, W. 1996. Lima puluh tahun perkembangan pendidikan Indonesia. Jakarta: Depdikbud. hlm 36.

## Lampiran C

Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid ELS<sup>4</sup>

Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah  
Sekolah Dasar Eropa (Europeesche Lagere School)  
Tahun 1900-1940

Tahun	Sekolah			Murid Negeri				Murid Swasta				Jumlah
	Negeri	Swasta	Jumlah	Eropa	Pribumi	Cina	Sub Jml	Eropa	Pribumi	Cina	Sub Jml	
1900	169	23	192	13.592	1.545	325	15.462	3.433	70	27	3.530	18.992
1905	184	30	214	15.105	3.752	525	19.382	3.944	183	206	4.333	23.715
1910	191	33	224	17.519	3.427	828	21.774	4.205	247	549	5.001	26.775
1915	195	40	235	19.712	4.197	1.093	25.002	5.282	345	931	6.558	31.560
1920	196	53	249	20.357	5.387	1.416	27.160	7.918	766	1.120	9.804	36.964
1925	182	73	255	20.325	4.356	1.492	26.173	12.442	821	1.059	14.322	40.495
1930	196	104	300	19.773	3.357	1.279	24.409	17.875	735	1.288	19.898	44.307
1935	170	107	277	18.295	3.659	874	22.828	20.058	1.088	1.059	22.205	45.033
1940	174	118	292	18.076	4.034	609	22.719	22.775	1.116	672	24.563	47.282

<sup>4</sup> Djojonegoro, W. 1996. Lima puluh tahun perkembangan pendidikan Indonesia. Jakarta: Depdikbud. hlm 62.

## Lampiran D

Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid HIS<sup>5</sup>

Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah  
Sekolah Bumiputera-Belanda (Hollandsch Inlandsche School)  
Tahun 1915-1940

Tahun	Sekolah			Murid Negeri				Murid Swasta				
	Negeri	Swasta	Jumlah	Pribumi	Cina	Eropa	Sub Jml	Pribumi	Cina	Eropa	Sub Jml	Jumlah
1915	102	22	124	19.577	128	14	19.719	2.900	100	15	3.015	22.734
1920	132	67	199	26.149	428	82	26.659	7.055	143	41	7.239	33.898
1925	156	106	262	35.389	639	168	36.196	20.445	606	129	21.180	57.376
1930	192	100	292	37.453	1.011	244	38.708	21.332	706	164	22.202	60.910
1935	190	96	286	39.633	956	337	40.926	20.462	512	140	21.114	62.040
1940	186	99	285	45.933	654	355	46.942	24.431	460	143	25.034	71.976

<sup>5</sup> Djojonegoro, W. 1996. Lima puluh tahun perkembangan pendidikan Indonesia. Jakarta: Depdikbud. hlm 64.

## Lampiran E

Tabel 7. JENIS SEKOLAH, JUMLAH MURID DAN GURU 1920 DAN 1923

NOMOR	NAMA & TEMPAT	MURID		GURU	
		1920	1923	1920	1923
1	<b>Sekolah Angka 2</b>				
	1. Kauman/Suronatan	246	379	8	13
	2. Karangkajen	90	115	5	6
	3. Pasargede/Kotagede	113	146	5	6
	4. Lempuyangan/Bausasran	123	157	5	6
2	<b>Sekolah Calon Guru</b>				
	5. Qismul Arqa'	17	56	2	8
3	<b>Sekolah Agama</b>				
	6. Suronatan Siang	198	84	7	3
4	<b>Sekolah Angka 1</b>				
	7. HIS Met de Qur'an	-	154	32	48

sumber: Mujahid, Abu. 2013. *Sejarah Muhammadiyah Gerakan Tajdid di Indonesia*. Bandung : Toobagus Publishing. halaman 203

## Lampiran F



Para siswa HIS Met de Qur'an Muhammadiyah tahun 1922

Sumber: Djojonegoro,W. 1996. *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud. hlm 45

## Lampiran G

**KESATUAN HIDUP MANUSIA**

Oleh: K.H. Ahmad Dahlan

Pengetahuan tentang kesatuan hidup manusia adalah sebuah pengetahuan yang amat besar yang meliputi bumi dan meliputi kemanusiaan. Oleh karena itu hendaknya para pembaca memerhatikannya secara cermat, memikirkan secara serius dan jangan tergesa-gesa.

Untuk memimpin kehidupan manusia seharusnya mempergunakan satu metode kepemimpinan yaitu Al Quran.

Manusia seharusnya harus bersatu hati, karena:

1. Meskipun manusia memiliki kebangsaan yang berbeda-beda, sesungguhnya nenek moyang mereka dalam satu, yaitu Nabi Adam dan satu darah daging.
2. Agar supaya bersatu hati itu manusia dapat hidup senang secara bersama di dunia.

Apabila manusia mengabaikan prinsip kesatuan tersebut, maka mereka akan menjadi hancur dan menghancurkan. Dan ini adalah suatu kenyataan yang tak terhindarkan dan tidak dapat dibantahkan. Hendaknya para pemimpin memikirkan secara sungguh-sungguh.

Dari waktu diutusnya para Rasul dan sahabatnya dan pemimpin kemajuan pada zaman dahulu sampai sekarang sudah cukup lama para pemimpin bekerja. Mereka terdiri dari sebagian yang pernah memperoleh pendidikan tinggi, sebagian dari mereka adalah orang ternama, namun diantara mereka belum dapat bersatu hati.

Jangan para pemimpin terkejut, cobalah perhatikan keadaan disekitar, tidakkah terlihat suatu kekacauan? Saya tidak melihat sebuah bangsa, namun bangsa-bangsa lain pun tidak ada yang bersatu hati. Kenyataan ini sesungguhnya memang terasa tidak enak namun juga berbahaya.

Apakah sebenarnya yang menjadi sebabnya?

Keadaan yang demikian itu disebabkan oleh:

1. Para pemimpin belum bersatu hati. Yang satu mengabaikan yang lain, saling bertentangan pendapat dan pengetahuan, padahal pengetahuan itu diperlukan manusia. Ini menjadi pertanda pengetahuan para pemimpin itu masih kurang. Karena kekurangan pengetahuan itu menjadikan seseorang berpikir sempit. Sesungguhnya para pemimpin itu seolah masih meraba-raba dalam perdebatan diantara mereka menyebabkan timbulnya kerusakan.
2. Para pemimpin belum memimpin dengan suatu tindakan dan perbuatan akan tetapi kebanyakan hanya dengan suara saja. Sesungguhnya hal yang demikian itu baru merupakan usaha mencari pengertian dan memberikan pengertian kepada orang lain yang belum memperhatikan tindakan atau perbuatan. Para pemimpin seperti itu sebagian banyak hanya memerlukan suara agar tampak pendapatnya baik walaupun tindakannya mengecewakan, rusak dan merusakkan. sebenarnya orang mengecewaka itu telah dipermainkan oleh hawa nafsunya tanpa menyadari dan mengerti bahwa hawa nafsu itu mempermainkan mereka sehingga menyesatkan, menipu dan bohong. Tidakkah hal yang demikian ini mengakibatkan kerusakan?
3. Sebagian besar pemimpin belum menaruh perhatian pada kebaikan dan kesejahteraan manusia, akan tetapi baru memperhatikan kaum dan golongannya bahkan badannya sendiri. Jika badannya telah memperoleh kesenangan mereka merasa berpahala dan seolah telah sampai pada tujuan dan maksud. Hal yang demikian itu sudah banyak terjadi dan terlihat buruknya yang akhirnya dapat menyebabkan rusaknya perhimpunan dan kesatuan dan pecahnya yang dipimpin sebagaimana sebelum mendapatkan pimpinan. Ummat menjadi kecewa kemudian mereka jera.

### Jalan Menuju Persatuan Ummat

Para pemimpin harus mengerti benar tingkah laku, keadaan, adat istiadat orang-orang yang dipimpinnya agar supaya mampu berbuat dengan mengingat kemampuan sendiri tanpa harus tergesa-gesa serta memahami berbagai hal supaya dapat diterima dan ditolak oleh mereka. Jika hal diatas itu dapat dipenuhi, dapatlah diharapkan tumbuhnya keadaan yang mengarah kepada tercapainya "Kesatuan Hati Manusia".

Sudah menjadi kebiasaan manusia, akan menjadi gembira apabila mereka dapat memahami, melaksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya dan sejalan dengan teman dan pikirannya sendiri dan hal yang demikian ini akan dipertahankan erat-erat lahir batin. Terlebih lagi jika hal itu sudah pula menjadi menganggap dan percaya akan mendatangkan kebahagiaan dan yang menyalahinya akan memperoleh kesengsaraan dan kecelakaan. Jika para pemimpin memperhatikan maka keadaan ini tidak hanya terdapat dalam masyarakat Islam saja namun juga pada masyarakat Budha, Kristen, Yahudi.

Wahai para pemimpin! Kebenaran itu hanyalah satu, maka bagaimanakah mendapat kebenaran yang satu itu agar tidak mengakibatkan kesalahan dihadapan Allah Yang Maha Suci?

Disamping itu juga telah menjadi kebiasaan manusia; merasa segan dan tidak mau menerima hal-hal yang kelihatannya baru dan berbeda dengan apa yang sudah dijalani selama ini. Karena mereka meyakini bahwa barang yang kelihatannya baru tersebut mendatangkan kecelakaan dan kesudahan walaupun jelas dan nyata bahwa orang yang mengerjakan sesuatu yang baru tersebut memperoleh kesenangan dan kebahagiaan, kecuali orang-orang yang benar-benar berusaha menemukan hal-hal yang baik bagi sebagian besar orang serta mereka yang selalu berfikir secara dalam dan luas.

Hal-hal seperti tersebut diatas jelas merupakan sesuatu yang tidak baik, karena hanya berhukum kepada adat istiadat itu tidak boleh dijadikan dasar hukum dalam menentukan baik-buruk, betul-salah hanyalah hukum yang sah dan sesuai dengan hati yang suci.

Uraian seperti tersebut diatas harus dipikirkan secara sungguh-sungguh mendalam, agar manusia bersatu hati, karena sebelum manusia bersatu hati sudah barang tentu para pemimpin itu terlebih dahulu wajib bersatu hati. Marilah para pemimpin untuk segera berkumpul membicarakan kebenaran (hak) tanpa memandang dan memilih bangsa. Dan jangan sekali-kali puas dan putus asa sebelum menemukan kebenaran tersebut. Dengan kebenaran yang kita temukan maka bukanlah manusia lalu satu asasnya, satu pengetahuannya dan satu tindakannya.

Secara ringkas dan tegas, maka seluruh manusia harus bersatu hati mufakat yang disebabkan karena segala pembicaraan memakai hukum yang sah dan hati yang suci, terus-menerus tanpa putus asa sampai hati semua manusia bersatu. Namun demikian kenapa semua manusia mengabaikan dan menolak kebenaran? Orang yang demikian, tiada lain oleh karena disebabkan:

1. Sebagian besar karena bodoh
2. Karena tidak cocok dengan orang yang membawa kebenaran
3. Mempunyai kebiasaan sendiri sejak nenek moyangnya
4. Merasa khawatir berpisah dengan sanak saudara serta teman-temannya
5. Merasa khawatir kehilangan kemuliaan, pangkat, kebesaran, kesenangan dan sebagainya

Selanjutnya perlu diperhatikan dan dipikirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Manusia itu perlu dan harus beragama

2. Agama itu harus pada mulanya bercahaya berkilauan, akan tetapi semakin lama semakin suram. Namun yang suram bukanlah agamanya, tetapi orang yang memeluk agama tersebut.
3. Manusia harus mengikuti aturan dan syarat yang sah yang sesuai dengan akal pikiran yang suci, jangan membuat keputusan sendiri
4. Manusia wajib mencari tambahnya ilmu pengetahuan, jangan sekali-kali telah cukup pengetahuannya, apalagi menolak pengetahuan orang lain
5. Manusia itu perlu dan wajib menjalankan dan melaksanakan pengetahuannya yang utama, jangan hanya sekedar sebagai pengetahuan semata

#### **Jalan Menuju Maksud dan Tujuan Manusia dan Mahluk**

Semua mahluk itu memiliki kehendak dan hajat, dan setiap kehendak pasti ada maksud dan tujuannya, sedang untuk mencapainya pasti dan harus ada jalan. Tuhan sesungguhnya telah menciptakan dan mengadakan masa (waktu) dan jalan untuk mencapai segala maksud dan tujuan tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya maksud dan tujuan semua mahluk itu pasti dapat dicapai apabila menurut jalan dan waktunya. Sebab semua keadaan dan kejadian itu adalah kehendak Allah. Dan Tuhan telah menyediakan segala keadaan yang dimaksud manusia.

Sesungguhnya tidak ada yang lain dari maksud dan kehendak manusia itu ialah menuju keselamatan Dunia dan Akhirat. Adapun jalan untuk mencapai maksud dan tujuan manusia tersebut harus dengan mempergunakan akal yang sehat. Artinya ialah akal yang tidak terkena bahaya. Adapun akal yang sehat itu ialah akal yang dapat memilih segala hal dengan cermat dan pertimbangan, kemudian memegang teguh hasil pilihannya tersebut.

Adapun akal manusia mempunyai watak dasar menerima segala pengetahuan, karena pengetahuan bagi akal adalah merupakan kebutuhannya. Akal itu bagaikan sebuah biji atau bibit yang terbenam dalam bumi, agar supaya bibit (akal) itu tumbuh dari bumi dan kemudian menjadi pohon yang besar, harus disiangi, disiram secara terus-menerus. Demikian juga halnya dengan akal manusia, tidak akan tumbuh dan bertambah sempurna apabila tidak disirami dengan pengetahuan. Akan tetapi usaha menyiram akal dengan pengetahuan tersebut harus sejalan dengan kehendak Allah Maha Kuasa.

Setinggi-tingginya pendidikan akal ialah pendidikan dengan ilmu mantiq ialah suatu ilmu yang membicarakan sesuatu yang cocok dengan kenyataan suatu itu. Dan ilmu tersebut harus dipelajari. Sebab tidak ada manusia yang dapat mengetahui berbagai nama dan bahasa jika tidak ada yang mengajarnya, demikian juga juga orang yang mengajar itu mendapatkan ilmu dari guru mereka dan seterusnya. Oleh karena itu hal yang demikian itu memberikan petunjuk bahwa bagaimanapun pengetahuan manusia itu hanya diperoleh jika terdapat petunjuk Allah Yang Maha Mengetahui dan Bijaksana.

Namun jika da seorang manusia yang mempunyai pengetahuan lebih dari apa yang diterimanya, adalah sesuatu yang langka bahkan mustahil. Keadaan yang demikian itu bagaikan yang mendapat mata berlian diantara lobang cincin denga lobangnya. Oleh karena itu orang yang dapat berbicara dengan tajam dan tepat adalah disebabkan karean banyaknya pengetahuan mereka. Hal yang demikian itu bukanlah sesuatu yang mengherankan. Yang mengherankan ialah orang yang bisa menerima pembicaraan orang lain yang baik, kemudian membicarakan pembicaraan tersebut kepada orang lain. Orang yang demikian bukanlah orang yang lemah, walaupun sama sekali orang tersebut tidak mampu menambah pembicaraan baik yang diterimnya dari orang lain. Sesungguhnya tidak ada sesuatu perbuatan yang lebih baik dari pada orang yang mampu menghidup-hidupkan perkataan orang yang bijaksana.

Selanjutnya, agar akal manusia memperoleh kesempurnaan, dan agar supaya tetap ada pada keadaannya sebagai akal, harus memenuhi enam hal sebagai berikut:

1. Dalam memilih berbagai perkara harus dengan belas kasih, sebab manusia tidak akan sampai pada derajat utama, jika tidak dengan belas kasih. Karena watak dan sifat orang yang tidak memiliki belas kasih itu segala perbuatannya didasarkan pada kesenangan, yang semakin lama semakin bosan dan lalu menjadi sia-sia.
2. Bersungguh-sungguh dalam mencari, karena sesungguhnya segala sesuatu yang ditujukan pada keutamaannya dunia dan akhirat itu tidak akan tercapai apabila tidak dengan daya upaya, ikhtiar, pengorbanan harta benda dan dengan kekuatan pikiran.
3. Harus memilih secara jelas dan terang benderang. Sebab petunjuk itu selalu berpasangan dengan kesesatan dan barang yang baik itu selalu bebarengan dengan barang yang buruk. Oleh karena itu banyak orang yang mencari sesuatu lalu mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya harus ditolak karena bertentangan dengan kehendak semula, karena mencarinya sesuatu hanya dengan ikut-ikutan tanpa mengetahui kenyataan yang sesungguhnya dan hanya mengikuti adat istiadat saja.
4. Harus bertekad baik dalam menetapkan pilihan yang dicarinya dan tetap teguh dalam hati, dan akhirnya pekerjaan pun benar dan betul.
5. Harus dipelihara dengan baik barang yang telah diperolehnya, karena manusia itu bersifat alpa dan lera.
6. Dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena segala pengetahuan tidak akan bermanfaat apabila tidak dikerjakan sejalan dengan keadaan.

#### **Kebutuhan Yang Utama Bagi Manusia**

Sesungguhnya manusia itu memiliki kebutuhan, sebab kehidupan didunia tidak berada dalam keadaan tercukupi dan atau sebaliknya, akan tetapi manusia dihidupkan dalam keadaan utuh dan payah. Oleh karena itu manusia perlu mengerti secara benar tempat kebutuhan tersebut.

Sesungguhnya pengajaran yang berguna bagi akal manusia itu jauh lebih dibutuhkan oleh manusia dari pada makanan yang mengisi perutnya. Pengajaran bagi manusia akan lebih cepat menambah besarnya akal dibandingkan dengan tambah besarnya badan oleh makanan. Disamping itu sebenarnya mencari harta benda didunia itu lebih payah dari pada mencari pengetahuan yang berfaedah dan memperbaiki perbuatan atau sikap dan tindakan. Karena sesungguhnya jika teliti dan dipikirkan dengan cermat kehidupan dan keberadaan manusia itu banyak yang "ngawur" dan buta tuli apabila dibandingkan dengan yang "setiti" dan hati-hati serta "mengerti". Dan orang-orang yang "mengerti" itu sebenarnya tambah banyak dibanding dengan orang yang menjalankan pengertiannya. Maka sesungguhnya orang yang akalnya sempurna harus melihat posisi dirinya sendiri, dalam keadaan yang bagaimana dirinya itu?

## Lampiran H

**PREADVIES DARI HOOFBESTOOR  
PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA  
PADA KONGRES ISLAM BESAR DI CIREBON**

(naskah ini kemudian intinya dimuat dalam Statuen Muhammadiyah cetakan ketiga, 1924, dengan judul:

**PERINGATAN BAGI SEKALIAN MUSLIMIN [MUHAMMADIYYIN]**

Dikutip dari buku: LAPORAN TAHUNAN KE IX (1-1 s/d akhir 1-2 1922), hal 124-139. Sedang naskah "Peringatan bagi sekalian Muslimin (Muhammadiyyin)" dikutip dari "Statuen dan Algemeent Huishoudelijk Reglement dari pada Moehammadijah", PB Muhammadiyah, Yogyakarta, cetakan ke 3, 1924, hal 43-49. Untuk ejaan yang disesuaikan dengan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, sedang susunan kalimat sesuai dengan aslinya).

Fasal:

1. Meratakan sekolah Islam diseluruh Hindia Timur.
2. Mempersatukan asas pengajaran dalam sekolah-sekolah Islam Hindia.
3. Supaya bab 1 dan 2 dapat kejalanannya dengan sepatutnya.

**Fasal I**

**Hal Meratakan Sekolah Islam seluruh Hindia Timur**

1. Masing-masing orang Islam wajib meratakan ilmunya, jadi wajib meratakan agama Islam, baik ulama, baik orang Islam yang baru sedikit ilmunya. Ya, yang sekedar diketahui.
2. Orang Islam yang belum pandai harus belajar kepada yang pandai. Jadi orang Islam itu bersifat dua, yaitu: sifat guru dan sifat murid. Kepada tiap-tiap orang Islam ada dua wajib, yang harus dijalani, yakni: belajar dan mengajar.
3. Penderitaan Islam lebih lagi wajibnya berbuat, supaya kewajiban yang tersebut diatas itu dapat berlaku sebagaimana mestinya.
4. Orang Islam harus leluasa (tidak ada rintangan yang menghalang-halangi) melebarkan agama didunia, lebih pula ditanahnya sendiri. Kalau ada juga rintangannya, harus berlaku terus juga, dengan beriktirar menghilangkan rintangan itu. Apa sebab? Sebab wajib.
5. Kesempatan belajar dan mengajar itu dimana-mana juga, terutama dalam madrasah, yang bisa disebut sekolahan atau pondok, atau pesantren. Waktunya pun ada tiap-tiap masa dan ketika. Terutama pada waktu sekarang ini yakni waktu kekalutan orang menjalankan agama Islam, sehingga banyak orang yang menyebutkan "waktu agama Islam di Hindia Timur Kalut".
6. Masa sekarang ini boleh dikata masa Islam bangun. Perserikatan yang bersaskan Islam itulah tandanya dan kenyataannya, mislanya perserikatan Sarekat Islam, Muhammadiyah dan lain-lainnya.
7. Orang Islam sudah mulai bangun kepada agamanya. Kita orang, lebih pula perserikatan Islam, harus beriktirar, supaya sesudah bangun itu mendapat jalan yang betul (*Sirathal Mustaqim*)

8. Jalan yang betul itu yakni agama Islam sejati. Inilah gambar agama Islam sejati dengan pendek: agama Islam itu ada dua bahagiannya, yakni lahir dan batin. Lahir itu ada dua bahagiannya, yaitu:
- Mu'amalah ma'allah (perhubungan manusia dengan Allah). Hal ini ada lima bahagiannya, yaitu: mengucap shahadat-menjalani shalat- mengeluarkan zakat-menjalani puasa dan naik haji.
  - Mu'amalah Ma'al (perhubungan manusia dengan yang dijadikan oleh Allah). Hal ini ada tiga bahagiannya, yaitu: amar Ma'ruf nahi'amil munkar (mencegah perbuatan yang busuk) dan munawarah (tolong menolong).

Batin itu ada dua bahagiannya, yaitu:

- Akaaidal iman (kepercayaan yang teguh)
- Ahlak ( yaitu mengetahui, sifat mazmumah atau sifat yang tercela, dan sifat mahmudah atau sifat yang terpuji).

Jadi orang Islam yang sudah mulai bangun itu harus dipimpin kepada Islam yang sejati, yakni lahir batin.

9. Lain dari pada sekoalah atau pondok, harus diadakan diman-mana segolongan orang, yang oekerjaannya terutama semata-mata hanya propaganda (mengajak, melebarkan, menyuruh) perkara agama Islam. jadi seolah-olah guru agama Islam berkeliling kemana-mana. Diman-mana harus diadakan tempat megajar Islam. siapa saja diterima ditempat itu akan mendengarkan pengajaran guru keliling itu. Tentu nanti pada akhirnya dapat berbuat demikian itu diman-mana juga, mislanya dipasar-pasar, dipenjara, dijalan-jalan, ditanah lapang dan sebagainya. Adapun pengolongan orang yang mengerjakan hak ini itu menetapi perintah yang tersebut dalam Al Qur'an suci pada surat 3, Ali Imran ayat 104; "haruslah engkau mengadakan daro pada kamu, yang mengajak kepada kebajikan, yang memerintah pada perbuatan baik dan mencegah kepada perbuatan yang jahat. Orang-orang yang demikian itulah yang berbahagia.

## Fasal II

### Hal Mempersatukan Asas Pengajaran dalam Sekolah-Sekolah Islam di Hindia

10. Persatuan Islam itulah yang harus kita tuju, supaya Orang Islam dapat hidup secara Islam, menurut rancangan hukum-hukumnya sudah sempurna terpaku dalam Al Qur'an suci.
- Disini kami kutp sedikit dari Al Quran suci supaya orang Insaf akan keperluan orang Islam bersatu.
- Surat tiga ayat 103: berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, semua saja, jaganlah berpisah-pisah.
- Surat XLII ayat 13: sudah memberi Allah sariat kepada kamu, berupa agama, yaitu barang yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nuh dan sudah Saya wasiatkan kepadamu Muhammad, dan yang sudah Saya wasiatkan kepa Ibrahim, dan Musa, dan Isa dirikalnlah agama, dan jangan berpisah-pisah dalam agama.

Surat VII ayat 47: Dan turutlah Alloh dengan pesuruhNya, dan janganlah bertengkar (bercekkok, pasulayan) sebab kalau begitu lembeklah kamu dan hilangkan harummu. Dan bersabarlah kamu sesungguhnya Alloh itu beserta dengan orang-orang yang sabar.

11. Semua orang Islam harus menjadi badan satu, yang berguna. Tandanya hidup itu bergerak tidak diam saja.
12. Gerak oarang Islam seperti tersebut dalam nomor 11 itu harus menuju satu, yakni Selamatnya Dunia. Rasa yang demikian ini menjadi rasa sekalian orang Islam.
13. Supaya Islam dapat menyelamatkan dunia, Islam harus sehat, kuat dan besar. Jadi bahaya pun boleh tertolak oleh kesehatan, kekuatan, dan kesabaran Islam itu.
14. Jika disebutkan, bahwa hidup orang Islam itu harus berasaskan Al Quran memang sudah sebetulnya. Tetapi supaya terang maksud Al Quran, harus diketahui, bahwa maksud Al quran ini dengan pendek demikian:
  - a. Beribadah kepada Alloh tiada perantaraan antara manusia dengan Alloh
  - b. Menetapkan persamaan segala manusia. Yang beda itu hanya takutnya kepada Alloh
  - c. Semua keperluan bersama-sama harus dibicarakan bersama-sama
  - d. Manusia itu tiadakan menerima pahala lain dari pada jasanya (kebaikannya) sendiri, dan tidak menanggung dosa melainkan atas kesalahannya sendiri
  - e. Mengakui haknya akal dan ilmu. Tiap-tiap pengajaran agama itu harus dibuktikan dengan menjalankan akal
  - f. Persaudaraan antara agama dan madaniyah (kemajuan, kultur). Membedakan baik dan busuk, terlarang dan tercegah, kekuatan kepercayaan untuk menolak kultur (madaniyah), yang berlawanan atau membawa kepada perlawanan dengan hukum-hukum yang sudah ditentukan Alloh
  - g. Bahwa perubahan keadaan manusia itu berlaku atas cara yang tiada berubah-ubah, yang dijadikan oleh Alloh. Yakni hukum sebab dan musabab. Mengawaskan keadaan alam yang teratur ini dan memeriksa rahasia-rahasia yang ada didalamnya.
  - h. Mengakui keharusan adanya nafsu dan keinginan manusia. Tiada diutamakan manusia membunuh segala nafsu dan mencegah segala keinginan, hanyalah diwajibkan segala manusia itu memperhatikan segala batas-batas atas segala sesuatu itu yang diperintahkan Alloh Ta'ala
  - i. Mengharuskan (tiada dilarang, diprayogake) persatuan segala manusia bagi segala perbuatan (muamalah) untuk keperluan hidup manusia. Jadi berhubungan natar manusia Islam dengan siapa juga tiada terlarang untuk keperluan hidup segala manusia.
  - j. Mengakui bahwa kemajuan dunia senantiasa bertambah-tambah tiada berhenti-henti, dan mengakui kewajiban berusaha membantu tambhnya kemajuan itu
  - k. Menentukan, bahwa segala suruhan agama itu maksudnya memperbaiki budi dan menambah bahagia manusia; sekali-kali tidak akan memberati dan menhinakan dia
  - l. Kemerdekaan melahirkan timbangan dan memeriksa barang sesuatu; dan mewajibkan itu dalam hal agama

15. Yang tersebut diatas itu asa kehidupan orang Islam; jadi sekolah-sekolah itu harus bersaskan seperti tersebut diatas itu. Jangan sekali-kali menyalahi atau berlawanan. Pengajaran dalam sekolah Islam dan ddikannya harus dipikir dan dijlankan, supaya akhirnya jadi seperti tersebut diatas itu. Jadi didikan dan pengajaran didalam sekolah Islam itu harus berisi:
- Iman (kepercayaan)
  - Cinta kepada sesama manusia, dan memihak kepada nasib orang sengsara
  - Roh sama-sama, menurut putusan suara yang sedikit sendiri perlawanannya
  - Membangun persaan menanggung jawab (*verantwoordelijkheidsgevoel*) dan menyerah (*pasrah-berusting*)
  - Menghidup-hidupkan pikiran
  - Memerintah dan menguasai atas diri sendirinya, tetapi tidak dengan menyiksa diri. Menghargakan kebaikan dalam hidup, tidak dengan berlebih-lebihan. Didikan hidup berbahagia dan sebagainya.

### Fasal III

#### Supaya Bab I dan II dapat Kejelasan dengan Sepatutnya

16. Tiap-tiap tempat yang ada orang Islam harus diadakan comite, dari pada orang-orang yang suka, yang terutama semata-mata memikirkan dan berbuat perkara sekolah agama itu. Muhammadiyah sudah tentu suka sekali bekerja bersama-sama, sebab perkara itu memang wajibnya
17. Permulaannya seadanya saja. Jika terpaksa, boleh tidak memakai meja dan bangku seperti sekolah biasa. Tetapi mulailah, dan comite jangan bosan-bosan, sehingga pecat nyawanya dari badannya. Orang harus mengingat, bahwa tanah Hindia berteriak menangis minta pengajaran agama Islam. Jika orang berpura-pura tidak mendengar tangisnya, berdosa besarlah kita.

Jangan orang berkata: "Kami tidak dapat memulai, sebab tidak dapat mendirikan rumah sekolah, mengadakan bangku-bangku, lemari, buku-buku, gurunya pun susah dicari yang baik, digaji banyak dsb."

Pakailah misalnya cara begini: Pinjam pendopo salah seorang dari pada saudara-saudara untuk rumah sekolah. Meja boleh dari pada buluh atau kas minyak sekolah.

Guru seadanya saja, sebab guru yang baik toh jarang ada, kan biaya guru itu bolehlah misalnya memakai cara begini:

Orang empat puluh yang mempunyai anak belajar disekolah itu diatur supaya mengadakan makan dan pakaiannya seorang guru itu. Jika diatur betul-betul, tentu seolah –olah orang empat puluh itu masing-masing boleh dikata tidak bertambah *begrootingnya* setiap bulan.

Begitu juga tentang tempat guru itu. Lagi pula jika kita mengingat akan kewajiban kita kepada agama, hal yang demikian itu sudah tentu dapat berlaku, dan yang menjadi guru itu barangkali juga juga suka mendermakan kekuatan dan kepandaiannya

dengan tidak begitu mengingat harga kepandaian dan kekuatannya, dirasakannya, bahwa ia beribadah kepada Allah.

Pada pendapatan kami, jika comite itu bekerja sungguh-sungguh dan tidak bosan, tentu dapat berdiri sekolah itu.

Jalan mencari uang banyak sekali, lagi pula orang Islam wajib turut bekerja.

18. Comite dimana diikat menjadi satu *Hoofdcomite*. Ini yang menjaga dan memimpin, supaya asa pengajaran bisa satu rupa dan memikir rupa-rupa hal pula
19. *Hoofdcomite* itu harus berbuat sekuat-kuatnya supaya ada pendidikan guru Islam
20. *Orgaan* (surat majalah) itu perlu sekali diadakan dan dikeluarkan oleh *Hoofdcomite* untuk mengampangkan tuntutan pengajaran dan didikan sekolah-sekolahan itu. Dan akan tempat melahirkan pendapatan comite-comite dan guru itu.
21. Keyakinan yang memberi bicara ini, asal tiada bosan saja, sekolahan itu lekas menjadi baik, seperti yang sudah kerap kejadian pada semua pekerjaannya Muhammadiyah
22. Begitulah hendaknya dengan menantikan guru yang agak patut, misalnya keluaran dari *Kweekschool* Islam yang didirikan Muhammadiyah. Jadi *Kweekschool* Islam mengeluarkan murid sekolah sudah ada. Lain dari *Kweekschool* Islam tersebut, ada juga cabang Muhammadiyah yang beriktir membuat guru Islam, misalnya di Surakarta. Maksud yang demikian itu hendak diteruskan diamna dapat. Pengharapan pemberi bicara ini, supaya perserikatan Islam, misalnya SI dan lain-lain suka mengiktiarkan semacam itu, supaya tanah Hindia boleh lekas tertolong
23. Dalam sekolah itu lain dari pengajaran agama belaka, harus diajarkan pengajaran biasa, dimana dapat dan seberapa dapat.
24. Perkataan *Leerplan* sekolah yang hendak kita dirikan itu sesungguhnya bahagiannya *Hoofdcomite* dan mufakatnya orang Islam sekaliannya. Disini hanyalah kami lampirkan percobaan *Leerplan* (*proeve van een leerplan, rang-rang leerplan*). Hal pembagiannya tiap-tiap tahun dan tiap-tiap klas, pendeknya perkara teknis (*technisch gedeelte*) boleh di buat oleh *Hoofdcomite* atau orang yang ahli perkara ini.

Hanyalah pengharapan kami, supaya kita orang dengan lekas memulai mengadakan sekolah dengan pengajaran agama Islam, sedapat-dapatnya. Kita orang harus mengerjakan apa-apa yang kita orang dapat mengerjakan, dengan seadanya saja dulu.

Asas Islam toh sudah terang seperti tersebut diatas. Kitab-kitab akan diajarkan agama Islam pun sudah ada, meskipun belum sempurna dan belum amat mencukupi banyak-banyaknya, misalnya yang dibuat oleh Muhammadiyah, yakni Muhammadiyah bagian Taman Pustaka, yang memang pekerjaannya begitu.

**PERCOBAAN *LEERPLAN* SEKOLAH ISLAM**

1. Agama Islam (ini boleh dibagi-bagi banyak, dan dalam sekolah diajarkan mana-mana yang sudah dapat diajarkan, lagi pula bergantung pada sekolahnya, rendah, pertengahan, atau tinggi. Mana-mana yang harus dikerjakan dalam sekolah, misalnya bersembahyang dan lain sebagainya).
2. Hikayat Nabi Muhammad Saw.
3. Hikayat nabi-nabi
4. Hikayat Islam
5. Hikayat Hindia
6. Membaca Al Quran
7. Membaca dan menulis bahasanya sendiri dengan bahasa Melayu dengan huruf sendiri atau huruf Latin
8. Menulis huruf Arab dan Pegon
9. Berhitung
10. Ilmu bumi
11. Menggambar
12. Permulaan bahasa Arab supaya dapat akhirnya meneruskan belajar lebih tinggi, yang harus juga kita adakan.

## PEMANDANGAN DAN KETERANGAN

Barbesar hati *Hoofdbestuur* Muhammadiyah membaca surat kabar "Fadjar Asia" keluaran bulan Agustus 19 22 no. 13 karena di situ dikabarkan, bahwa akan diadakan Konggres Islam di Cirebon.

Lamalah sudah Konggres Islam menjadi kenang-kenangan Muhammadiyah, tetapi sampai sekarang belum dapat diadakan. Bersukur kepada *Allah azza wa jalla*, karena Konggres Islam itu bisa diadakan oleh orang Islam, seperti nyata pada sekarang ini.

Muhammadiyah mengharap, supaya Konggres Islam ini menjadi permulaanya Konggres Islam, yang akan diadakan pada tiap-tiap waktu.

Jika dikatakan orang, bahwa Kongres Islam pertama ini belum besar artinya bagi orang Islam dan dunia Islam, maka biarlah. Akan tetapi kita percaya, bahwa Konggres Islam serupa ini besar artinya, dan makin banyak kali diadakan, makin besar juga artinya.

Ingatlah bahwa: PERSATUAN ISLAM itulah saja yang boleh menyelamatkan Islam dan dunia Islam. Selama orang Islam masih berpisah-pisah, selamat tidak akan dapat dicapai. Firman Allah dalam Al Qur'an Kariem surat Ali Imran; 3: ayat 103 demikian maksudnya: "Peganglah engkau semua pada tali Allah (agama), dan janganlah berpisah-pisah."

Dan juga dalam surat Anfal; 8: ayat 47, demikianlah maksudnya: "Dan turutlah Allah dan Rasul -Nya, dan janganlah engkau bercekcokan (*pasulayan*), sebab kalau begitu papalah (lembeklah, apes) engkau semua, dan hilanglah harammu. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar." Memang, persatuan Islam itu sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al Qur'an. Berdosa besar dan mendapat sengsalarah orang Islam, jika tiada bersatu hati, tiada bersatu rasa, tiada bersatu maksud, tiada sekata dan seia.

Konggres Islam yang begini rupa itu suatu ikhtiar akan mempersatukan orang Islam. begitulah besarnya arti Konggres Islam ini.

Apa sebab diikhtiarkan supaya ada persatuan Islam? ya, sebab

sekarang ini. keadaan orang Islam itu di mana-mana boleh dikata belum bersatu, baru mulai bersatu. Hidup pada satu zaman, pada satu tempat, bekerja bersama-sama, kenal satu sama lain, berhubungan perkara kehidupan, itu sesungguhnya belum boleh dikatakan BERSATU, baru boleh dikatakan MANUSIA ISLAM, BANYAK BERKERUMUN.

Orang baru boleh dikatakan bersatu kalau sudah SATU RASA, SATU MAKSUD, SATU PERJALANAN, SATU... MENCARI KESELAMATAN DUNIA AHIRAT.

Pada sekarang ini lihatlah ke kanan kiri, bagaimana hidup orang Islam. Tidak perlu orang menengok negeri yang jauh-jauh, misalnya Afrika, Turki, Hindustan atau lain-lainnya, sebab kita orang toh tidak terang tentang keadaannya yang sesungguhnya. Lihatlah tanah kita sendiri, yakni tanah Hindia Timur atau tanah Jawa.

Bukankah penghidupannya banyak yang susah? Bukankah banyak orang yang berbuat maksiyat dari rupa-rupa sebabnya? Bukankah masih banyak orang yang *gugon-tuhon* (*tachayul*) sebab belum mengerti agama? Misalnya percaya kepada kekuatan zimat-zimat, minta pertolongan kepada arca, kayu besar dan sebagainya, mendua atau menduakan Allah dan lain-lainnya lagi.

Bukankah masih banyak sekali orang yang belum dapat membaca dan menulis? Bukankah... dsb.dsb. masih banyak lagi; orang dapat mengisi rupa-rupa, dari pada yang kecil sampai pada yang besar amat.

Memang, tanah Islam Hindia Timur perlu sekali mendapat penerangan Islam, supaya terhindar dari pada kegelapan, dapat pertolongan, supaya terhindar dari pada sengsara, naik kepada kemuliaan Islam.

Siapa seharusnya, yang wajib menolong? Tiada ada yang lebih wajib menolong lain dari pada kita orang, orang Islam di Hindia. Tanah Hindia boleh saya katakan hutan lebar. Siapa lagi yang wajib menebas (*mbabad*) menjadikan huma, sawah ladang atau pekarangan, melainkan kita orang sendiri, orang Islam.

Jika kiranya kita orang tiada lekas menolong, saya *khawatir*, kalau-kalau nanti kasep tiada dapat tertolongi lagi. Jika demikian siapa yang bersalah, siapa yang berdosa besar, melainkan kita orang sendiri.

Sesungguhnya pada keyakinan kami, tanah Hindia ini sudah

menjadi huma Islam, tetapi kurang pemeliharaan, jadi bisa menjadi hutan lagi atau berubah menjadi huma lain rupa. Marilah bersama-sama kita peliharakan, dengan segala kekuatan yang ada pada kita.

Siapa pula, yang menjunjung Islam, melainkan orang Islam? Jika orang Islam tiada lekas-lekas menjunjung Islam, dengan jalan yang selamat meratakan ilmu dan agama Islam, nanti kasep (terlambat), kita orang tiada lagi dapat menjunjung Islam.

Peribahasa sudah menerangkan, begini bunyinya: "Jika engkau merasa gatal, harus kamu garu (garuk) sendiri, jangan disuruh guru orang lain."

Pendeknya, mulia atau papanya Islam, selamat atau tidaknya Islam itu hanya tergantung pada kita orang Islam sendiri tiada lain.

Tetapi *alhamdulillah*, dengan adanya Kongres Islam ini segala khawatir yang tersebut di atas itu sudah hilang, karena kami percaya, bahwa Kongres Islam ini, dan kongres lainnya lagi yang akan diadakan, menentukan kewajiban kepada orang Islam semua akan menetapi kewajibannya dengan suka dan rela hati.

Ya Allah, berilah kiranya pertolongan. Mudah-mudahan dapat menjunjung perintah Tuhan, dengan sepenuh-penuhnya. Amien, amien, amien.

Zaman berubah, penghidupan berubah, keadaan tanah Hindia berubah, jalan pikiran orang pun berubah juga. Jadi cara melebarkan agama pun harus berubah juga, supaya ajaran agama berhasil yang bagus.

Dahulu semua orang, baik orang besar-besar, maupun orang kecil (rakyat) tentu belajar agama sejak kecilnya di pondok-pondok, di kampung-kampung atau mendatangkan guru agama. Jika hendak bersekolah juga, maka bersekolah ia sesudah belajar mengaji. Jadi setidak-tidaknya orang tentu tahu sedikit tentang agama Islam, kejadiannya setidak-tidaknya akan tidak benci akan agama Islam dan adat-istiadat Islam. Tetapi sekarang keadaan yang demikian itu sudah lampau. Peribahasa orang: "Sebab tiada tahu maka tidak cinta."

Kebanyakan, atau boleh dikata semua, orang besar-besar atau priyayi-priyayi sudah tiada lagi begitu. Mulai belum umur enam tahun anaknya sudah dimasukkan sekolah, yang tiada diajarkan di situ agama Islam. Dan rakyat...mulai menurut cara itu juga.

Katanya, sebab perlu supaya ahirnya anaknya dapat mencari makan dengan jadi priyayi punggawa pabrik-pabrik, toko-toko atau lainnya. Seolah-olah ia berpikir, bahwa yang dapat mencari makan itu hanya orang yang bersekolah semacam itu saja. Kalau tiada bersekolah semacam itu akhirnya tiada dapat mencari makan. Adapun nanti fasal agama boleh menyusul, kalau ada tempo. Akan tetapi sesudah anak itu besar, keluar dari sekolah, lalu mencari makan, tentu tidak ada lagi kesempatan atau kemauan belajar agamanya Islam, sebab "tidak tahu maka tidak cinta", terkadang malah benci.

Bukannya kami ini tiada mufakat anak dimasukkan sekolah sekali-kali tiada begitu. Hanya orang-orang harus memikirkan, supaya anaknya dapat pengajaran agama Islam. Alhamdulillah saya ucapkan, karena dengan Kongres Islam ini dapatlah mengubah keadaan yang busuk itu menjadi baik. Jadi keadaan yang tiada baik demikian itu sudah mulai terlepas. Jalannya adalah rupa-rupa, yakni:

1. Di luar waktu sekolah harus ada kesempatan bagi murid-murid akan mempelajari agama Islam, tetapi harus tiada menjadi keberatan untuk pikiran anak-anak murid. Pengajaran itu seharusnya dibantu oleh orang tuanya murid masing-masing. Wujud pembantuan itu yang terutama sekali yaitu orang tuanya itu harus juga menjalani perintah agama Islam. Orang toh tiada patut menyuruh anaknya berbuat ibadah sedang badannya sendiri tiada beribadah.
2. Mendirikan sekolah yang menjadi kebutuhan kita bersama, dengan diberi pengajaran agama Islam, misalnya sekolah yang sejajar dengan sekolah kelas dua, HIS, Schakelschool dan sebagainya.

Ikhtiar yang tersebut di atas itu harus bersama-sama dengan ikhtiar membuat guru Islam. Nanti orang tahu akan kejadiannya. Ingatlah bahwa Sekolah Desa itu sekolah kita sendiri, biayanya kita orang sendiri yang memikul, baik rumah sekolahnya, baik perkakas pengajarannya, baik gaji gurunya. Pendeknya semuanya kita-kita orang sendiri yang memikul. Jadi kita orang sudah dapat mengadakan guru agama, yang kecakapannya kira-kira sepadan dengan kecakapan guru desa, tentulah dapat kita memberi pengajaran agama dalam sekolah desa itu.

Kami berseru kepada Kongres ini Islam ini, bahwa ini perkara yang amat penting. Jika kita orang dapat menyampaikan maksud yang saya katakan itu, insya Allah tertolonglah anak-anak kita dari pada kegelapan.

Marilah kita bersama-sama membuat guru agama Islam, dan bantulah maksud membuat guru agama Islam itu.

Adapun sekolah Goepermen klas dua atau HIS di situ tentunya tiada ada pengajaran agama apa pun juga, sebab sekolah Goepermen itu neutral, tiada memihak kepada agama apa saja. Baiklah kita berikhtiar dengan jalan lain, supaya anak-anak kita yang bersekolah dalam sekolah klas dua atau HIS itu mendapat juga pengajaran agama Islam.

Jalan lain yang saya maksudkan ini misalnya seperti yang sudah dijalani oleh perserikatan Muhammadiyah. Sudah beberapa lamanya Muhammadiyah memberi pengajaran agama pada Kweekschool, Normaalschool, dan ada lagi murid-murid sekolah HBS dan HKS dan sebagainya. Pengajaran itu berlaku di luar waktu sekolah.

Jika kita orang sudah mempunyai guru agama yang sudah cukup bilangannya tentulah tiada sedikit kebajikan pada dunia Islam. Ada beberapa sekolah, sekolah klas dua misalnya, yang minta pengajaran agama Islam kepada Muhammadiyah, tetapi terpaksa dengan tersayang-sayang tiada dapat menuruti permintaan itu.

Jadi Guru Islam itulah yang amat perlu sekali lekas diadakan. Sebab itu dengan susah payah Muhammadiyah mengadakan Kweekschool guru Islam; sekarang ini Kweekschool masih kecil dan belum sempurna, tetapi dengan berkat Allah dan atas pertolongan saudara-saudara Islam, Muhammadiyah percaya, nanti menjadi besar dan sempurna juga.

Diharap mudah-mudahan orang Islam bangun, berdiri, berjalan, berbuat (tumandang). Matahari sudah tinggi. Kita orang Islam sudah terbelakang (keri).

Stelling (hukum) no. 9 (pokok pikiran nomor 9) itu sesungguhnya sudah dijalankan oleh Muhammadiyah. Malah boleh dikatakan bahwa berdirinya Muhammadiyah itu mula-mula dari pada cara stelling no. 9 itu. Segolongan orang yang menjadi guru berkeliling itu disebut golongan Tabligh, atau bahagian Tabligh.

Boleh dikatakan bahwa bahagian Tabligh itu orang yang pekerjaannya menebas hutan. Sesudah ditebas (dibabat)

maka dijadikan sawah atau halaman oleh Bahagian Sekolah. Terangnya begini: Tabligh itu mengajar agama Islam ke mana-mana. Pada tempat orangnya sudah merasa akan keperluannya pengajaran agama Islam, maka biasanya lalu didirikan orang sekolah untuk anak-anak dan untuk orang tua-tua laki-laki dan perempuan.

Maka tiada putus-putus diikhtiar oleh Muhammadiyah, supaya di mana-mana bisa diadakan golongan Tabligh ini. Sesungguhnya hampir di mana-mana saja ada orang yang cakap menjalankan Tabligh itu. Hanya seperkara yang belum ada. Yaitu tahunya bahwa dia wajib menjalankan Tabligh. Tiada akan berhenti ikhtiar kita, kalau di mana-mana belum ada Tabligh yang mencukupi banyaknya dan sempurnanya. Bantulah saudara, dan masuklah kepada Tabligh.

#### **VOORSTEL DARI HOOFDBESTUUR MUHAMMADIYAH PADA KONGRES ISLAM BESAR DI CIREBON**

Akan mencukupi maksud melebarkan sekolah atau pengajaran agama Islam, haruslah orang dengan leluasa dan gampang menjalankan maksud itu.

Minta supaya Kongres Islam ini membicarakan Staatsblad tahun 1905 no. 550 dan Bijblad no. 6363 (Ordonansi Guru/pen) yang salinannya terlampir bersama ini. Maksud voorstel ini, supaya dengan jalan yang selamat agama Islam dapat disiarkan seluruh Hindia.